



JURNAL
MAKSIPRENEUR
MANAJEMEN, KOPERASI & ENTREPRENEURSHIP

Latifah

PENGARUH KUALITAS SISTEM PERPAJAKAN, RESIKO AUDIT, AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ambar Lukitanigsih

PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA

Bambang Sugeng Dwiyanto & Jemadi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Tutuk Ari Arsanti

PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

Eny Sulistyowati & Totok Danangdjojo

MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA PADA HUBUNGAN ANTARA PROGRAM JAMSOSTEK DAN KINERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA DI DIY DAN SOLO

Yuli Kurniyati

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PEW UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA YOGYAKARTA

Vertasius Sanjaya Nugraha

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)/USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

JURNAL MAKSIPRENEUR

MANAJEMEN, KOPERASI DAN ENTREPRENEURSHIP

Volume III | Nomor 1 | Desember 2013

Jurnal Maksipreneur (JMP) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi UP45 (Universitas Proklamasi 45) Yogyakarta dua kali setahun. Jurnal ini dimaksudkan untuk menghimpun tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku, atau gagasan orisinal yang segar yang terutama terkait dengan kajian manajemen, koperasi, dan kewirausahaan. Redaksi mengundang para ahli, praktisi, atau siapa saja yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan keilmuan bidang-bidang tadi untuk mengirimkan karyanya.

Penanggung Jawab

Andriya Risdwiyanto, SE, M.Si

Ketua Penyunting (Chief Editor)

Dra. Siti Noor Hidayati, MM

Wakil Ketua Penyunting

Susi Widjajani, SE, M.Si.

Penyunting Pelaksana (Editorial Board)

Drs. Bambang Sugeng D., MM

Dra. Eny Sulistyowati, MM

Drs. Jemadi, MM

Sekretaris Penyunting & Dokumentasi

Djoko Wijono, SE, MM

Sirkulasi

Supriyati, BA

Terbit Pertama Kali

Desember 2011

ISSN 2089-550X

Alamat Redaksi Fakultas Ekonomi UP45, Jl. Proklamasi No. 1,
Babarsari, Yogyakarta 55281 | Tlp. 0274-485517 Faks. 0274-486008
email: jurnalmaksipreneur@gmail.com

UP 45

UNIVERSITAS PROKLAMASI '45

The University of Petroleum

FAKULTAS EKONOMI

DAFTAR ISI

- iii DARI BABARSARI
- 1-20 **Latifah, SE, M.Sc**
PENGARUH KUALITAS SISTEM PERPAJAKAN, RESIKO
AUDIT, AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
- 21-35 **Ambar Lukitaningsih**
PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN : IMPLEMENTASI
DAN IMPLIKASINYA
- 36-61 **Bambang Sugeng Dwiyanto dan Jemadi**
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
- 62-74 **Tutuk Ari Arsanti**
PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN
- 75-89 **Totok Danangdjojo dan Eny Sulistyowati** MEDIASI
KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA PADA HUBUNGAN
ANTARA PROGRAM JAMSOSTEK DAN KINERJA
KARYAWAN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA
DI DIY DAN SOLO
- 90-120 **Yuli Kurniyati**
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK
PEW UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA
YOGYAKARTA
- 121-141 **Vertasius Sanjaya Nugraha**
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)/
USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT
DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

DARI BABARSARI

Pada edisi ketiga ini, kami menghadirkan tulisan yang lebih didominasi dengan nuansa Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal ini menjadi penting, mengingat sumber daya manusia menjadi hal yang vital dalam setiap usaha ekonomi. Tulisan yang terkait dengan Manajemen Pemasaran dan Koperasi juga kami ketengahkan di sini, sesuai dengan kitah kami sebagai jurnal yang bertemakan manajemen, koperasi dan *entrepreneur*. Melalui ruang ini, kami kembali mengundang para pengajar, peneliti, aktivis serta praktisi untuk berbagi pengalaman mengenai manajemen koperasi dan *entrepreneurship* di jurnal ini. Selain itu kami juga mengundang sidang pembaca untuk mengirimkan artikel manajemen dan ekonomi lainnya.

Dalam edisi volume III Nomor 1 ini, kami tidak menghadirkan rubrik resensi buku seperti yang pernah dimuat pada edisi sebelumnya. Selanjutnya kami juga membuka diri atas saran dan kritik dari pembaca semua untuk kesempurnaan jurnal kami.

Salam hangat dari Babarsari.

Redaksi

PENGARUH KUALITAS SISTEM PERPAJAKAN, RESIKO AUDIT, AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Latifah, SE, M.Sc (lalakuspri@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45

ABSTRACT. *This paper examines the effect of tax system quality, audit risk, accountability, and tax penalty towards tax compliance. The purpose of this paper is to seek empirical proof does those factors affecting tax compliance have a positive effect and play a significant role for individual tax compliance in Indonesia. The researcher decides to sample taxpayers working for Organisasi Kelompok Kontrak Kerjasama (KKKS) in BPMIGAS Indonesia. A survey questionnaire is distributed to the sample during October 2012 by email as research data. By employing simple descriptive statistics, the study on taxpayers working for BPMIGAS Indonesia found out that all variables: tax system quality, audit risk, accountability, and tax penalty shows a positive effect towards tax compliance. The findings of this research implied that the government should put more concern in terms or service quality, transparency, and tax related facts to be informed for individual taxpayers.*

Keywords: Tax Compliance, Tax System Quality, Audit Risk, Accountability, Tax Penalty.

I. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Peranan strategis APBN tersebut berkaitan dengan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Mengingat peranan yang sangat strategis tersebut APBN harus sehat dan berkesinambungan (sustainable). Indikator APBN yang sehat dan berkesinambungan antara lain : defisit harus terkendali menuju seimbang atau surplus, keseimbangan primer terjaga positif, rasio hutang cenderung menurun. Untuk menuju APBN yang berimbang atau surplus

tersebut maka sumber-sumber pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan harus ditingkatkan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2012 peranan penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp 1.019,33 triliun atau 78.84% dari total RAPBN sebesar Rp 1.292,88 triliun. Hal ini membuktikan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat signifikan terhadap APBN.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan perpajakan mendapat tantangan yang sangat berat dengan adanya fakta bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia ternyata masih rendah. Hal ini bisa dibuktikan dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan. Jumlah wajib pajak terdaftar SPT dari tahun 2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Orang Pribadi dan PPh Badan menunjukkan angka yang selalu meningkat. Secara ringkas angka tersebut digambarkan dalam tabel 1.

Tabel 1 Wajib Pajak Terdaftar SPT Dari Tahun 2006-2011

SPT Tahunan	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PPh Orang Pribadi	2.829.869	3.095.368	5.095.655	8.623.237	12.567.000	16.104.163
Pph Badan	1.041.954	1.135.749	1.246.173	1.373.383	1.534.933	1.590.154

Sumber: Data Dirjen Pajak RI

Jumlah wajib pajak yang telah melapor SPT dari tahun 2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Orang Pribadi dan PPh

Badan menunjukkan angka yang selalu meningkat juga. Secara ringkas angka tersebut digambarkan dalam tabel 2.

Tabel 2 Wajib Pajak Yang Telah Melaporkan SPT

SPT Tahunan	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PPh Orang Pribadi	898.036	899.567	1.677.160	4.853.323	7.700.691	8.812.251
Pph Badan	342.535	378.723	420.689	559.791	501.384	520.374

Sumber: Data Dirjen Pajak RI

Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar SPT dari tahun 2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Orang Pribadi menunjukkan prosentase yang fluktuatif. Pada tahun 2006 dengan klasifikasi SPT Tahunan untuk PPh Orang Pribadi sebesar 31,7% , tahun 2007 sebesar 29,1%, tahun 2008 sebesar 32,9%, tahun 2009 sebesar 56,3%, tahun 2010 sebesar 61,3% dan tahun 2011 sebesar 54,7%.

Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar SPT dari tahun 2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Badan menunjukkan prosentase yang fluktuatif. Pada tahun 2006 dengan klasifikasi SPT Tahunan untuk PPh Badan sebesar 32,9% , tahun 2007 sebesar 33,3%, tahun 2008 sebesar 33,8%, tahun 2009 sebesar 40,8%, tahun 2010 sebesar 32,7% dan tahun 2011 sebesar 32,7%. Secara ringkas angka tersebut digambarkan dalam tabel 3.

Tabel 3 Rasio Jumlah Wajib Pajak Yang Telah Melaporkan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT

SPT Tahunan	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PPh Orang Pribadi	31,7%	29,1%	32,9%	56,3%	61,3%	54,7%
Pph Badan	32,9%	33,3%	33,8%	40,8%	32,7%	32,7%

Sumber: Data Dirjen Pajak RI

Dari tabel rasio jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan terhadap jumlah wajib pajak terdaftar SPT di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan masih rendah.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji dan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mengambil dari beberapa variabel dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riahi (2004) yang membandingkan tingkat kepatuhan pajak antar negara-negara di dunia. Mereka mengambil 31 (tiga puluh satu) negara sebagai sampel penelitian. Cara untuk membandingkan tingkat kepatuhan

pajak tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat kepatuhannya. Tingkat kepatuhan tersebut diukur menggunakan empat variabel. Variabel-variabel itu adalah situasi perdagangan bebas, pentingnya pasar ekuitas di masing-masing negara, keefektifan undang-undang, dan tingginya norma-norma moral (diukur dengan tingkat kriminalitas) masing-masing negara. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia masih rendah dan berada pada peringkat 24 dari 31 negara dengan ideks kepatuhan pajak sebesar 2,53.

Sanders dkk., (2008) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan kesadaran atas sanksi terhadap kepatuhan pajak pada industri konstruksi khususnya tentang use tax compliance. Hasil dari penelitian tersebut adalah akuntabilitas dan kesadaran atas sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap use tax compliance.

Johnson dkk., (2010) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak penjualan, dengan menggunakan pendekatan eksperimental untuk mengevaluasi dampak dari peningkatan pengawasan sempurna yang dianalogikan dengan tingkat resiko audit terhadap pajak penjualan di Amerika. Kesimpulannya bahwa monitoring yang sempurna (audit) tidak akan meningkatkan kepatuhan pajak jika tidak diterapkan dengan beberapa kebijakan pelengkap lainnya.

Normala (2004) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak (tax compliance) di Malaysia dengan membandingkan dua model teoritikal kepatuhan wajib pajak (taxpayers compliance), dan hasilnya adalah kedua model tersebut menunjukkan bahwa tingkat sanksi (penalty rate) dan tingkat resiko audit (audit rate) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak (tax compliance)/ meningkatkan kepatuhan pajak (increase tax compliance). Akan tetapi apabila para wajib pajak merasakan adanya administrasi pajak dan sistem pajak yang tidak adil (unfair tax administration and tax system), mereka akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

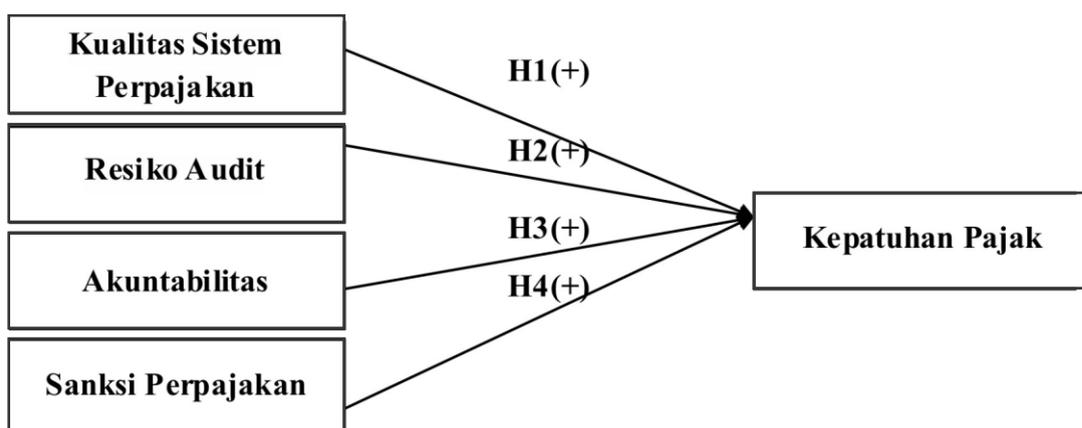
Hyun (2005) meneliti kenapa kepatuhan pajak (tax compliance) di Korea dan Jepang itu berbeda. Hasilnya adalah bahwa Jepang mempunyai tingkat aturan jauh lebih baik dibanding dengan Korea pada kedua faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu tingkat resiko audit dan struktur sanksi (penalty structure). Palil dkk., (2011) dalam penelitian dengan judul "The Evaluation and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe", menyimpulkan bahwa setiap negara mempunyai hukum pajak dan regulasi yang berbeda-beda sehingga tingkat kepatuhan pajaknya juga berbeda-beda. Semakin tinggi level resiko audit dan sanksinya akan berpengaruh pada tingginya kepatuhan pajak juga.

Jatmiko (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh sikap wajib pajak (WP) pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari semua penelitian terdahulu, mulai dari Riahi (2004), Sanders dkk., (2008), Johnson dkk., (2010), Normala (2004), Hyun (2005), dan Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa para peneliti menggunakan variabel yang berbeda-beda dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel dalam penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara bersamaan. Peneliti ingin mencari bukti empiris apakah sistem perpajakan, resiko audit, akuntabilitas, dan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk Dirjen Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan memperhatikan **kualitas sistem perpajakan, resiko audit, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan.**

Model penelitian yang diajukan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

II. TINJAUAN LITERATUR

1. Kepatuhan Pajak

Andreoni dkk., (1998) mendefinisikan kepatuhan pajak (tax compliance) sebagai keinginan wajib pajak (taxpayer) untuk mematuhi hukum-hukum pajak yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Song dkk., (1978) mendefinisikan kepatuhan pajak berdasarkan peraturan pajak di United States yang menganut sistem pajak self assesment dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance), sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan pajak adalah kemampuan dan keinginan untuk patuh atau mengikuti hukum-hukum pajak yang berlaku yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor-faktor situasional lainnya pada waktu dan tempat secara bersamaan.

2. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

3. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan yaang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti peraturan tentang tarif pajak, sistem pemungutan pajak, kebijakan-kebijakan pajak yang dibuat, dan reformasi perpajakannya.

4. Reformasi Perpajakan

Gill (2003) menyatakan suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah pajak perlu direformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan utama. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektifitas administrasi penerimaan negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi

dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

5. Audit (Pemeriksaan) Pajak

Audit (pemeriksaan) pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Akuntabilitas

Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa suatu organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti

dalam manajemen sektor publik. Sedangkan dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mahsun, 2006).

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma) perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada 2 (dua), yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan adayang diancam dengan Sanksi Administrasi saja, ada yang diancam dengan Sanksi Pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana (Mardiasmo, 2011).

8. Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan pajak merupakan kemampuan dan keinginan wajib pajak untuk mematuhi atau memenuhi hukum-hukum pajak yang berlaku dengan melaporkan pendapatan tahun berjalan dengan benar dan membayar pajak dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. Dalam penelitian ini penulis membangun empat hipotesis dengan latar belakang seperti tertuang pada paragraf-paragraf berikut.

Sistem perpajakan yang baik tercermin dari modernisasi sistem perpajakan sehingga tercipta kejelasan tugas aparatur pajak, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, dan komunikasi antara wajib pajak dengan petugas pajak bisa lebih efektif, karena sistem perpajakan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : Kualitas Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak memiliki kewajiban dalam pemeriksaan pajak, antara lain :

1. Memenuhi panggilan pemeriksa pajak untuk datang sesuai waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan.
2. Meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
3. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
4. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
6. Pemeriksaan;
7. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor; Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Dengan kewajiban seperti disebutkan di atas wajib pajak akan kehilangan banyak waktu dalam menjalani pemeriksaan dan tidak produktif selama masa pemeriksaan. Hal ini tentu sangat tidak diharapkan oleh wajib pajak karena akan mempengaruhi penghasilan. Oleh karena itu hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : Resiko audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas dalam pengertian luas menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan banyak stakeholder lain. Oleh karena itu pelaporan belanja pajak pada APBN harus mudah dipahami, terbuka, dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang cukup tentang alokasi belanja dari sumber penerimaan pajak. Dengan akuntabilitas pemerintah yang bagus diharapkan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3 : Akuntabilitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi dengan baik. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu sanksi yang tegas dan efektif diharapkan akan membuat wajib pajak patuh dalam hal perpajakan. Oleh karena itu hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu para karyawan yang bekerja pada Organisasi Kelompok Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam koordinasi BPMIGAS. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan di bulan Oktober tahun 2012. Kuesioner penelitian akan dikirim melalui email ke setiap kepala divisi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KKKS dalam koordinasi BPMIGAS.

1. Pengukuran Variabel

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan survei yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggabungkan pertanyaan kuesioner penelitian terdahulu. Variabel kepatuhan pajak terdiri dari 10 butir pertanyaan . Variabel sistem perpajakan terdiri dari 6 butir pertanyaan diambil dari (Suherman, 2009). Variabel resiko audit (pemeriksaan) pajak terdiri dari 5 butir pertanyaan yang diambil dari (Zuhri, 2009). Variabel

akuntabilitas terdiri dari 8 butir pertanyaan diambil dari Rahayu (2006). Sedangkan sanksi administrasi diambil dari Jatmiko (2006) terdiri dari 4 butir pertanyaan. Pengukurannya menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Netral (N) diberi nilai 3, Setuju (S) diberi nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5.

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Partisipan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu para karyawan yang bekerja pada Organisasi Kelompok Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam koordinasi BPMIGAS. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan di bulan Oktober tahun 2012. Kuesioner penelitian akan dikirim melalui email ke setiap kepala divisi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam KKKS dalam koordinasi BPMIGAS. Kuesioner diemail ke 200 orang, dan yang membalas email dan menjawab dengan baik ada 109 orang. Dari 109 kuesioner yang kembali, semuanya dapat diolah.

2. Analisis faktor

Penelitian ini tidak menggunakan analisis faktor dikarenakan para responden tidak lengkap dalam mengisi identitas responden. Nama kantor banyak yang tidak menjawab, mereka hanya menyebutkan nama yang susah bisa ditebak berapa umur dan jenis kelaminnya. Dengan data identitas yang tidak lengkap tersebut maka dipilih untuk tidak melakukan analisis faktor.

3. Hasil

a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur (kuesioner) mengukur apa yang ingin diukur. Validitas yang akan digunakan adalah construct validity. Construct validity menguji seberapa baik hasil penelitian yang didapatkan dari instrumen pengukuran yang digunakan sesuai dengan teori dimana sebuah pengujian dilakukan (Sekaran, 2000). Nilai r hitung dan nilai r tabel (nilai kritis) pada tiap item pertanyaan dibandingkan untuk diukur validitasnya. Tiap item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Nilai r hitung diperoleh dari Pearson Correlation, sedangkan nilai r tabel 0,1865 diperoleh dari Tabel Product Moment Correlation ($\alpha= 0,05$; $n=109$).

Hasil pengujian validitas variabel kualitas Sistem Perpajakan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Kualitas Sistem Perpajakan

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Nilai Kritis	Keterangan
A1	0,952	0,1865	Valid
A2	0,970	0,1865	Valid
A3	0,919	0,1865	Valid
A4	0,951	0,1865	Valid
A5	0,912	0,1865	Valid
A6	0,861	0,1865	Valid
A7	0,729	0,1865	Valid

Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai Pearson Correlation ketujuh item pertanyaan untuk variabel kualitas sistem perpajakan adalah lebih besar dari 0,1865 (nilai kritis). Jadi, kesimpulannya adalah item-item pertanyaan A1-A7 adalah valid.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Resiko Audit

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Nilai Kritis	Keterangan
B1	0,915	0,1865	Valid
B2	0,922	0,1865	Valid
B3	0,844	0,1865	Valid
B4	0,896	0,1865	Valid
B5	0,895	0,1865	Valid

Pengujian validitas selanjutnya adalah uji validitas variabel resiko audit. Tabel 5 di atas menyajikan hasil dari uji validitasnya. Dari kelima item pertanyaan yang diuji B1- B5, semuanya valid, karena mempunyai nilai Pearson Correlation lebih dari 0,1865 (nilai kritis).

Tabel 6 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Akuntabilitas

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Nilai Kritis	Keterangan
C1	0,827	0,1865	Valid
C2	0,886	0,1865	Valid
C3	0,909	0,1865	Valid
C4	0,907	0,1865	Valid
C5	0,875	0,1865	Valid
C6	0,908	0,1865	Valid
C7	0,924	0,1865	Valid
C8	0,889	0,1865	Valid

Tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa kedelapan item pertanyaan mempunyai nilai Pearson Correlation lebih besar dari 0,1865 (nilai kritis). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan C1-C8 adalah valid.

Tabel 7 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Sanksi Perpajakan

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Nilai Kritis	Keterangan
D1	0,890	0,1865	Valid
D2	0,929	0,1865	Valid
D3	0,899	0,1865	Valid
D4	0,928	0,1865	Valid

Tabel 7 di atas menyajikan hasil dari uji validitasnya. Dari keempat item pertanyaan yang diuji D1-D4, semuanya valid, karena mempunyai nilai Pearson Correlation lebih dari 0,1865 (nilai kritis).

Pengujian validitas pertanyaan variabel terakhir adalah uji validitas variabel kepatuhan pajak. Tabel 8 di bawah menyajikan hasil dari uji validitasnya. Dari kesembilan item pertanyaan yang diuji E1-E9, semuanya valid, karena mempunyai nilai Pearson Correlation lebih dari 0,1865 (nilai kritis).

Tabel 8 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Kepatuhan Pajak

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Nilai Kritis	Keterangan
E1	0,886	0,1865	Valid
E2	0,880	0,1865	Valid
E3	0,874	0,1865	Valid
E4	0,886	0,1865	Valid
E5	0,778	0,1865	Valid
E6	0,918	0,1865	Valid
E7	0,908	0,1865	Valid
E8	0,883	0,1865	Valid
E9	0,893	0, 1865	Valid

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Sekaran, 2000). Untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan Cronbach's coefficient alpha. Menurut Hair dkk., (2010) bahwa rule of thumbs dari nilai alpha sebesar 0,7 namun nilai 0,6 masih dapat diterima.

Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Sistem Perpajakan	0,959	Reliabel
Resiko Audit	0,938	Reliabel
Akuntabilitas	0,962	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,932	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,962	Reliabel

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas tiap variabel penelitian. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, dengan demikian kelima variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

c. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memastikan apakah interpretasi yang dihasilkan dari analisis data tidak menyimpang, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada model tersebut yaitu dengan cara melakukan uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi normal atau tidak. Model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis histogram menuju pola distribusi normal. Ghozali (2007) uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov juga dapat digunakan untuk menguji normalitas residual. Apabila uji tersebut menunjukkan angka yang signifikan, berarti data residual terdistribusi tidak normal. Hasil pengujian Kolmogorov Smirnov secara ringkas dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorof-Smirnov	Nilai Sig	Sig	Status
<i>Unstandardized residual</i>	0,767	0,599	p>0,05	Normal

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa nilai unstandardized residual adalah 0,599, lebih besar dari 0,05 ($p>0,05$), sehingga keseluruhan data data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang normal.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi timbul apabila terdapat korelasi antara variabel pengganggu (disturbance) pada periode t dengan disturbance pada periode sebelumnya (periode t-1). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai dari uji statistik Durbin-Watson (D-W). Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- $1,65 < DW < 2,35$ tidak terjadi autokorelasi
- $1,21 < DW < 1,65$ atau $2,35 < DW < 2,79$ tidak dapat disimpulkan
- $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$ terjadi autokorelasi

Sumber: Trihendradi (2007)

Dari hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watsonnya sebesar 1,712. Nilai ini terletak antara $1,65 < DW < 2,35$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual regresi dan menggunakan absolut tersebut sebagai variabel dependen. Pengujian melihat signifikansi hasil dari regresi dengan absolut residual sebagai variabel dependen. Masalah heteroskedastisitas akan terjadi bila masing-masing variabel independen mempunyai nilai Sig. lebih kecil dari alpha 0,01 (Ghozali, 2009).

Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Kualitas Sistem Perpajakan	0,508
Resiko Audit (Pemeriksaan) Pajak	0,612
Akuntabilitas	0,500
Sanksi Perpajakan	0,879

Dari hasil yang ada pada tabel di atas dapat dianalisis bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan, nilai Sig. dari masing-masing variabel independen lebih besar dari nilai alpha 0,01, sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan confidence interval untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Uji yang digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai rule of thumb adalah jika VIF melebihi 10 berarti terdapat multikolinearitas.

Tabel 12 berikut ini memperlihatkan bahwa tolerance value keempat variabel independen adalah lebih dari 0,1, dan Variance Inflation Factor

(VIF) dari masing- masing variabel independen kurang dari 10. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kualitas Sistem Perpajakan	0,218	4,580
Resiko Audit	0,268	3,729
Akuntabilitas	0,208	4,811
Sanksi Perpajakan	0,626	1,597

Pengujian Goodness of Fit Model Penelitian

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig pada hasil uji F tabel ANOVAb. Nilai Sig yang dihasilkan adalah 0,000, lebih kecil dari alpha 0,05.

Tabel 13 ANOVAb

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5318.386	4	1329.596	94.173	000a
Residual	1468.348	104	14.119		
Total	6786.734	108			

Analisis berikutnya adalah menentukan seberapa besar kontribusi variabel- variabel independen terhadap variabel dependen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R² pada Tabel Summaryb . Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai Adjusted R² menunjukkan angka 0,775. Hal ini berarti variabel kualitas sistem perpajakan, resiko audit (pemeriksaan) pajak, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan, mampu menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 77,5%, sedangkan sisanya 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

d. Pengujian Hipotesis

Tabel 14 Hasil Uji T

Variabel	Unstandardized Coefficient Beta	T hitung	p-value
Konstanta	2,266	1,245	0,216
Kualitas Sistem Perpajakan	0,406	3,254	0,002
Resiko Audit	0,531	3,186	0.002
Akuntabilitas	0,242	2,593	0,011
Sanksi Perpajakan	0,262	2,126	0,036

Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 0,406, $t_{hitung} = 3,254$ dengan nilai $p=0,002$. Dikarenakan koefisien regresi bernilai positif (0,406) sesuai dengan nilai yang diharapkan untuk hipotesis yang pertama, yaitu positif (+), dengan $p<0,05$, maka hipotesis null berhasil ditolak. Artinya hipotesis pertama terdukung. Semakin bagus kualitas sistem perpajakannya maka wajib pajak akan semakin patuh.

Hasil uji t untuk variabel resiko audit tabel 14 di atas, memperlihatkan bahwa variabel ini mempunyai nilai koefisien regresi 0,531, $t_{hitung} = 3,186$ dengan nilai $p=0,002$. Dikarenakan koefisien regresi bernilai positif (0,531) sesuai dengan nilai yang diharapkan untuk hipotesis kedua, yaitu positif (+), dengan $p<0,05$ maka hipotesis null berhasil ditolak. Artinya hipotesis kedua terdukung. Semakin baik resiko audit (pemeriksaan) pajaknya maka wajib pajak akan semakin patuh.

Variabel akuntabilitas pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai koefisien regresi 0,242, $t_{hitung} = 2,593$ dengan nilai $p=0,011$, dengan $p<0,05$ berarti variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, apabila semakin tinggi tingkat akuntabilitasnya maka wajib pajak cenderung akan semakin patuh.

Variabel sanksi perpajakan pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai koefisien regresi 0,262, $t_{hitung} = 2,126$ dengan nilai $p=0,036$, dengan $p<0,05$ berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama adalah kualitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas sistem perpajakan yang baik, seperti pelayanan yang menyenangkan, mudah, dan cepat akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Oleh karena itu, dirjen pajak diharapkan selalu memperbaiki dan melakukan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia sehingga tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi.

Kedua, resiko audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya monitoring yang bagus dari kantor pajak maka para wajib pajak akan berlaku patuh. Apabila tidak patuh akan menanggung resiko audit tersebut.

Kesimpulan yang ketiga yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan keterbukaan dalam penggunaan dana pajak, ketepatan alokasi anggaran yang berasal dari kumpulan uang pajak dan pertanggungjawaban yang mudah dipahami, para wajib pajak akan merasa puas karena sudah bisa berkontribusi untuk kemajuan negara. Hal tersebut membuat para wajib pajak akan lebih patuh, bahkan dengan senang hati membayar pajak dengan baik dan benar. Oleh karena itu pemerintah harus membuat program-program pembangunan yang baik guna mengambil hati para wajib pajak, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah juga tinggi.

Keempat, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan seperti keterlambatan membayar pajak, pengenaan denda terhadap wajib pajak yang lalai, sanksi pidana atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak ternyata bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi sanksi tersebut haruslah memperhatikan seberapa besar jumlahnya dan bagaimana penerapannya. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah sebagai pemegang kuasa pemberi sanksi diharapkan bisa meningkatkan penerapan sanksi tersebut kepada para wajib pajak dengan lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J., Erard dan Feinstein.: 1998, 'Tax compliance', *Journal of Economic Literature*, pp. 818-860.
- Dekker, Marcel. 1999. Handbook on Taxation. New York.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika-Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gill, Jit B.S.: 2003, "The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform."
- Gujarati, Damodar N., 1995. *Basic Econometrics* Third Edition. Singapore: Mc. Graw Hill.
- Hair. Jr, Jf. Black W. C, Babin B. J., Andersen R. E., and Tatham R, L.: 2010. "Data analysis Multivariate". 8th Edition. Person Education. Inc. New Jersey.
- Hyun, Jin K.: 2005, 'The Compliances in Korea and Japan: Why are they Different?', *Journal of Economic Literature* H8.
- Internal Revenues Services (IRS) 2009. *Update on Reducing the Federal Tax Gap and Improving Voluntary Compliance*.
- Jatmiko, Agus N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang: Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Johnson, Cathleen., David M., dan Claude M.: 2010, 'The Effect of Perfect Monitoring of Matched Income on Sales Tax Compliance: An Experimental Investigation', *Journal of Economic Literature* C3, H3, H71.
- Mahsun, Muhamad. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 2011*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Normala, Siti.: 2004, 'The Influence of Penalties on Taxpayers' Compliance: A Comparison of The Theoretical Models', *Journal of Economics and Management*, Volume 12, Number 1.

- Palil, Mohd R., dan Ahmad F.M.: 2011, 'The Evaluation and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe', *Australian Journal of Basic and Applied Science*, pp. 557-563.
- Rahayu, Dewi P. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Riahi, B.A.: 2004, 'Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale', *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, pp. 135-143.
- Sanders, D.L., Phillip M.J.R., dan Govind S.I.: 2008, 'Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance', *Journal of the American Taxation Association*, pp 1-20.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business* Third Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Setiyaji, Gunawan, dan Hidayat A.: 2005, 'Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia', *Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia* Esa Unggul, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Song, Y.D., dan Yarbrough: 1978, 'Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey', *Public Administration Review*, pp. 442-452.
- Suherman, A. Tatang. 2009. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Hukum UGM.
- Trihendradi, Cornelius. 2007. *Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zuchri, Muhammad. 2009. *Analisis pengaruh layanan profesionalisme pegawai dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Timur*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Akuntansi UGM.

PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA

Ambar Lukitaningsih (ambaryudono@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRACT. *Writing paper is conducted to reveal the development of the marketing concept, implementation and implications. The explanation begins with a description of the scope of marketing, a second discussion about the marketing concept and its development, followed by a discussion of the implementation of the marketing concept and concludes with managerial implications.*

The development of the original understanding of marketing is more focused issue of physical distribution business enterprise then develop to the transaction which although not involve spending money and marketing activities can be carried out by institutions outside the business.

As a consequence of the expansion of the notion of marketing, the scope of marketing is also increasingly widespread. This process continues so that raises more and more marketing phenomenon. Phenomena are analyzed and presented by marketing experts, is then used as a reference in understanding the implementation of the marketing concept between the years 1960-1980's.

Changes have occurred with the theory of alternative marketing concept proposed by Fullerton (1988) and Houston (1986). In terms of the marketing concept, which originally seated over the company as the first and last of a series of business activities, changed completely to the consumer as the beginning and end of the company's activities. The development of the role of marketing revealed by Webster (1992) provides the latest alternative marketing concept that acts as an organizational network. Logical consequence all company activities should be directed to the consumer, given the conditions of competition has increased, but in doing its work, the company should be prosecuted execute better than its competitors in order eventually to provide customer satisfaction and this is the purpose of the company.

In order for consumer satisfaction can be integrated, then the company should use marketing as a strategic business concept that provides ongoing satisfaction, not a moment, not only for the investors / owners and consumers but also provide ongoing satisfaction also for its employees. In this concept the company seeks to satisfy all its stakeholders.

But reality shows that although many businesses are aware of the importance of customer satisfaction, but still few of them are running customer service program is good and right. The program is limited to satisfying customers slogans and ceremonial. They are more likely to hunt for new customers and ignore existing customers. This phenomenon can be seen in the allocation of marketing costs are mostly devoted to the promotion and only a small portion devoted to retaining customers.

Keywords: Marketing Concepts, Implementation, Implications

I. PENDAHULUAN

Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam siklus yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Dalam perusahaan, pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba, kegiatan pemasaran pada perusahaan juga harus dapat memberikan kepuasan pada konsumen jika menginginkan usahanya tetap berjalan.

Sejak orang mengenal kegiatan pemasaran, telah banyak ahli mengemukakan definisi tentang pemasaran yang kelihatannya sedikit berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Perbedaan ini disebabkan karena mereka meninjau pemasaran dari sudut pandang yang berbeda.

Selanjutnya Drucker (1969) mengartikan pemasaran sebagai berikut: *Marketing is not only much broader than selling, it is not specialized activity at all. Marketing encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view of its final result, that is, from the customer point of view.*

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemasaran merupakan tanggung jawab manajemen secara umum dan memprioritaskan pelanggan merupakan tanggung jawab semua unsur yang ada dalam perusahaan. Banyak yang berpendapat bahwa pemasaran seharusnya memegang peranan penting dalam penetapan arah strategi suatu perusahaan. Hal ini cukup beralasan mengingat perencanaan strategis perusahaan merupakan suatu usaha untuk mempertahankan perusahaan tetap konsisten dengan lingkungan bisnisnya, dan pemasaran memiliki fungsi tradisional sebagai katalisator antara perusahaan dengan pelanggan, distributor dan pesaingnya. Kotler (1997) mengatakan bahwa: Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Stanton (1994) mempunyai pendapat, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan

dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dengan orang lain sebagai suatu sistem. Selanjutnya Stanton beranggapan bahwa keberhasilan pelayanan dalam pemasaran menentukan keberhasilan perusahaan. Untuk itu kegiatan pemasaran harus dikoordinasikan dan dikelola dengan cara yang baik. Meskipun istilah pemasaran sukses dalam fenomena pemasaran sejak awal kemunculannya sangat beragam, namun dilihat dari berbagai definisi konsep pemasaran, bisa terlihat secara jelas ada sesuatu yang saling berhubungan antara produsen dan konsumen. Lebih jauh terdapat kecenderungan hubungan pertukaran yang merupakan hal penting dalam memahami dasar konsep pemasaran yang muaranya adalah untuk memenuhi *human needs* dan *wants*.

Merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi sebuah organisasi bisa memenuhi *human needs* dan *wants*. Untuk itu dalam implementasi konsep pemasaran dalam organisasi masih memerlukan perbaikan orientasi dan filosofi managerial. Lebih-lebih di kebanyakan organisasi menunjukkan pertentangan filosofi dan ini memunculkan masalah dalam implementasi konsep. Filosofi pemasaran biasanya ditunjukkan sebagai satu diantara sejumlah filosofi managerial yang secara terus menerus bersaing untuk kejelasannya di dalam organisasi.

Penulisan paper ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap perkembangan konsep pemasaran, implementasi dan implikasinya. Penjelasan diawali dengan uraian tentang ruang lingkup pemasaran, bahasan kedua tentang konsep pemasaran dan perkembangannya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang implementasi konsep pemasaran dan diakhiri dengan implikasi manajerialnya.

II. RUANG LINGKUP PEMASARAN

Keberadaan pemasaran tidak terlepas dari sebuah fenomena dan fakta yang berkaitan aktifitas pemasaran atau praktik pemasaran dan praktik pemasaran ini muncul sejak adanya kegiatan bisnis di tahun 1870. Dimana fenomena pemasaran yang muncul pada saat itu sangat bervariasi (beranekaragam). Dengan keanekaragaman ini mengakibatkan pandangan yang berbeda-beda bagi ahli pemasaran, tapi hasil dari keanekaragaman ini justru bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemasaran.

Membahas tentang perkembangan konsep pemasaran, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan ruang lingkup pemasaran yang luas, meliputi marketing mix, perilaku konsumen, komunikasi pemasaran dan masih banyak lagi yang menimbulkan keanekaragaman fenomena. Berkaitan

dengan hal itu maka agar lebih bisa dipahami, oleh Hunt (1991) dilakukan pengelompokan pada konferensi AMA tahun 1972. Hunt (1991) berusaha mengungkapkan hasil pengamatannya terkait dengan bagaimana mengklasifikasikan fenomena marketing.

Hunt (1991) mengatakan bahwa fenomena marketing dapat dikenali melalui dimensi positif – normative, mikro – macro dan profit – non profit. Dalam perspektif positif yang menggambarkan, menjelaskan, memprediksi dan memahami aktifitas pemasaran dalam bentuk fenomena-fenomena yang eksis. Sementara itu dalam perspektif normative, perspektif yang dipakai adalah memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi atau individu atau sistem pemasaran.

Sedangkan fenomena marketing bisa terjadi dalam organisasi atau institusi profit maupun non profit. Pada institusi profit adalah organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapat profit atau keuntungan. Sebaliknya organisasi atau institusi non-profit adalah organisasi yang mempunyai tujuan tidak mencari profit. Fenomena marketing dalam cakupan mikro, aktifitasnya dijalankan oleh unit secara individual sedangkan pada cakupan makro lebih menunjuk pada tingkat kelompok Consumers, Social Responsibility (CSR).

Dengan berkembangnya pengertian pemasaran mulai dari lembaga bisnis sampai dengan non-bisnis dan juga perluasan dari pihak yang terlibat dalam pertukaran dalam pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung, maka cakupan bahasan pemasaran juga semakin luas. Secara umum cakupan bahasan dalam pemasaran meliputi antara lain (Hunt, 1976): *consumer behavior, pricing, purchasing, sales management, product managemet, marekting communication, comparative marketing, social marketing, the efficiency/productivity of marketing system, the role of marketing in economic developepment, packaging, channel of distribution, marketing research, societal issues in marketing, retailing, whloesaling, the social responsibility of marekting, international marketing, commodity marketing, and physical distribution.*

Cakupan lain yang cukup menarik dilakukan oleh Kotler (dalam Hunt, 1991) dengan mengklasifikasikan pemasaran kedalam konsep mikro, makro, normatif, dan positif, sehingga diperluas menjadi 8 area yaitu profit sector, mikro, positif; non-profit sector, mikro, positif; profit sector, mikro, normatif; non-profit sector, mikro, normatif; profit sector, makro, positif; non-profit sector, makro, positif; profit sector, makro, normatif; dan non-profit sector, makro, normatif. Terkait dengan mikro-makro/positif ini telah memunculkan berbagai macam konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang demikian beragam ini kemudian menjadi semacam pedoman dalam praktik bisnis sehingga berakumulasi menjadi normative atau preskriptif (profit – non profit/mikro-makro/normative). Proses demikian terus berlanjut sehingga memunculkan semakin banyak fenomena pemasaran. Fenomena-fenomena yang ada dianalisis dan disajikan oleh para ahli

pemasaran, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam memahami implementasi konsep pemasaran.

III. PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuas kebutuhan debitur merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan (Henry Assael, 1990). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil makna bahwa seluruh kegiatan dalam perusahaan harus ditujukan kepada pemuas kebutuhan konsumen, sehingga dapat diperoleh laba maksimum dalam jangka panjang, demi kelangsungan hidup perusahaan. Awal mula munculnya konsep pemasaran dikenalkan pada tahun 1950, bermula pada penilaian bahwa perusahaan terlalu berorientasi pada volume penjualan dan cenderung mengabaikan kepentingan konsumen. Karena pemasaran pada waktu itu, dianggap hanya mempunyai fungsi untuk menciptakan permintaan atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan (Boarden, 1964). Konsep ini berpendapat bahwa faktor kunci untuk kemampuan memperoleh laba bukan hanya terletak pada jumlah penjualan yang dicapai, melainkan terletak pada kepuasan konsumen jangka panjang. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, muncul perkembangan konsep pemasaran modern. Ada dua isu penting yang ada di dalamnya yang pertama marketing domain, area dimana konsep dipertimbangkan untuk diperluas dengan karakter yang jelas dari konsep itu sendiri dan yang ke dua adanya debat tentang domain yang tepat telah diawali oleh Kotler dan Levy (1969) yang menyatakan bahwa aktifitas marketing telah menembus penerapannya dalam bidang politik, universitas dan lembaga charitas seperti halnya pada perusahaan dengan orientasi profit.

Perkembangan teori pemasaran telah melampaui beberapa tahap. Secara historis perkembangan teori pemasaran dimulai dengan "*The Marketing Revolution*" yang di konsepsikan Keith (1960) dengan dasar pada fenomena pemasaran pada saat itu, yaitu mengambil contoh kasus perusahaan Pillsbury sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi amatan Keith. Pada waktu yang hampir bersamaan teoritisasi pemasaran disibukan oleh hasil pemikiran Levitt (1960) dengan "*Marketing Myopia*" yang mengungkap kegagalan perusahaan dalam merespon perubahan atas persyaratan customers.

Selama itu para praktisi pemasaran lebih memfokuskan pada produk yang dihasilkan dari pada pasar yang dilayani, yaitu terkait dengan tendensi untuk mendefinisikan tujuan perusahaan dan *customers needs* terlampaui sempit. Drucker (1969) juga mengungkapkan bahwa tujuan perusahaan yang paling tepat adalah menciptakan kepuasan konsumen. Karena konsumen adalah merupakan pondasi bagi perusahaan untuk

tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mendukung konsep yang diajukan Drucker, Levitt (1960) menyatakan bahwa kebutuhan pelanggan harus menjadi sentral dalam pendefinisian tujuan perusahaan, sementara pucuk pimpinan berkewajiban untuk menciptakan lingkungan, pandangan, sikap, dan aspirasi yang mendukung orientasi kepada pelanggan ini. Tahap perkembangan selanjutnya teori pemasaran memasuki masa yang disebut oleh Kotler (1972) dengan *consciousness*. Debat panjang tentang konsep marketing tidak dapat terelakkan, dalam pandangan Brown (1995) suatu masa dimana dalam teori pemasaran terjadi debat panjang itulah teori pemasaran memasuki periode modifikasi. Debat panjang ini kemudian mengharuskan para ahli pemasaran untuk mencermati kembali terhadap konsep dan filosofi pemasaran. Ketidakpuasan dan ketidaksempurnaan konsep dan teori pemasaran inilah yang kemudian memunculkan *critical marketing theory* yang awalnya dipicu adanya keraguan mereka. Tahap perkembangan berikutnya muncul upaya untuk memikirkan kembali konsep pemasaran yang memunculkan gagasan tentang paradigma baru dalam marketing yaitu apa yang disebut dengan *post-modern marketing* (Brown, 1993). Perspektif *post-modernism* dalam teori pemasaran bukan hanya menghindari dari evolusi konseptualisasi, tetapi juga mempertanyakan sejumlah generalisasi. Sikap penghindaran ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap metanarative, sehingga memunculkan keraguan. Maka keraguan atas sejumlah teori pemasaran adalah kecenderungan reaksi dari *post-modernist* atas capaian dalam pengembangan teori-teori pemasaran.

Modern marketing muncul pada saat awal abad 20. Dalam perkembangan selanjutnya kemajuan pemasaran ditunjukkan empat tahap yang dicerminkan dengan pendekatan yang di adopsi : pendekatan komoditi, pendekatan institusi, pendekatan managerial dan pendekatan keperilakuan (Natarajan, 1999). Abad 20 meski hanya beberapa tingkatan, momentum besar telah ditunjukkan oleh marketing sebagai mesin ekonomi : *large-scale retailing, chain-store, internet marketing, global market* dan sebagainya. Bidang marketing sendiri telah berkembang secara spektakuler, yaitu dengan diperkenalkannya konsep empat P (*Product, Price, Promotion dan Place*) oleh McCarthy.

IV. IMPLEMENTASI KONSEP PEMASARAN

Semenjak tahun 1960-an pendekatan profit/mikro-makro/positif maupun profit/makro-makro/normatif banyak menjadi focus bahasan untuk menjelaskan fenomena pemasaran yang terjadi di institusi bisnis maupun non-bisnis (Kotler 1972). Kajian-kajian terkait dengan mikro-makro/positif ini telah memunculkan berbagai macam konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang demikian beragam ini kemudian menjadi semacam pedoman dalam praktik bisnis sehingga berakumulasi menjadi normative atau preskriptif (profit – non profit/mikro-makro/normative).

Proses demikian terus berlanjut sehingga memunculkan semakin banyak fenomena pemasaran. Fenomena-fenomena yang ada dianalisis dan disajikan oleh para ahli pemasaran, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam memahami implementasi konsep pemasaran antara tahun 1960-1980-an.

Pada organisasi yang berorientasi pada sektor profit secara tegas menyatakan keberadaannya adalah untuk mencapai profit. Dan pada sektor profit ini banyak sekali dijumpai fenomena pemasaran. Sektor profit meliputi makro-mikro/positif dan makro-mikro normative. Keith (1960) dalam tulisannya telah mengawali pembahasan pada sector profit/mikro/positif. Keith mempercayai bahwa dalam setiap aktifitas pemasaran terpusat pada consumers. Dengan mengambil contoh kasus pada perusahaan Pillsbury, Keith (1960) menggambarkan terjadinya revolusi pemasaran di perusahaan Pillsbury yang terbagi dalam empat masa, yaitu masa: orientasi produksi, orientasi penjualan, orientasi pemasaran, dan pengendalian pemasaran (marketing control). Dalam masa orientasi produksi, pusat perhatian perusahaan adalah terkait dengan (permasalahan fungsi) produksi, bukan pemasaran. Sehingga keputusan tentang produk baru adalah dari sudut pandang produksi, bukan sudut pandang pemasaran. Pada masa ini perusahaan dapat mendapatkan *economics lot of scales* dimana semakin banyak yang diproduksi dapat menurunkan biaya yang signifikan, demikian pula akhirnya keuntungan yang akan didapatkan. Hasilnya adalah pemasaran diabaikan (Levit, 1960)

Dalam masa orientasi penjualan, perusahaan sudah mulai memandang pentingnya konsumen sebagai kunci keberhasilan perusahaan, dan juga mulai timbul kesadaran tentang peran penting saluran distribusi sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Permasalahan inti yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana produk yang dibuat perusahaan dapat dibeli konsumen, sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan *hard selling*, bukan pemasaran. Pemasaran adalah lebih kompleks dari pada sekedar penjualan dan juga bukan hanya sekedar perbedaan bahasa. Penjualan lebih dahulu melihat kebutuhan dan kepentingan penjual, sementara pemasaran terlebih dahulu melihat kebutuhan konsumennya (Levit, 1960) Dalam masa orientasi pemasaran, konsumen sudah menempati posisi inti dimana kegiatan perusahaan bermula dan berakhir dari konsumen. Perusahaan tidak menghasilkan produk apa yang dapat diproduksi, tetapi produk apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen itulah yang seharusnya dihasilkan perusahaan. Sehingga tujuan perusahaan tidak lagi menghasilkan produk, tetapi memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen baik yang riil maupun yang potensial.

Dalam masa pengendalian pemasaran (marketing control) sudah terjadi perubahan yang mendasar, dimana perusahaan tidak hanya

menggunakan konsep pemasaran, tetapi menjadi 'marketing company' dengan suatu konsekuensi bahwa pemasaran harus dan selalu terkait dengan manajemen puncak (top management)

Fullerton (1988) menyatakan apa yang dilakukan Keith dengan mengangkat kasus Pillsbury masih belum mampu menjelaskan kondisi eksternal social dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Fullerton juga mengatakan bahwa depresiasi yang besar yang terjadi pada 1930-an telah menjadikan situasi yang kurang baik bagi keberlanjutan dari era produksi. Sebab kondisi saat itu bisa menghambat para pelaku bisnis dalam menjual akibat terjadi *overproduction*. Keith dianggap telah mengabaikan fakta sejarah dimana dalam masa itu juga ada fenomena persaingan, *overproduction* dan *demand* tidak pasti. Maka jika pada masa itu tidak ada *demand stimulation* maka hal ini adalah salah, artinya upaya-upaya pemasaran yang dilakukan produsen telah diabaikan karena Keith dianggap telah mengabaikan pertumbuhan dan pasar baru.

Bagozzi (1975) dan Webster (1992) adalah penulis yang telah memaparkan fenomena yang eksis pada dimensi makro. Bagozzi (1975) melakukan kajian atas sejumlah dimensi paradigma pertukaran dengan penekanan pada apa yang menjadi pertimbangan dalam pertukaran dengan fokus *direct transfer* dan media beserta makna dari *exchange*. Menurut Bagozzi secara umum pertukaran dibagi menjadi tiga tipe : (1) secara umum pertukaran terjadi antara dua pihak, (2) pertukaran yang terjadi paling tidak dilakukan oleh tiga pihak dalam satu situasi (3) pertukaran secara *mutual relationship* dalam sebuah system dengan pelaku paling tidak ada tiga pihak. Makna dari pertukaran itu sendiri menurut Bagozzi bukan hanya sekedar transfer produk untuk mendapatkan uang. Webster (1992), berpendapat bahwa marketing sebagai objek kajian sudah dimulai sejak tahun 1910 yang dilatarbelakangi oleh sector pertanian. Pada saat itu marketing hanyalah sebagai proses social ekonomi dari aktifitas dan tanggung jawab manajerial.

Webster juga mengungkapkan bahwa tahun 1950 – 1960-an marketing manajemen mulai dipraktikkan dan di maknai sebagai proses *decision making* dan *problem solving* dengan mengandalkan kerangka analisis ekonomi, psikologi, sosiologi, dan statistic. Dalam praktik secara luas diterima sebagai fungsi bisnis dan tumbuh melampaui pendekatan tradisional sales manajemen dengan penekanan pada *product planning and development, pricing, promotion, distribution*. Pada saat itu riset pemasaran dianggap penting karena bisa membantu praktek manajemen.

Webster menungkapkan semakin besar organisasi, semakin banyak manager, analis dan planner yang tidak secara langsung terlibat dalam penciptaan penjualan product. Organisasi yang baru harus mampu merespon secara cepat dan fleksibel mengikuti perubahan teknologi, persaingan dan *preferensi customers*, dimana peran fungsional pemasaran bergeser dari lokal firm yang bergerak sepanjang kontinum, dari transaksi ke organisasi

network. Peran baru marketing harus focus pada masyarakat, proses dan organisasi. Serta mensyaratkan mengenali operasi pada tiga jenjang yang berbeda perusahaan, unit bisnis dan fungsional. serta merefleksikan dalam tiga tingkatan strategy atau tiga dimentisi strategy (*culture, strategy, tactic*). Marketer harus bisa memmanage tiga hubungan, yaitu *customers, supplier* dan *re-seller* karena ini berkaitan dengan *customer needs*.

Implementasi Profit/mikro-makro/Normatif, diwakili dengan tulisan-tulisan Ames (1970) dan Benneth and Cooper (1979), Sementara Ames (1970) menyatakan: '*marketing in indutrial world is a total business philosophy aimed at improving profit performance by identifying the needs of each key customer group and then designing and producing a product/services package that enable the company to serve selected groups more effectively than does its competition*'.

Dari definisi yang dikemukakan Ames (1970), terdapat empat dimensi pemasaran industri yaitu: meningkatkan kinerja keuntungan; penentuan kebutuhan konsumen; pemilihan pasar sasaran; dan, merancang dan menghasilkan alat pemuas kepada pasar sasaran tersebut,

Dalam kajiannya Ames (1970) marketing dalam dunia industry adalah *total business philosophy* tertuju pada peningkatan *profit performance* melalui identifikasi *customers needs*, dan kemudian mendesain dan memproduksi goods / service sehingga perusahaan mampu melayani kelompok customers terpilih dengan cara yang lebih efektif dibandingkan dengan competitor. Jadi esensi marketing lebih merupakan tanggung jawab manajemen secara umum.

Benneth and Cooper (1981) mengungkapkan profit/macro/normative dengan mengambil mencontoh terjadinya kalah persaingan dari industri automobile Amerika yang kalah bersaing dengan industri mobil dari Eropa dan Jepang. Benneth dan Cooper berpendapat bahwa kesuksesan produk diawali dari needs, dan needs tidak muncul ketika invention pada tahap product development. Pengembangan produk dilakukan oleh RD, sehingga *marketing oriented* juga ada pada RD. RD bertugas memberikan arahan untuk mengurangi resiko produk, inovasi, perubahan model dan inilah yang di sebut dengan strategi produk dalam konsep marketing.

Pada organisasi yang berorientasi pada sektor non profit keberadaannya adalah tidak semata-mata untuk memperoleh profit. Sektor non profit yang mulai tumbuh pada tahun 1960 ini juga banyak dijumpai fenomena pemasaran meskipun tidak sebanyak sector profit. Fenomena pemasaran yang terjadi pada sektor organisasi non profit pada dimensi makro dan mikro positif terdapat dalam tulisan Kotler dan Levy (1969) dan Kotler (1972). Kajian Kotler dan Levy (1969) tentang interpreatsi marketing bagi organisasi nirlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi profit. Dalam setiap organisasi product (*physical, service, person, organization*) dan idea consumers (*suppliers, clients, direktur*) dan *marketing tools* selalu menjadi

titik sentral setiap pembahasan tentang marketing. Pemasaran organisasi selalu focus pada program yang telah didesain oleh pihak manajemen guna memebrikan kepuasan kepada stakeholder.

Menurut Kotler (1969) prinsip marketing manajemen dalam organisasi non-bisnis meliputi sembilan element : *definisi generic product, definisi target group, differentiated marketing, consumer behavior analysis, differential advantage, multiple marketing tools, integrated marketing planning, continous marketing feedback dan marketing audit*. Marketing merupakan fungsi organisasi yang dapat menjaga hubungan dengan consumersnya, membaca kebutuhannya, mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan membangun hubungan komunikasi untuk menyatakan tujuan-tujuan organisasi.

Fenomena terkait non-bisnis/makro-mikro/positif adalah apa yang diungkap oleh Kotler (1972). Dalam pandangan Kotler (1972), ada tiga tahapan kesadaran pemasaran (*marketing consciousness*) yang mempengaruhi sempit luasnya konsep pemasaran. *Marketing consciousness one* (tingkat kesadaran pertama), adalah terkait dengan konsepsi bahwa pemasaran hanya terkait dengan lembaga bisnis sehingga pemasaran hanya terkait dengan penjual, pembeli, dan barang atau jasa, dimana konsep utamanya adalah terjadinya transaksi dengan inti konsep subjek bisnis dengan fokus transaksi pasar. Pokok perhatian kesadaran level pertama adalah *seller, buyer* dan *economics product*. *Marketing consciousness two* (tingkat kesadaran dua), menyatakan tidak mensyaratkan adanya pembayaran sebagai syarat terjadinya pemasaran dimana konsep pemasaran diperluas meliputi hubungan antara organisasi dengan anggotanya dengan inti konsep *organization client transaction*. Setiap organisasi menghadapi masalah terkait dengan produk yang dihasilkan dengan kelompok customernya. Untuk memecahkan masalah ini organisasi harus memahami ukuran (size) dan komposisi dari pasar, serta kebutuhan, sikap dan kebiasaan customer. Organisasi perusahaan harus mendesain produk untuk menarik target market. Pada kesadaran level dua ini marketing relevan pada semua situasi dimana marketer dapat mengidentifikasi organisasi , kelompok klien dan produk secara luas didefinisikan.

Pada fenomena non profit/makro-mikro/positif, Kotler (1972) menyatakan bahwa marketing relevan bagi semua organisasi, sepanjang organisasi itu menghasilkan produk dan mempunyai customers. Focus marketing telah mengalami pergeseran melewati *commodity focus, institutional focus, functional focus, managerial focus* dan *social focus*. Pergeseran focus terjadi akibat adanya kesadaran (*consciousness*) diantara pelaku-pelaku pemasaran. Pergeseran kesadaran dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi dari para pelaku akan menjelaskan dan membedakan batasan-batasan konsep marketing.

Houston (1986) telah melakukan suatu kajian tentang fenomena terkait dengan organisasi non-bisnis mikro-makro normative, ada dua

hal yang dapat digunakan untuk menguji mana yang masuk konsep pemasaran dan mana yang tidak masuk dalam konsep pemasaran dua hal yang diungkapkan Houston yaitu yang berkenaan dengan : (1) konsep produksi, sales dan marketing (2) statement tentang konsep pemasaran setelah dilakukan review pendapat tentang marketing concept beserta ide-ide yang melatar belakangnya.

Guna membedakan antara *production concept*, *sales concept* dan *marketing concept*, Houston menawarkan konsep alternative atas dasar perilaku seller – buyer dalam menemukan partner dalam pertukaran. *Marketing concept* ditandai oleh dimana kondisi *buyer* dan *seller* secara aktif mencari partner dalam pertukaran, sedangkan untuk *Sales concept* ditandai oleh kondisi seller yang secara aktif mencari partner dalam pertukaran. Sebaliknya untuk *Production concept* muncul dalam situasi seller hanya pasif menerima partner pertukaran.

V. IMPLIKASI MANAJERIAL

Berkaitan dengan munculnya modern marketing pada abad 20, menjadikan peranan penting pemasaran semakin berkembang. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan penyebaran teknologi merupakan salah satu penyebab diterapkannya kembali konsep pemasaran dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari konsumen dan persaingan yang semakin tajam. Sehingga para pemasar selalu dituntut untuk lebih bisa berkreasi dan inovatif dalam menjalankan perannya .

Dengan adanya perkembangan teknologi telah mengubah dunia menjadi pasar tanpa batas, dengan perkembangan teknologi, khususnya kemajuan dalam teknologi informasi, membuat konsumen menjadi lebih mudah memperoleh informasi, tentang produk yang akan dikonsumsinya, dan memudahkan proses pemilihan produk (Denison and McDonald 1995). Dan konsep strategi korporasi tidak mampu lagi mengatasi perubahan lingkungan bisnis tersebut, karena perubahan lingkungan bisnis terlalu cepat sehingga mengarah pada penerapan kembali konsep pemasaran.

Pada dasarnya pelaku bisnis telah menyadari pentingnya kepuasan pelanggan bagi kelangsungan usaha mereka. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengembangkan Program Pelayanan Konsumen dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Upaya semua itu ditempuh guna menciptakan kepuasan pelanggan.

Pemasaran digital merupakan salah satu terobosan di dunia teknologi yang bisa membantu Dunia pemasaran akan memasuki era baru pemasaran. Di saat tradisional komunikasi pemasaran mengalami penurunan efektivitasnya sebuah cara baru di dunia pemasaran mengalami perkembangan yang signifikan. Cara baru tersebut dikenal dengan

pemasaran digital. Pemasaran digital yang menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasilnya adalah era baru interaksi antara produsen, intermediari pasar, dan konsumen. Pemasaran yang berbasis pada digital akan memberikan gambaran, bagaimana proses tersebut sebagian atau seluruhnya dikombinasikan ke dalam bentuk kontak baru dengan konsumen melalui internet. Ini adalah sebuah terobosan baru untuk membangun hubungan dengan konsumen melalui media baru.

Perubahan teknologi akan berubah dari offline menjadi online, dari involuntary menjadi voluntary. Pelanggan akan secara sukarela mencari informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan. Mereka bisa memproses informasi sesuai dengan ketertarikannya. Lebih interaktif karena konsumen memiliki keterlibatan tinggi terhadap produk atau jasa.

Melalui layanan tersebut terjadi pertukaran informasi baik yang berasal dari produsen maupun konsumen. Jadi dengan digitalisasi pemasaran, informasi akan lebih murah karena mudah didapatkan sehingga akan menurunkan biaya riset, akuisisi, dan retensi. Selain itu adanya respon yang cepat dari konsumen melalui layanan di internet, perusahaan bisa dengan cepat memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Ini berarti membantu percepatan inovasi dalam perusahaan. Keunggulan media baru dibandingkan tradisional akan memberikan peluang baru bagi perkembangan dunia pemasaran.

VI. PENUTUP

Dengan terjadinya perubahan lingkungan dari setiap waktu dimana penerapan pemasaran dijalankan oleh organisasi, maka akan menghadapi suatu kesempatan dan kendala yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemikiran pemasaran kearah yang lebih luas dan maju baik dari sisi pengertian, cakupan pemasaran maupun, konsep pemasarannya. Perkembangan pengertian pemasaran yang semula lebih menitik beratkan persoalan distribusi fisik dari perusahaan bisnis kemudian berkembang sampai pada kegiatan transaksi yang sekalipun tidak melibatkan mengeluarkan uang dan juga kegiatan pemasaran ini dapat dilakukan oleh kelembagaan diluar bisnis.

Sebagai konsekuensi dari perluasan pengertian tentang pemasaran, maka cakupan dari pemasaran juga semakin luas. Menjadi 8 area cakupan, yaitu profit sector, mikro, positif; non-profit sector, mikro, positif; profit sector, mikro, normatif; non-profit sector, mikro, normatif; profit sector, makro, positif ; non-profit sector, makro, positif; profit sector, makro, normatif; dan non-profit sector, makro, normatif. Kajian-kajian terkait dengan mikro-makro/positif ini telah memunculkan berbagai macam konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang demikian beragam

ini kemudian menjadi semacam pedoman dalam praktik bisnis sehingga berakumulasi menjadi normative atau preskriptif (profit – non profit/mikro-makro/normative). Proses demikian terus berlanjut sehingga memunculkan semakin banyak fenomena pemasaran. Fenomena-fenomena yang ada dianalisis dan disajikan oleh para ahli pemasaran, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam memahami implementasi konsep pemasaran antara tahun 1960 -1980-an.

Perubahan teori telah terjadi dengan adanya alternative konsep tentang marketing diajukan oleh Fullerton (1988) dan Houston (1986). Dari segi konsep pemasaran, yang semula lebih mendudukkan perusahaan sebagai pihak pertama dan terakhir dari serangkaian kegiatan bisnis, berubah total menjadi konsumen sebagai awal dan akhir dari kegiatan perusahaan. Perkembangan peran marketing diungkapkan oleh Webster (1992) memberikan alternative terkini tentang konsep marketing yang berperan sebagai *organizational network*. Konsekuensi logisnya semua kegiatan perusahaan harus diarahkan ke konsumen, mengingat kondisi persaingan sudah semakin meningkat, akan tetapi dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus dituntut bisa melaksanakannya lebih baik dari pesaingnya agar pada akhirnya bisa memberikan kepuasan konsumen dan ini merupakan tujuan perusahaan.

Agar pemuasan konsumen dapat dilakukan secara terpadu, maka perusahaan sebaiknya menggunakan pemasaran sebagai konsep bisnis strategic yang memberikan kepuasan yang berkelanjutan, bukan sesaat, tidak hanya bagi investor/pemilik dan konsumen tetapi juga memberikan kepuasan yang berkelanjutan juga bagi para karyawannya. Dalam konsep ini perusahaan berusaha untuk memuaskan semua stakeholder nya.

Tapi realita menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku bisnis yang sadar akan pentingnya kepuasan pelanggan namun masih sedikit dari mereka yang menjalankan program pelayanan pelanggan secara baik dan benar. Program memuaskan pelanggan masih sebatas slogan dan bersifat seremonial. Mereka lebih cenderung berburu pelanggan baru dan mengabaikan pelanggan yang sudah ada. Fenomena ini dapat dilihat pada pengalokasian biaya pemasaran yang sebagian besar ditujukan untuk promosi dan hanya sebagian kecil yang ditujukan untuk mempertahankan pelanggan

Daftar Pustaka

- Ames, C., (1970) "Trappings vs Substance in 'industrial Marketing'", *Harvard Business Review*, July-Aug., pp.93-102.
- Assael, H. (1990), "Assael marketing : Principles & Strategy", *Publisher: Thomson Learning*
- Bagozzi, R., (1975) "Marketing as Exchange", *Journal of Marketing*, 39, 4, pp.32-39.
- Bennett, R. C. and R. G. Cooper (1979), "Beyond the Marketing Concept." *Business Horizons* (June): 76-83.
- Bennett, R. C. and R. G. Cooper (1981), "The Misuse of Marketing: An American Tragedy." *Business Horizons* (Nov-Dec): 51-61.
- Brown, S., (1993), "Postmodern Marketing?", *European Journal of Marketing*, 27 (4): 1 – 34
- Brown, Stephen (1995), "Life Begins at 40? Further thoughts on marketing's "mid-life crisis", *Marketing Intelligence & Planning*, 13 (1).ABI.Inform global.pg 4
- Boarden, H.N., (1964), "The Concept of the Marketing Mix" *Journal of Advertising Research*
- Drucker, P.F. (1969), "The Practice of Management", *New York : Harper & Row*
- Denison, T. and M. Mc Donald (1995). "The Role of Marketing Past, Present and Future", *Journal of Marketing Practice : Applied Marketing Science*
- Fullerton (1988), "How Modern is modern marketing ?, Marketing's evolution and the myth of the production era", *Journal of Marketing*. Vol.52.pp.108-25
- Houston, F., (1986) "The Marketing Concept: What it is and what it is not", *Journal of Marketing*, 50, 2, pp.81-87
- Hunt, S.D. (1991) *Modern Marketing Theory. Critical Issues in the Philosophy of Marketing Science*, *South Western Publishing Company*. Chapter 1.
- Keith, R. J. (1960), "The Marketing Revolution." *Journal of Marketing* 24 (January): 35 - 38.
- Kotler, P., & Levy, S.J. (1969), 'Broadening the Concept of Marketing', *Journal of Marketing*, January, pp.10-15.
- Kotler, P. (1972), "A Generic concept of Marketing." *Journal of Marketing* 36 (April): 46 – 54

- Kotler, P.(1997), "Marketing Management: Analysis, Planning, and Control".
9th Ed. London: Prentice-Hall, International.Inc
- Levitt, T.(1960), '*Marketing Myopia*', Harvard Business Review, Jul-Aug,
pp.45-63.
- Natarajan, R. and Bagozzi, R. P. (1999), "The Year 2000: Looking Back",
Psychology & Marketing 16 (8)
- Stanton, W.J.(1994), *Fundamentals of Marketing*, 10th Ed. Tokyo: Kogakusha,
McGraw-Hill Book Company
- Webster (1992), "*The changing role of marketing in the corporation*", Journal of
marketing. Vol.56. Oktober. pp.1-17

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Bambang Sugeng Dwiyanto (bsugengd@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Jemadi (jemadi08@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

ABSTRACT. *Community empowerment is an attempt to make people become empowered through learning efforts so that they are able to manage and be responsible for development programs in the community. Learning is implemented in a series of community development. The purpose of this research was to evaluate the process of community empowerment in PNPM Urban activities in terms of aspects Sastrodirjan village community development, with the goal of research is to assess the implementation of community development, assessing public attitudes and perspectives on community empowerment and assess the degree of empowerment. The approach in this research is deductive method of qualitative analysis and quantitative descriptive . Results reveal that the capacity of community development activities in the village Sastrodirjan has been implemented in accordance with the principles of empowerment and have managed to change the level of public awareness and increase understanding of the role of development in their communities. The findings obtained are changes in public awareness of the respondents did not relate to age, level of education and its role in PNPM, but having a relationship with sex, where the role and involvement of women is still low and not enough to support optimal development at the community level.*

Keywords: Empowerment, capacity, community PNPM Urban, development at the community level.

I. PENDAHULUAN.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model

pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas.

Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Wilson (2006) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan.

Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya.

Untuk pengembangan kapasitas masyarakat ini, diluncurkanlah Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan kelanjutan dari Program Penang-gulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah

untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).

Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, yang pada tataran pelaksanaan di masyarakat meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Dalam implementasinya ketiga proses tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.

Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam yang dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu derajat keberdayaan masyarakat akan sangat bervariasi meskipun proses pengembangan kapasitas yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Desa Sastrodirjan adalah salah satu desa yang menerima program pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM Mandiri Perkotaan yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2007 dan masih berjalan sampai sekarang ini. Desa Sastrodirjan merupakan salah satu lokasi yang dianggap cukup berhasil dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan karena memiliki progress yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan telah sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya maupun dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya.

Artikel yang didasarkan pada hasil penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam dan komprehensif implementasi serta tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

1. Pemberdayaan Masyarakat.

a. Pembangunan di Era Desentralisasi.

Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program dan tanggung-jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk menuju kepada usaha pembangunan partisipatif yang sebenarnya, masyarakat yang mampu untuk mengembangkan komunitasnya menuju ke arah kemajuan, maka pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang harus dilaksanakan.

b. Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat

sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat. Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
- Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
- Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu

Tahap pertama	keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
Tahap kedua	mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya.
Tahap ketiga	sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya.

Tahap keempat	upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.
Tahap kelima	mulai adanya hasil-hasil nyata peningkatan rasa memiliki yang lebih besar dan menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik.
Tahap keenam	telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya.
Tahap ketujuh	telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson (1996) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

- Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- Understanding atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
- Harnessing atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
- Using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996).

C. Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan.

Agar kita dapat melakukan analisis dan pemahaman yang tepat mengenai pemberdayaan, harus dipahami dulu kerangka konseptual mengenai lingkup dan tingkatan pemberdayaan. Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, Alshop dan Heinshon (2005) menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, sedangkan Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005) menyebutkan satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dalam aspek-aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik. Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam bidang ekonomi dan berpenghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung eksekusi pertumbuhan yang terjadi. Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya. Sementara pemberdayaan lingkungan adalah upaya yang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjalin hubungan baik dalam interaksi manusia dengan lingkungannya.

Tingkatan pemberdayaan adalah semacam batasan luasan wilayah dalam proses pemberdayaan. Alshop dan Heinshon (2005) serta Fujikake (2008) menjabarkan tingkatan pemberdayaan menjadi tiga tingkatan yaitu local level, intermediary level, dan macro level.

Maksud dari tingkatan micro atau lokal yaitu dalam batasan wilayah lingkungan sekitar masyarakat tersebut atau pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. Tingkatan meso atau intermediary meliputi wilayah kota, jaringan atau hubungan antar organisasi dan pihak eksternal lain. Tingkatan macro adalah tingkatan yang lebih luas dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

2. Pengembangan Kapasitas

a. Pengembangan Masyarakat .

Dalam pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di

masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342). Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat sehingga mampu mewartakan setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Outcome dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya.

Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang partisipatif dan transparan.

b. Elemen-elemen dalam Pengembangan Kapasitas.

Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang berkembang. Garlick dalam McGinty (2003) menyebutkan lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut:

- a. Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, mewartakan penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar
- b. Kepemimpinan
- c. Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi
- d. Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama-sama mencapai tujuan
- e. Dukungan informasi, meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat

3. Evaluasi Pemberdayaan.

Evaluasi pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman, 2007). Fetterman (2007) juga menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan adalah merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri.

Terdapat beberapa pendekatan dan model evaluasi pemberdayaan. Guijt (2000) dan Rietbergen-McCracken (1998) menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif (participatory monitoring & evaluation/PM&E). Evaluasi partisipatif berbeda dengan pendekatan evaluasi konvensional

(Riebergen- McCracken, 1998), dimana pendekatan evaluasi tradisional cenderung bersifat linear dan lebih berfungsi untuk menilai akuntabilitas manajemen dan keuangan sedangkan evaluasi partisipatif lebih bersifat open-ended dan iterative (berulang) dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan terhadap perubahan dalam kegiatan. Kritik Cousins (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman, bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi evaluasi atau bersifat praktis dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti/teorist. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip evaluasi partisipatif namun dilakukan oleh peneliti di luar komunitas itu sendiri.

a. Prinsip Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas.

Konsep evaluasi pemberdayaan yang dikemukakan Fetterman dan Wandersman (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada yang bersifat implisit. Fetterman menyampaikan 10 prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- Improvement (peningkatan)
- Community ownership (kepemilikan komunitas)
- Inclusion (inklusi)
- Democratic participation (partisipasi demokrasi)
- Social justice (keadilan sosial)
- Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas)
- Evidence-based strategies (strategi berbasis alasan)
- Capacity building (pengembangan kapasitas)
- Organizational learning (Pembelajaran organisasi)
- Accountability (akuntabilitas)

Prinsip-prinsip evaluasi tersebut di atas merupakan panduan untuk melakukan evaluasi per-bagian dari proses pemberdayaan, baik secara konseptual maupun dalam implementasinya. Untuk meneliti atau mengevaluasi kinerja pengembangan kapasitas dalam proses pemberdayaan masyarakat, UNDP (2008) memaparkan kerangka kerja/framework yang merupakan dimensi penilaian yang terdiri dari masukan (points of entry), yang berdasarkan tingkatannya (pengembangan kapasitas dalam level sistem, kelembagaan dan individu), isu utama (core issues), yang merupakan domain/ranah dalam pengembangan kapasitas yang terdiri dari penataan kelembagaan (institutional arrangement), kepemimpinan (leadership), pengetahuan (knowledge), dan akuntabilitas (accountability). Empat ranah dalam pengembangan kapasitas tersebut

merupakan acuan tetapi bisa dikembangkan lebih lanjut disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Dimensi ketiga dalam framework pengembangan kapasitas yaitu kapasitas fungsional/teknis. Kerangka kerja/ framework dalam evaluasi pengembangan kapasitas tersebut, dapat kita gunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dengan melihatnya dari sisi outcome atau hasil.

b. Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake.

Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk alat analisis yang bisa digunakan untuk mengukur derajat keberdayaan suatu masyarakat. Pendekatan analisis yang digunakan oleh Fujikake (2008) dalam mengevaluasi pemberdayaan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mencoba memahami hubungan antara tanggapan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan itu sendiri untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu. Model Fujikake ini telah dipraktikkan dalam mengevaluasi pemberdayaan perempuan di sebuah desa di Paraguay Fujikake (2008) dengan mengembangkan empat langkah dalam mengevaluasi pemberdayaan. Tahap pertama adalah melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya. Hasil dari analisis mengenai perubahan tingkat kesadaran ini dituangkan dalam grafik yang menggambarkan tingkat perubahan kesadaran yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu "sangat baik", "telah berubah", dan "tidak seperti sebelumnya".

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, dimana program PNPM Mandiri yang diselenggarakan di desa ini dinilai cukup berhasil dalam memberdayakan masyarakat berbasis pengembangan kapasitas masyarakat. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Sastrodirjan, dan sampel yang dipilih adalah masyarakat yang terlibat atau pernah terlibat atau mengikuti agenda pengembangan kapasitas dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.

Sedangkan jumlah sampel untuk kegiatan wawancara adalah menyesuaikan kondisi di lapangan, karena tujuan wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif, sehingga wawancara dapat dianggap cukup apabila telah didapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang dipilih antara lain ketua dan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) beserta unit pelaksanaannya, ketua dan pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), para relawan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, Anggota dan tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, fasilitator pendamping dan unsur aparat pemerintahan desa setempat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Di dalam analisis dan pembahasan ini dilakukan kajian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana pencapaian derajat keberdayaan masyarakat ditinjau dari proses pengembangan kapasitas masyarakat pada kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan berdasarkan data-data yang didapatkan selama penelitian dan kajian secara teoritis.

1. Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas.

a. Sosialisasi Program Pemberdayaan.

Rangkaian kegiatan sosialisasi di tingkat masyarakat dilaksanakan selama lima bulan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi awal, rembug kesiapan masyarakat, dan sosialisasi lanjutan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2007. Sosialisasi awal oleh fasilitator pendamping dilaksanakan di tingkat kelurahan dan di tingkat masyarakat basis (RT, RW, kelompok masyarakat tertentu), antara lain pertemuan rutin RT, pengajian tingkat RT, pengajian ibu-ibu, pertemuan PKK, dan pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya.

Sosialisasi awal program ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, karena masyarakat merasa senang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang pengelolaan dan pelaksanaannya akan dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Rangkaian kegiatan sosialisasi berikutnya adalah Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), yang intinya adalah menghimpun pernyataan masyarakat untuk memutuskan menerima atau menolak program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil rembug kesiapan masyarakat di Desa Sastrodirjan memutuskan untuk menerima PNPM dan menyatakan siap mengikuti siklus pemberdayaan yang dipersyaratkan oleh program. Sikap menerima program ini disamping dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk berubah dari kondisi semula menjadi lebih baik, juga dipengaruhi oleh besaran dana bantuan langsung masyarakat yang akan diterima.

Sosialisasi lanjutan adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui siklus-siklus pemberdayaan yang telah dirancang dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan di tingkat desa juga mendukung dilaksanakannya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan, karena konsep pembangunan yang akan dilaksanakan adalah berupa pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran bersama seluruh komponen masyarakat.

b. Pelaksanaan Siklus Pemberdayaan PNPM.

- Refleksi Kemiskinan

Kegiatan awal dalam siklus pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah refleksi kemiskinan. Refleksi kemiskinan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kegiatan refleksi kemiskinan ini dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan sebanyak 9 kali di tingkat basis masyarakat atau RT dan dalam pertemuan ibu-ibu PKK. Hasil dari refleksi kemiskinan di tingkat basis selanjutnya disampaikan dalam lokakarya refleksi kemiskinan tingkat desa yang diikuti oleh perwakilan dari tiap RT atau basis masyarakat untuk diambil kesepakatan bersama tentang kriteria masyarakat miskin di Desa Sastrodirjan. Indikator yang disepakati untuk mengidentifikasi kemiskinan adalah berdasarkan pekerjaan, pendapatan keluarga perbulan, pendidikan, dan kondisi rumah tinggal.

Ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas, masyarakat bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari kegiatan refleksi kemiskinan ini, mereka mendapatkan banyak cerita dan pengalaman mengenai agenda penanggulangan kemiskinan dari modul-modul yang disampaikan, serta dapat bertukar pikiran dengan fasilitator maupun sesama warga terutama dalam menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai kondisi kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi lainnya.

- Pemetaan Swadaya

Rangkaian siklus pemberdayaan yang kedua adalah pemetaan swadaya (PS). Kegiatan Pemetaan Swadaya dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat, kondisi kemiskinan, potensi yang dimiliki masyarakat serta peluang, hambatan dan ancaman yang ada dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan masalah lingkungan di desanya.

Pelaksanaan pemetaan swadaya di Desa Sastrodirjan dilakukan oleh tim PS yang berjumlah 30 orang warga Desa Sastrodirjan yang terdiri dari 16 orang laki-laki (53%) dan 14 orang perempuan (47%). Hasil Pemetaan Swadaya adalah berupa data-data kondisi umum desa, permasalahan kemiskinan di tingkat desa, potensi yang dimiliki masyarakat serta profil dan karakteristik masyarakat miskin. Dari hasil pemetaan kemiskinan didapatkan tiga komponen daftar kebutuhan masyarakat Desa Sastrodirjan, yaitu komponen yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana umum, komponen pembangunan usaha produktif, serta komponen rencana pengembangan kegiatan sosial dan peningkatan SDM.

Komponen yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana umum terdiri dari pembuatan/perbaikan saluran drainase, pengaspalan jalan, pavingisasi jalan, pembuatan bak sampah, perbaikan rumah. Komponen yang berkaitan dengan pembangunan usaha produktif yang terdiri dari bantuan modal usaha dan komponen yang berkaitan dengan rencana pengembangan kegiatan sosial dan peningkatan SDM berupa pembelian peralatan sewa alat pernikahan, pemberian santunan bagi warga miskin, jompo dan bantuan kesehatan, dan kursus-kursus keterampilan atau bantuan pendidikan.

Hasil pemetaan swadaya tahun 2007, mengidentifikasi ada sebanyak 123 KK miskin di Desa Sastrodirjan atau sejumlah 195 orang warga miskin (berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati sendiri oleh warga masyarakat, dan keikutsertaan sebagai penerima manfaat program sejenis sebelumnya (misalnya Raskin, BLT, Askeskin).

- **Pembangunan BKM**

Proses pembangunan BKM ini terdiri dari penyusunan Anggaran Dasar organisasi BKM, penyusunan panitia pembentukan BKM dan pemilihan anggota BKM. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) organisasi BKM Desa Sastrodirjan dilakukan oleh masyarakat yang direpresentasikan oleh relawan dengan dipandu fasilitator. Pada tahap penyusunan AD ini peran fasilitator cukup besar, dengan memberikan contoh-contoh dokumen yang ada dan membantu secara langsung dalam proses penyusunannya, sehingga kemandirian masyarakat dalam penyusunan Anggaran Dasar ini masih kurang. Masyarakat sepakat untuk memberikan nama organisasi BKM dengan nama BKM "SADIR JAYA", yang mengandung maksud dan cita-cita agar dalam masa mendatang Desa Sastrodirjan lebih berjaya. Keberadaan BKM juga langsung didaftarkan pada notaris untuk mendapatkan status hukum yang tetap.

Kegiatan pembangunan BKM di Desa Sastrodirjan ini sebenarnya telah dimulai pada saat pemetaan swadaya, dimana masyarakat menentukan sendiri kriteria kepemimpinan yang diharapkan dengan basis nilai-nilai dan modal sosial sesuai hasil FGD kepemimpinan. Kriteria-kriteria pemimpin yang diinginkan tersebut yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih utusan-utusannya dalam pemilihan anggota BKM. Pemilu atau pemilihan utusan di tingkat RT dilaksanakan serentak di 7 RT tanpa kampanye dan propaganda apapun, yang berhasil memilih 34 orang utusan masyarakat untuk mengikuti pemilihan anggota BKM. Ke-34 orang utusan tersebut selanjutnya saling memilih dan dipilih untuk mendapatkan 9 orang anggota BKM berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing utusan. Ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas dalam proses

pembangunan BKM ini, terdapat proses untuk mengembangkan aspek leadership, organization, political power, trust dan unity atau keselarasan.

- **Penyusunan PJM Pronangkis**

Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)

merupakan produk perencanaan jangka menengah (3 tahun) dilakukan di Desa Sastrodirjan sudah dilaksanakan menurut kaidah partisipatif, dimana terdapat 9 rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi ke warga tentang PJM Pronangkis, sosialisasi lanjutan dan pembentukan Tim PJM Pronangkis, bimbingan teknis PJM Pronangkis, lokakarya tingkat desa, penyusunan draft PJM Pronangkis, pertemuan untuk menyempurnakan PJM Pronangkis, sosialisasi dokumen dan bazar PJM Pronangkis.

Tim penyusun PJM Pronangkis Desa Sastrodirjan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki (73%) dan 4 orang perempuan (27%). Dilihat dari perspektif kesetaraan gender, maka keterwakilan perempuan sudah mencukupi, dimana dalam indikator keterwakilan perempuan yang disyaratkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan 2007 adalah sebesar 20%. Program-program yang tersusun dalam PJM Pronangkis Desa Sastrodirjan tahun 2008-2010 pun cukup banyak yang mengakomodir kepentingan perempuan, misalnya program penurunan angka kematian ibu hamil, penyuluhan KB, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.

- **Sinergi dengan Perencanaan Daerah.**

Implementasi pensinergian PJM Pronangkis Desa Sastrodirjan dengan perencanaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan Bazar PJM tingkat kecamatan yang dilaksanakan bersama-sama antara BKM se-Kecamatan Wonopringgo, pihak Pemerintah Kecamatan, Bappeda, Dinas, dan instansi-instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan bazar tersebut masing-masing BKM mensosialisasikan program-programnya serta menawarkan potensi-potensi di daerahnya sehingga dapat diketahui oleh pihak-pihak eksternal termasuk Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Implementasi lain dari sinergi program penanggulangan kemiskinan dengan perencanaan daerah adalah dengan dilaksanakannya Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) yang dilaksanakan oleh panitia kemitraan yang terdiri dari BKM, masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten, yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pengaspalan jalan Desa Sastrodirjan.

Aspek pengembangan kapasitas yang didapatkan masyarakat adalah meningkatnya akses terhadap informasi terutama dari pihak-

pihak eksternal, meningkatnya jaringan kerja (networking) sehingga dengan jaringan yang tercipta masyarakat bisa mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada serta dapat meminimalkan halangan-halangan yang selama ini dihadapi. Aspek pengembangan kapasitas yang lain adalah meningkatnya political power sehingga masyarakat melalui BKM memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan dan merencanakan pembangunan di daerahnya.

- Pelaksanaan dan Pemantauan.

Untuk melaksanakan kegiatan PNPM di Desa Sastrodirjan dari tahun 2007 sampai 2009 telah terbentuk 27 KSM yang terdiri dari 14 KSM yang mengerjakan kegiatan pembangunan lingkungan, 1 KSM kegiatan sosial dan 12 KSM simpan pinjam atau keuangan. Sesuai daftar Rencana Tahunan Pronangkis yang disusun, masing-masing KSM mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk proposal kegiatan yang selanjutnya diverifikasi dan dilakukan penilaian serta prioritas oleh BKM dibantu oleh Unit Pengelola (UP) sesuai kegiatan yang diusulkan. Setelah usulan kegiatan disetujui dan telah cukup tersedia dana, maka dilakukan pencairan dana dan kegiatan dilaksanakan. Selama pelaksanaan kegiatan, fungsi monitoring dilaksanakan oleh segenap anggota masyarakat, dan untuk kegiatan pembangunan lingkungan harus disertai papan informasi kegiatan sehingga semua elemen masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka KSM harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada BKM melalui UP, dan pada akhir tahun dilaksanakan audit kelembagaan dan keuangan terhadap BKM yang dilaksanakan oleh lembaga auditor independen, dimana untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pekalongan kegiatan auditing dilaksanakan oleh tim auditor dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan STIE Muhammadiyah Pekalongan.

- Review PJM Pronangkis .

Kegiatan review partisipatif di Desa Sastrodirjan telah dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 2008 untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2008 dan merencanakan kegiatan tahun 2009 serta review tahun 2009 untuk mengevaluasi kegiatan 2009 dan merencanakan kegiatan tahun 2010. Review dilaksanakan oleh panitia review partisipatif yang terdiri dari tim review kelembagaan, tim review program, dan tim review keuangan serta tim perumus.

Secara umum pelaksanaan siklus pemberdayaan masyarakat di Desa Sastrodirjan telah sesuai dengan ketentuan dan arahan dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan serta sesuai dengan teori siklus

pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wilson dalam Sumaryadi (2005). Dilihat dari kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan siklus partisipatif sebagaimana yang telah diajarkan kepada mereka, maka bisa dikatakan masyarakat Desa Sastrodirjan telah mampu untuk melaksanakan siklus pemberdayaan secara mandiri, namun dikaitkan dengan kondisi dan dinamika di masyarakat yang mulai kritis terhadap setiap kebijakan yang diberlakukan terhadap mereka, maka keberadaan fasilitator pendamping masih sangat diperlukan untuk mengawal berjalannya proses pemberdayaan dan memberikan masukan apabila terdapat konflik atau masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

c. Pelatihan masyarakat/coaching

Pelatihan di PNPM Mandiri Perkotaan, pada dasarnya adalah pelatihan motivasional yaitu pelatihan yang mendorong peserta untuk mempunyai paradigma dan sikap mental yang positif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Pelatihan yang dilakukan dalam PNPM secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang terkait dengan siklus dan non siklus. Pelatihan yang terkait dengan siklus diantaranya coaching refleksi kemiskinan, pelatihan dasar relawan, coaching pemetaan swadaya, coaching penyusunan PJM Pronangkis, pelatihan praturas BKM, pelatihan BKM, pelatihan dasar, pelatihan madya, pelatihan utama dan kegiatan-kegiatan pelatihan lain yang mendukung berjalannya siklus pemberdayaan. Sedangkan pelatihan yang tidak terkait langsung dengan siklus diantaranya pelatihan pembuatan media warga, pelatihan manajemen penang-gulangan bencana berbasis masyarakat, pelatihan pengembangan data dan informasi komunitas, pelatihan UPK, pelatihan UPS, pelatihan UPL, pelatihan Kades, dan pelatihan-pelatihan/OJT keterampilan teknis lainnya.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan, hampir semua jenis pelatihan yang direncanakan sesuai kurikulum PNPM telah dilaksanakan, baik yang diselenggarakan dalam lingkup desa/komunitas atau digabung dengan desa lain dalam satu cluster pendampingan atau tingkat kecamatan. Desa Sastrodirjan yang telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, maka telah masuk dalam kategori lokasi utama, dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pun disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

d. Tingkatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas

Rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang telah dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan baik yang terkait langsung dengan siklus pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan non-siklus dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam pemberdayaan. Tingkatan yang dimaksud terdiri dari tingkatan mikro

(pada level individu dan komunitas), meso (pada level organisasi atau kelembagaan), dan makro (pada level kebijakan dan sistem). Berikut merupakan bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan berdasarkan tingkatannya.

Tabel.1
Bentuk Pengembangan Kapasitas Berdasarkan Tingkat Pemberdayaan

Tingkat pemberdayaan	Bentuk pengembangan kapasitas
Mikro (individu & komunitas)	<ul style="list-style-type: none"> • coaching refleksi kemiskinan • pelatihan dasar relawan • coaching pemetaan swadaya • pelatihan /OJT keterampilan teknis lainnya
Meso (kelembagaan & organisasi)	<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan BKM (pelatihan dasar, pelatihan madya, pelatihan utama) • pelatihan UPK Pelatihan UPS pelatihan UPL • coaching penyusunan PJM Pronangkis • pelatihan Kades
Makro (kebijakan & sistem)	<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan pembuatan media warga • pelatihan manajemen penanggulangan bencana pelatihan pengembangan data dan informasi komunitas Pelatihan BKM • pelatihan dan lokakarya tematik kabupaten

Sumber : Analisis Penulis

e. Pendekatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

Upaya dan pendekatan yang dilaksanakan dalam mengembangkan kapasitas masyarakat di Desa Sastrodirjan adalah melalui pendekatan sosio kultural masyarakat setempat, serta pendekatan keagamaan. Di Desa Sastrodirjan sosok kyai atau tokoh agama masih memiliki peran dan pengaruh yang cukup kuat dalam menggerakkan masyarakat. Pendekatan tersebut cukup efektif dalam menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat, namun ditinjau dari sasaran pengembangan kapasitas masyarakat secara keseluruhan hal tersebut kurang tepat, karena apabila seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama menyampaikan suatu pendapat maka warga yang lain cenderung untuk mengikutinya. Hal tersebut dikhawatirkan justru memunculkan

pendekatan top down dalam skala komunitas atau lingkup yang lebih kecil. sehingga masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama program tidak punya cukup keberanian dalam mengemukakan aspirasinya.

Pendekatan yang lain adalah melalui pendekatan gender, selama ini peran kaum perempuan cenderung untuk berada di bawah kaum laki-laki, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar kaum perempuan juga bisa berpartisipasi secara lebih luas dalam rangka pembangunan lingkungan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya. Pendekatan gender ini dapat terlihat dari rangkaian sosialisasi dan FGD yang dilaksanakan khusus bagi kaum perempuan yang diadakan bersamaan dengan agenda pertemuan ibu-ibu PKK. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa melalui forum-forum yang dilaksanakan khusus untuk perempuan mereka bisa menyampaikan aspirasinya secara lebih terbuka, namun karena kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan masyarakat secara kolektif maka bisa jadi aspirasi perempuan yang terhimpun kurang bisa diterima dalam forum kolektif yang banyak didominasi kaum laki-laki, karena dalam kehidupan dan sistem sosial-budaya masyarakat desa posisi kaum perempuan masih kalah dibandingkan dengan laki-laki.

Dilihat dari karakteristik sosial masyarakat Desa Sastrodirjan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh industri maupun buruh bangunan dimana waktu kerjanya adalah dari pagi sampai sore hari, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk aktivitas sosial kemasyarakatan adalah pada malam hari, sehingga pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan juga rata-rata diselenggarakan pada malam hari. Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan pada malam hari biasanya dilaksanakan sehabis Isya (penyebutan istilah waktu yang lebih sering dipakai dari pada penyebutan waktu dalam format jam) atau kira-kira pukul 19.30 WIB, meskipun dalam pelaksanaannya baru dimulai acara sekitar pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB. Pelaksanaan pertemuan pada malam hari memang membawa kondisi pertemuan masyarakat lebih santai dan akrab, namun dilihat dari durasi waktu, maka waktu yang tersedia pada pertemuan di malam hari cukup terbatas, apalagi dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan keagamaan dan kegiatan lain, padahal materi-materi yang harus disampaikan kepada masyarakat cukup banyak sehingga banyak agenda-agenda yang menjadi terlewatkan.

2. Analisis Evaluasi Pemberdayaan.

a. Analisis Perubahan Kesadaran Masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat Desa Sastrodirjan terhadap masalah kemiskinan dan pembangunan di lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap anggota komunitasnya disamping didorong oleh serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang selama ini dilaksanakan juga didukung oleh basis nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam masyarakat Desa Sastrodirjan. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisannya warga dalam menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program yang dijalankan. Meskipun apabila dilihat secara lebih dekat dapat diketahui bahwa warga yang kritis hanya personil itu-itu saja yang notabene merupakan kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, namun adanya kelompok warga yang kritis bisa dijadikan sebagai pendorong dan pemacu serta sumber pembelajaran bagi anggota masyarakat yang lain untuk lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga nampak dari program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, hal ini dapat terlihat dari program pembangunan infrastruktur jalan berupa kegiatan pavingisasi dan pengaspalan yang lebih mengutamakan pemerataan untuk semua wilayah atau RT. Dilihat dari sasaran program hal ini kurang tepat karena sebenarnya kelompok sasaran utama dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seharusnya adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, sehingga prioritas dalam menentukan kegiatan seharusnya mengacu pada kegiatan yang dampaknya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung.

Motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara sukarela terlibat dan menjadi bagian dari program tanpa upah atau insentif apapun. Namun dilihat dari aspek kemandirian maka motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan terhadap berkurangnya peran fasilitator kelurahan pada tahun kedua. Sesuai dengan program dan kebijakan dari koordinator manajemen wilayah pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah fasilitator sehingga intensitas pertemuan dan interaksi antara fasilitator dengan masyarakat berkurang yang menyebabkan intensitas masyarakat untuk mengelola program juga berkurang, sehingga bisa dikatakan masyarakat masih belum cukup mandiri dan masih

memerlukan dukungan dari pihak lain untuk menjaga agar motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM MP cukup baik, disamping itu masyarakat juga menyatakan kepuasannya terhadap proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MP dirasakan dapat menumbuhkan kembali jiwa dan semangat gotong royong dalam masyarakat yang selama ini mulai berkurang sehingga disamping kepuasan terhadap hasil pembangunannya, juga proses selama pelaksanaan pembangunan tersebut.

b Analisis Elemen-elemen Pemberdayaan.

Elemen-elemen pemberdayaan yang dilaksanakan dalam kegiatan PNPM MP terdiri dari tiga hal yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dalam analisis ini ditambahkan satu elemen lagi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan politik.

- Pemberdayaan Lingkungan

Kegiatan pembangunan lingkungan dalam PNPM MP ini diorganisir oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang berada di bawah BKM. Pemberdayaan lingkungan sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari perencanaan pembangunan yang sudah terinci dalam PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan, pembentukan KSM sebagai pelaksana kegiatan, penghimpunan swadaya masyarakat, serta pelaksanaan dan monitoring kegiatan selama dan paska pembangunan. Pembangunan fisik lingkungan di Desa Sastrodirjan didukung kemudahan berupa keberadaan penambangan material bangunan berupa pasir dan batu kali yang lokasinya dekat serta keberadaan tenaga kerja yang jumlahnya cukup memadai, karena sebagian besar masyarakat memiliki keterampilan sebagai pekerja bangunan, sehingga potensi swadaya masyarakat berupa material dan tenaga kerja cukup besar. Namun potensi yang ada tersebut belum didukung upaya meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat, misalnya pelatihan teknik dan manajemen konstruksi sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien. Program-program yang disusun dalam PJM Pronangkis sudah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun sebagian besar program pembangunan yang direncanakan masih mengandalkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari

pemerintah sebagai sumber pembiayaan utama, sehingga ditinjau dari tingkat kemandirian bisa dikatakan kemandirian masyarakat masih kurang.

- **Pemberdayaan Sosial.**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dalam PNPM MP di Desa Sastrodirjan termasuk sangat kurang dimana dari rencana-rencana kegiatan yang telah diprogramkan hampir semua belum terlaksana, karena dana kegiatan yang sedianya digunakan untuk kegiatan sosial dialihkan sementara untuk membantu penyediaan jaringan air bersih bagi masyarakat. Rencana-rencana kegiatan sosial yang disusun antara lain pelatihan kerajinan batu, pelatihan pembuatan besi kolom, penyewaan layos/alat-alat pesta pernikahan, khitanan massal, penyuluhan penanggulangan narkoba, penyuluhan kesehatan ibu hamil, penyuluhan KB, pengasapan (fogging) untuk pemberantasan penyakit demam berdarah, penyediaan pupuk untuk petani, pelayanan pengobatan gratis, pendirian program paket B dan C, kursus komputer, beasiswa bagi anak kurang mampu, dan pendirian perpustakaan desa.

Dari keluaran proses perencanaan berupa program yang tersusun, pemberdayaan sosial di Desa Sastrodirjan cukup baik karena sebagian besar benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil pemetaan swadaya sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya memuat secara lebih detail skenario dan strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario yang dimaksud adalah sebagai panduan dalam melakukan prioritas dan acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial sehingga sasaran yang direncanakan benar-benar dapat tercapai.

Aspek pengembangan kapasitas lain dalam pemberdayaan sosial yang lebih utama adalah terprogram dan berkelanjutan dan dalam PNPM MP telah dikonsepsikan terciptanya proses belajar bersama tersebut dalam satu wadah yaitu Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Melalui komunitas tersebut, masing-masing anggota masyarakat dapat saling belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing.

Kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah terlaksana dalam PNPM MP di Desa Sastrodirjan sebagian besar adalah kegiatan yang diprogramkan oleh fasilitator pendamping dan bersifat general serta dilaksanakan di semua desa/kelurahan, sedangkan kegiatan pembelajaran yang murni muncul dari inisiatif masyarakat belum ada, meskipun dari dokumen perencanaan dapat dilihat agenda-agenda pelatihan atau pembelajaran masyarakat cukup banyak. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunitas belajar kelurahan (KBK)

di Desa Sastrodirjan belum efektif dalam memberikan pembelajaran bagi semua anggota komunitasnya.

- **Pemberdayaan Ekonomi.**

Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dimaksud berupa pengelolaan dana pinjaman bergulir dan pembinaan usaha yang secara kelembagaan dikelola oleh unit pengelola keuangan (UPK) yang berada di bawah koordinasi BKM. Peminjaman dana bergulir harus dilakukan melalui mekanisme KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau kelompok kecil masyarakat yang terdiri dari 10 orang untuk mengajukan peminjaman dana secara berkelompok. Proposal pengajuan dana yang diajukan KSM baru dapat direalisasikan setelah dilakukan diverifikasi oleh UPK dan disetujui oleh BKM.

Kegiatan perguliran dana pinjaman di Desa Sastrodirjan termasuk dalam kategori yang bagus dimana dari hasil review keuangan yang dilaksanakan pada akhir tahun kedua (tahun 2009) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kejadian kredit macet (non performing loan) sangat kecil dan perolehan bunga pinjaman yang dikelola menunjukkan hasil yang cukup besar, dimana dari aset awal sebesar 60 juta rupiah dalam setengah tahun perguliran telah berhasil terkumpul bunga pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Namun kondisi pengelolaan perguliran dana pinjaman di Desa Sastrodirjan yang cukup baik saat ini belum didukung oleh pembinaan usaha yang optimal. Masyarakat yang mengajukan pinjaman terbatas pada besaran dana pinjaman yaitu sebesar Rp. 500.000,- dan hampir semua anggota KSM meminjam sejumlah tersebut.

Dilihat dari aspek pengembangan kapasitas, maka bisa dikatakan kondisi masyarakat yang ada sekarang belum banyak mengalami peningkatan kemandirian dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Sasaran dari pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya adalah meningkatnya kapasitas masyarakat untuk mengakses peluang-peluang dan mengelola sumber daya perekonomian yang tersedia, melalui pemberian stimulus dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan, maka masyarakat dapat dikatakan berdaya secara ekonomi ketika mereka mampu menjalankan roda perekonomian dalam komunitasnya secara baik, efektif dan efisien. Kondisi semacam itu belum nampak dalam komunitas masyarakat di Desa Sastrodirjan karena keberadaan stimulus dana yang ada belum dibarengi dengan pembinaan usaha secara terpadu.

- **Pemberdayaan Politik**

Pemberdayaan politik sebenarnya bukan merupakan salah satu

komponen tersendiri dalam pemberdayaan masyarakat PNPM MP, namun secara implisit hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam aspek pengembangan kapasitas. Ranah pemberdayaan politik yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perpolitikan negara, terlibat dalam partai politik tertentu maupun politik yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala daerah. Ranah pemberdayaan politik.

V. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil analisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakikat program pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa elemen utama dari pemberdayaan adalah pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Rangkaian pengembangan kapasitas dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan di Desa Sastrodirjan telah dijalankan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural yaitu dengan memperhatikan aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.
2. Evaluasi pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui kajian evaluatif terhadap proses maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses pemberdayaan masyarakat di Desa Sastrodirjan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang ditentukan dalam PNPM Mandiri Perkotaan maupun dengan literatur-literatur mengenai pemberdayaan masyarakat. Sedangkan temuan evaluatif terhadap hasil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah berjalan selama 3 tahun telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat dan meningkatkan pemahamannya untuk turut serta berperan dalam pembangunan di komunitasnya, namun untuk mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi secara tidak langsung juga mendorong terlaksananya pemberdayaan politik, dimana melalui rangkaian pengembangan kapasitas, masyarakat bisa belajar banyak mengenai kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen komunitas sehingga menjadikan mereka memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pembangunan dan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan pihak lain di luar komunitasnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, et al, 2005, *The Principle of Empowerment Evaluation, Empowerment Evaluation: Principles in Practice*, New York: The Guilford Press
- Adams, Robert, 2003, *Social Work and Empowerment*, New York: Palgrave Macmillan
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adler, Patricia A dan Adler, Peter, 2009, *Teknik-teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Bartle, Phil, 2007, *Elements of Community Strength*, <http://www.scn.org/mpfc/modules/mea-elin.htm#Measuring>, diunduh pada 4 Nopember 2009.
- BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan. 2008. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2007*, KAJEN : BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan.
- BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan. 2008. *Kecamatan Wonopringgo Dalam Angka 2007*, KAJEN : BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan.
- Cousins, J. Bradley, 2005, *Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up: A Critical Friend Perspective*, *Empowerment Evaluation: Principles in Practice*, New York: The Guilford Press
- Depdiknas, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008a, *Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008*
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008b, *Review Partisipatif: Modul Khusus Fasilitator (F24) Pelatihan Madya I*
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow*, *American Journal of Evaluation* 2007; 28; 179
- Fontana, Andrea dan Frey, James H, 2009, *Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan, Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company
- Fujikake, Yoko, 2008, *Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment*, *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 - 37, Japan Evaluation Society

- Guijt, Irene, 2000, *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation*, Canada: ITDG Publishing.
- Gulo, W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Huberman, A Michael dan Miles, Matthew B, 2009, *Manajemen Data dan Metode Analisis, Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- James, Valentine Udoh, 1998, *Capacity Building in Developing Countries: Human and Environmental Dimensions*, London: Praeger Publishers
- Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cetakan kedelapan, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Lichfield, Nathaniel, 2005, *Community Impact Evaluation*, London: UCL Press
- Mayo, Marjorie, 2000, *Cultures, Communities, Identities: cultural strategies for participation and empowerment*, New York: Palgrave Macmillan
- McGinty, Sue, 2003, *The literature and theories behind community capacity building*, In: *Sharing Success: an Indigenous perspective*. VIC, Australia:Common Ground Publishing, pp. 65-93.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Miller, Delbert C, 1977, *Handbook of Research Design and Social Measurement*, New York: Longman Inc.
- Kerlinger, Fred N, 2006, *Asas-asas penelitian behavioral*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Patton,Carl V dan Sawicki, David S, 1986, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, New Jersey: Prentice Hall
- Patton, Michael Quinn, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif (How to Use Qualitative Methods in Evaluation)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Potts, David dkk, 2003, *Development Planning and Poverty Reduction*, New York: Palgrave Macmillan
- Riduwan, 2009, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Rietbergen-McCracken, Jennifer, dan Narayan, Deepa, 1998, *Participation and Social Assessment: Tools and Techniques*, Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank

- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, Penerbit Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul, 2008, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ukaga, Okechukwu and Maser, Chris, 2004, *Evaluating Sustainable Development: Giving People A Voice In Their Destiny*, Virginia: Stylus Publishing
- UNDP, 2002, *Handbook on Monitoring and Evaluating for Result*, New York: United Nation Development Programme
- UNDP, 2008, *Capacity Development Practice Notes*, New York: United Nation Development Programme
- UNDP, 2009, *Capacity Development: A UNDP Primer*, New York: United Nation Development Programme
- UNDP, 2010, *Capacity is Development: Stories of Institution*, New York: United Nation Development Programme Wandersman.
- Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment Mannual*, London: Grower Publishing Co

Perempuan dan Pembangunan Sektor Pertanian

Tutuk Ari Arsanti (Tutuk.arsanti@staff.uksw.edu)

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW

ABSTRACT. *The importance of providing capacity women farmer in the agricultural sector bring a great impact on the development of the Indonesia's agricultural sector. This articles written to give a description of how the role of women in the development of the agricultural sector. A qualitative approach trough a method of participation action reseacrh used to obtain the image and problem solving faced. It will provide understanding in more well of potential for development agriculture in various line including potential for development entrepreneurship based agriculture by women. This research result indicates that the woman's role in efforts to improve the development of the agricultural sector through the development of entrepreneurial-based agriculture is very high. The importance of increasing the capacity of peasant women in the agricultural sector to be very needed in order to the development of agriculture especially for smal-medium scale of farming.*

Keyword: Agricultural Sector, Women Farmer, Entrepreneurship

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang masih mendominasi perekonomian Indonesia (Statistik Koperasi, 2005). Sektor pertanian selama ini masih memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia sehingga perhatian dan pengembangan sektor pertanian sudah semestinya dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas. Peran tersebut semakin nampak dari kemampuan sektor pertanian dalam berkontribusi terhadap pendapatan Indonesia, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja (BPS). Potensi sektor pertanian yang sangat besar tersebut dalam kenyataannya belum diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai untuk mencapai produktivitas sektor pertanian yang lebih tinggi. Persoalan klasik yang dihadapi pada sektor ini nyatanya masih senantiasa menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian Indonesia kedepan. Secara makro sejumlah persoalan yang senantiasa dijumpai antara lain menurunnya kualitas dan kuantitas lahan pertanian, rendahnya teknologi pertanian tepat guna, NTP yang rendah dan kesejahteraan keluarga petani yang rendah memberikan gambaran akan sejumlah aspek kunci yang perlu dikembangkan dalam sektor pertanian seperti aspek

SDM, kelembagaan dan produk pertanian. Pengembangan aspek-aspek kunci dalam sektor pertanian tentunya akan membawa dampak yang besar terhadap optimalisasi sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Pengembangan aspek SDM dalam sektor pertanian menjadi kunci dalam pembangunan sektor pertanian dalam jangka panjang. Data Bappenas (2006) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM pertanian seiring dengan rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian. Kondisi tersebut membawa dampak lebih luas pada kemampuan sektor pertanian untuk mengembangkan berbagai inovasi yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Kemampuan untuk berinovasi seharusnya menjadi dasar yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan usaha (Freel & Harrison, 2006) serta dalam pertumbuhan ekonomi (Huggins, 2001; Bougrain & Haudeville, 2002). Melalui peningkatan kapasitas para petani dalam mengelola pasca panen dan berinovasi untuk mengolah produk turunan pertanian dapat memberikan peluang usaha di bidang pertanian yang pada akhirnya dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan mengingat gambaran sektor pertanian Indonesia masih jauh dari daya saing yang tinggi dan melekatnya gambaran kemiskinan dalam sektor pertanian menjadikan ancaman dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia dalam jangka panjang.

Peningkatan kapasitas perempuan sebagai bagian penting dari SDM sektor pertanian masih belum banyak tergarap dengan optimal. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses informasi sebagai sarana akuisisi pengetahuan para petani masih belum banyak melibatkan kaum perempuan di dalamnya. Budaya lokal yang menempatkan perempuan sebagai "konco wingking" menjadi hambatan tersendiri dalam penyebarluasan informasi dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan oleh petani perempuan pada sektor tersebut. Disadari bahwa peran perempuan dalam pertanian sangat besar pada kenyataannya, sebagian besar aktivitas pertanian senantiasa melibatkan perempuan didalamnya mulai dari penyiapan bibit, penanaman dan perawatan bahkan sampai pada masa panen perempuan mempunyai peran yang besar didalamnya. Dengan demikian peningkatan kapasitas petani perempuan dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia menjadi sangat strategis. Peningkatan kapasitas petani perempuan sangat dibutuhkan mengingat sektor pertanian mempunyai daya serap terhadap tenaga kerja informal yang sangat tinggi dan dapat diisi oleh para petani perempuan. Dalam hal inilah peran perempuan dalam pembangunan sektor pertanian dan perekonomian Indonesia menjadi sangat penting.

II. KERANGKA TEORI

1. Perempuan dalam Sektor Pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas merupakan antisipasi kesiapan membangun masyarakat berbasis pengetahuan dan menjadi prasyarat keunggulan bersaing pada abad 21 (Setiarso, 2007). Lebih lanjut, *human development report* (2006) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara R & D dengan pendapatan perkapita suatu negara, artinya bahwa dibutuhkan investasi di bidang SDM dalam setiap pembangunan perekonomian suatu negara. Peningkatan kualitas SDM tentunya menjadi pondasi penting dalam rangka pembangunan di segala bidang termasuk dalam pembangunan sektor pertanian. Peningkatan produktivitas melalui kemampuan berinovasi pada sektor pertanian terletak pada kapasitas yang dimiliki oleh SDM pada sektor pertanian. Kementerian Pertanian dalam liputannya di sebuah media nasional (2014) memperkirakan ada sekitar 50% perempuan Indonesia yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari 23 juta kepala keluarga petani, sebagian besar dari mereka adalah perempuan, isteri atau ibu yang juga terlibat. Jumlah perempuan itu sendiri sebanyak 49,66 % (118 juta lebih), hampir separuh dari jumlah penduduk nasional 237,6 juta, atau hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki 50,34% (119 juta lebih). Dengan demikian Petani perempuan atau petani perempuan menjadi sumberdaya potensial yang perlu dikembangkan lebih lanjut pada sektor pertanian Indonesia.

Mengingat sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang mendominasi dalam perekonomian Indonesia (Statistik Koperasi, 2005) dan besarnya keterlibatan perempuan pada sektor tersebut, maka pembangunan sektor pertanian tidak dapat terlepas dengan pembangunan petani perempuan pada sektor ini. Pengembangan sektor pertanian dalam berbagai lini merupakan salah satu langkah strategis dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat petani khususnya. Dalam hal ini, termasuk didalamnya penciptaan peluang usaha pertanian dan segala hal yang mampu menunjang pembangunan secara berkelanjutan melalui kegiatan produktif yang berguna bagi perkembangan sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang terhubung dalam sistem pertanian secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pembangunan sektor pertanian akan mampu mendorong perkembangan ekonomi secara merata di seluruh aspek bidang pertanian.

Rendahnya kualitas SDM yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang rendah (Bappenas, 2006) dan kemampuan akses informasi pertanian yang minim menjadi tantangan yang besar dalam upaya pembangunan sektor pertanian Indonesia. Minimnya kesempatan bagi petani perempuan pada skala kecil-menengah untuk mengakses informasi dan rendahnya pendidikan yang dimiliki menjadi persoalan dalam meningkatkan kemampuan berinovasi guna mengatasi persoalan yang dihadapi. Berbagai

persoalan klasik yang senantiasa dihadapi masih menjadi tantangan yang besar bagi pembangunan sektor pertanian yang terus berlangsung seperti siklus tahunan yang tidak bisa dihindari. Menurut Hubeis (1993) pelaksanaan pembangunan pertanian akan berhasil jika semua sumberdaya manusia didalamnya baik laki-laki maupun perempuan tergarap dengan baik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sekitar 78% dari seluruh penduduk perempuan Indonesia yang tinggal dipedesaan dan lebih dari setengahnya memperoleh nafkah hidup dari sektor pertanian. Dengan dasar inilah peningkatan kapasitas petani perempuan khususnya dalam rangka pembangunan sektor pertanian menjadi sangat dibutuhkan.

Banyak aspek dalam sektor pertanian masih perlu dibenahi. Pembangunan petani perempuan di dalam sektor pertanian dapat menjadi pondasi yang kuat dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Rendahnya kemampuan berinovasi sebagai motor penggerak perkembangan pertanian Indonesia pada berbagai lini juga tidak lepas dari persoalan kapasitas petani perempuan di dalamnya yang masih rendah. Hal tersebut nampak dari berbagai potensi pada sektor pertanian yang belum tergarap seperti peran petani perempuan dalam pemanfaatan pekarangan rumah yang bisa dioptimalkan untuk kebutuhan rumah tangga bahkan sampai pada perannya dalam pengelolaan pasca panen melalui inovasi yang menghasilkan produk-produk turunan pertanian yang bernilai jual lebih tinggi. Dalam hal ini, program pemberdayaan petani perempuan menjadi sangat strategis guna meningkatkan kapasitas petani perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia. Melalui peningkatan kapasitas inilah akan meningkatkan kemampuan petani perempuan untuk berinovasi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

2. Perempuan dan Potensi Kewirausahaan pada Sektor Pertanian

Sektor pertanian Indonesia didominasi oleh pertanian skala kecil-menengah yang biasanya identik dengan petani miskin. Kemiskinan dicirikan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Quibria dan Srinivasan, 1993; Sofwani, 1998; dan Tjiptoherijanto, 1998), rendahnya penguasaan aset produktif seperti lahan pertanian (Otsuka, 1993), dan rendahnya aksesibilitas anggota masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan peluang-peluang ekonomi (Siamwalla, 1993). Dengan demikian sudah semestinya pembangunan pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat petani.

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam sektor kerja informal. Kondisi tersebut menjadi sangat dipahami mengingat peran

perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja membutuhkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya demi mewujudkan keseimbangan perannya. Tuntutan ekonomi rumah tangga yang mendesak seringkali menjadi salah satu alasan perempuan terjun dalam dunia kerja khususnya bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Sektor pertanian dalam kenyataannya menyediakan kesempatan kerja informal yang memberikan kesempatan kepada petani perempuan di pedesaan untuk terlibat didalamnya. Melihat kondisi ini tentunya membutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan kapasitas petani perempuan dalam sektor pertanian sehingga dapat mendorong kemampuan menciptakan berbagai peluang usaha sebagai upaya pembangunan pertanian diberbagai lini yang ada.

Sektor pertanian mempunyai potensi kewirausahaan yang sangat besar, hal ini didukung oleh berlimpahkan sumberdaya seperti SDM dan komoditas yang ada pada sektor pertanian. Berbagai potensi lokal tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Tidak hanya potensi yang dimiliki untuk mengembangkan wirausaha berbasis pertanian, lebih lanjut pengembangan usaha pertanian dibutuhkan guna menjaga daya tarik khususnya bagi para petani usia produktif untuk menggarap sektor ini. Sejumlah penelitian sebelumnya menemukan bahwa telah terjadi pergeseran lahan tani setiap tahunnya menjadi pemukiman (Yustika, 2008) dan berpotensi terjadinya pergeseran profesi dari petani menjadi non petani khususnya bagi petani usia produktif pada sektor ini. Kondisi tersebut jika tidak segera diatasi tentu dapat menghasilkan persoalan baru di masa yang akan datang khususnya dalam ketersediaan tenaga kerja petani yang produktif dan potensi kerawanan pangan yang semakin mengancam Indonesia. Perlunya pengembangan kewirausahaan berbasis pertanian pada sektor tersebut menjadi sangat dibutuhkan mengingat potensinya yang dimiliki dan kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian Indonesia.

Zakaria menjelaskan bahwa bagian terbesar rumah tangga Indonesia, khususnya di pedesaan kehidupan mereka masih tergantung pada sektor pertanian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada dasarnya petani berlahan sempit menghadapi permasalahan yaitu tingkat pendapatan yang rendah dan tidak stabilnya pendapatan itu sendiri. Dengan pemahaman tersebut, butuh upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga petani dengan meningkatkan kapasitas petani perempuan khususnya dalam menciptakan peluang usaha di bidang pertanian melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang mengarah pada pengembangan IPTEK yang dapat memberikan dorongan terhadap kewirausahaan di bidang pertanian. Binswanger dan Braun (1991) menjelaskan bahwa adanya perubahan teknologi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat petani berpenghasilan rendah.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif melalui metode *participation action research* digunakan dalam penelitian ini, dimana para peserta dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi setiap persoalan yang muncul untuk kemudian hasilnya digunakan sebagai informasi dalam mengembangkan program bersama untuk penyelesaian masalah. FGD dilakukan sebagai salah satu sarana untuk mengidentifikasi persoalan dan pencarian solusi secara bersama. Program aksi dirancang secara bersama dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat petani melalui kegiatan produktif. Dengan demikian setiap program aksi yang dirancang senantiasa diikuti dengan penelitian untuk persoalan yang dihadapi lebih mendalam terhadap persoalan yang dijumpai. Diharapkan melalui pemahaman masalah yang dihadapi maka rancangan program dapat membantu mengatasi persoalan masyarakat petani kecil.

Perancangan program lebih memberikan penekanan pada mengembangkan lifeskill dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Dengan demikian program dirancang untuk memberikan pengalaman praktis bagi para peserta pelatihan. Melalui program tersebut para peserta dapat memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan wirausaha tani bersama dengan menggunakan potensi lokal yang dimiliki.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kapasitas Petani Perempuan dalam Pembangunan Sektor Pertanian

Hasil kajian yang dilakukan pada para petani perempuan di salah satu desa di wilayah Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam aktivitas pertanian sangatlah besar. Mulai dari pekerjaan berat seperti menyiapkan lahan, "nyipuk" atau pembibitan, menanam di lahan, perawatan tanaman sampai dengan masa panen perempuan nyatanya mempunyai peran yang sangat besar. Kegiatan tersebut dilakukan secara periodik di sela-sela peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai bagian dalam anggota masyarakat. Sebagian besar petani perempuan di desa tidak terjun dalam jenis pekerjaan formal tetapi lebih terlibat dalam pekerjaan informal seperti bertani atau menjadi buruh tani pada musim-musim tertentu. Seperti contohnya banyak perempuan di wilayah ini bekerja sebagai buruh di tetangganya untuk membantu mengolah daun tembakau pada saat musim tembakau. Hal ini dilakukan secara bergilir dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun demikian pekerjaan sambilan sebagai buruh tani tidak dapat diperoleh setiap waktu. Sebagian besar waktu petani perempuan digunakan untuk mengurus rumah, ternak dan ladang bagi mereka mempunyai lahan dan ternak sendiri. Bagi petani

yang tidak mempunyai lahan sendiri sebagian besar waktu digunakan untuk mengurus persoalan domestik saja kecuali ada kesempatan menjadi buruh tani pada musim-musim tertentu atau mengurus ternak orang lain untuk bagi hasil yang seringkali disebut “nggadoh”. Lebih dari 80% petani perempuan pada wilayah ini tidak mengenyam pendidikan yang tinggi yaitu rata-rata SD dan maksimal SMP. Tingkat pendidikan yang rendah dan akses informasi yang minim dari para petani perempuan menempatkan mereka pada posisi yang tidak terlalu banyak pilihan untuk terlibat pada sektor formal maupun mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas diri .

Himpitan kebutuhan ekonomi rumah tangga disikapi dengan kesabaran dan kepasrahan terhadap kondisi yang dialami yaitu dengan mencukupkan dengan yang ada atau bahkan berhutang untuk menutup kebutuhan sehari-hari menjadi fenome yang biasa dilakukan. Minimnya penguasaan IPTEK dari para petani perempuan dan rendahnya kemampuan dalam mengakses berbagai informasi berdampak pada rendahnya kapasitas petani perempuan untuk mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga. Pentingnya untuk meningkatkan kapasitas petani perempuan menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka membantu meningkatkan life-skill mereka khususnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Pendidikan yang memberi penekanan pada life-skill dinilai lebih efektif bagi peningkatan kapasitas petani perempuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kecil-menengah.

Dalam kajian yang dilakukan baik melalui diskusi mendalam dan observasi pada petani perempuan di wilayah pengamatan, menunjukkan bahwa kemampuan dan kesempatan untuk mengakuisisi pengetahuan dan teknologi oleh petani perempuan masih rendah. Kondisi tersebut nampak pada minimnya IPTEK yang dapat digunakan untuk menghasilkan inovasi produk pertanian dengan nilai yang lebih tinggi. Lebih lanjut, kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan para petani perempuan untuk mengolah pasca panen hasil pertanian mereka menjadi berbagai produk turunan pertanian yang nantinya dapat meghasilkan peluang usaha untuk membantu mengatasi persoalan ekonomi rumah tangga yang dihadapi. Secara umum hasil pertanian berupa sayuran selama ini hanya disetorkan ke tengkulak dengan nilai ekonomisnya yang rendah. Kondisi ini semakin nampak ketika panen raya terjadi dimana komoditas tertentu hampir-hampir tidak mempunyai nilai jual yang bersaing. Sebagai contohnya pada saat musim panen sayur wortel atau tomat, maka komoditas ini hanya mencapai 250 rupiah per kilo. Kondisi ini berlangsung secara terus menerus dan menjadi siklus yang senantiasa terjadi pada saat panen raya. Dalam kondisi tersebut pendekatan yang seringkali digunakan oleh petani kecil adalah dengan memanfaatkan komoditas yang berlimpah untuk dijadikan bahan pakan tambahan bagi ternak mereka. Fenomena tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan untuk berinovasi khususnya dalam mengolah pasca panen masih sangat rendah. Potensi yang besar dalam menghasilkan berbagai produk turunan dari komoditas pertanian masih belum banyak diketahui oleh petani perempuan. Lebih lanjut, pengetahuan yang minim tersebut menyebabkan kemampuan untuk melihat peluang usaha dan berinovasi terhadap komoditas pertanian yang dihasilkan juga sangat rendah .

Selain persoalan pengetahuan, persoalan ketrampilan yang dimiliki oleh petani perempuan juga sangat rendah atau tidak memadai khususnya untuk mengolah produk-produk turunan pertanian sebagai bagian dalam pengelolaan pasca panen. Kondisi tersebut menyebabkan petani perempuan tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam membuat atau mengolah produk-produk turunan pertanian. Fenomena umum yang dijumpai menunjukkan bahwa petani perempuan menggunakan hasil pertanian untuk dijual ke tengkulak atau untuk kebutuhan pangan keluarga bahkan pada saat komoditas terlalu berlimpah hasil tani diberikan kepada ternak sebagai pakan tambahan. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian selama ini belum dapat dimiliki oleh petani perempuan. Minimnya kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan petani perempuan melalui pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan pasca panen menyebabkan rendahnya ketrampilan yang dimiliki para petani perempuan dalam menghasilkan produk-produk turunan .

Penguasaan atas pengetahuan dan teknologi dapat menjadi pondasi munculnya berbagai inovasi yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian. Meskipun demikian, pengembangan sikap kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Budaya lokal mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan sikap kewirausahaan. Adanya pandangan bahwa perempuan sebagai “konco wingking” menempatkan posisi perempuan lebih banyak terlibat pada urusan domestik dan meminimalkan perannya dalam memperkuat perekonomian rumah tangga keluarga petani. Kondisi ini tentunya berdampak dalam upaya pengembangan diri dan pembentukan jiwa kewirausahaan yang dimiliki petani perempuan. Gambaran aktivitas petani perempuan di wilayah pengamatan selama ini lebih banyak digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian suami dan mengurus persoalan domestik rumah tangga . Kondisi ini tentunya tidak dapat mengoptimalkan potensi yang besar yang dimiliki petani perempuan dalam sektor pertanian. Minimnya kesempatan yang dimiliki oleh petani perempuan untuk mengembangkan kapasitas diri mempunyai dampak yang besar dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan para petani perempuan dan perannya dalam perkembangan sektor pertanian. Pengembangan sikap mental petani perempuan dalam mengembangkan

jiwa kewirausahaan antara lain seperti dibutuhkannya sikap disiplin yang tinggi, motivasi yang besar untuk belajar dan berkembang, keberanian untuk mengambil peluang yang ada serta sikap mental pantang menyerah. Namun demikian fenomena yang dijumpai menunjukkan bahwa sikap yang dibutuhkan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para petani perempuan masih butuh dikembangkan dengan optimal. Lebih lanjut rendahnya kreativitas yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan dan dibutuhkan dari seorang wirausaha belum dimiliki. Fenomena yang sering dijumpai salah satunya adalah bagaimana mengatasi persoalan panen raya melalui kreativitas petani perempuan dalam menghasilkan produk-produk turunan pertanian yang masih rendah.

Minimnya kapasitas petani perempuan dalam sektor pertanian lebih lanjut berdampak pada lemahnya aspek kelembagaan yang ada. Kondisi tersebut menjadi kendala yang besar dalam perkembangan wirausaha berbasis pertanian di Indonesia. Keterlibatan yang tinggi petani perempuan dalam organisasi kecil yang dikembangkan di wilayah kajian nyatanya belum diimbangi dengan kemampuan petani perempuan untuk mengelola dan mengembangkan kapasitas bersama. Keterlibatan petani perempuan dalam kelembagaan yang ada nampak ketika petani perempuan terlibat di banyak organisasi kecil yang dikembangkan seperti tabungan "lawuhan", tabungan "saparan" dan sejenisnya. Hampir disetiap minggu petani perempuan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut dan mengembangkan aturan yang disepakati bersama. Namun demikian, adanya potensi dari aspek kelembagaan yang ada nyatanya belum diimbangi dengan kemampuan mengelola dengan baik. Dari organisasi kecil yang dikembangkan, aktivitas utama lebih diarahkan pada kegiatan simpan pinjam untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk perayaan hari saparan dan sejenisnya dan belum mengarah pada kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan bersama.

2. Pengembangan Kapasitas Petani Perempuan Secara Bersama melalui Wirausaha Tani Berbasis Kelompok

Kapasitas petani perempuan sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas petani perempuan secara bersama. Pemahaman akan arti penting membangun kebersamaan melalui kegiatan produktif yang diwadahi dalam kerangka organisasi relatif masih rendah. Sebagai contohnya kegiatan tabungan saparan digunakan sebatas untuk kegiatan simpan-pinjam baik untuk menutup kebutuhan sehari-hari atau untuk mempersiapkan perayaan saparan yang membutuhkan banyak biaya untuk pengadaan berbagai lauk pauk dan jajanan. Adanya potensi dari keterlibatan petani perempuan dalam organisasi, komoditas yang dihasilkan dan budaya lokal yang mendukung belum sepenuhnya ditangkap sebagai

peluang usaha berbasis pertanian. Kondisi ini menjadi gambaran umum yang dapat dijumpai di sektor pertanian. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya berorganisasi untuk membangun kapasitas dan kekuatan bersama menyebabkan organisasi yang sudah ada belum mampu diarahkan dan dikembangkan menjadi kelompok usaha tani bersama.

Berbagai program yang dikembangkan untuk dapat meningkatkan kapasitas petani perempuan dan penguatan kelembagaan masih minim didapatkan bagi para petani perempuan di wilayah pengamatan. Kondisi ini lebih lanjut berdampak pada banyaknya potensi lokal yang belum tergarap dengan optimal. Berbagai komoditas yang dihasilkan belum dapat diolah guna mendukung perekonomian dan kesejahteraan keluarga petani kecil-menengah. Sejumlah komoditas sayuran seperti cabe, tomat, ketela, dan sayuran hijau lain dihasilkan dan disetorkan kepada tengkulak baik yang difasilitasi oleh penduduk sekitar ataupun dari luar. Rendahnya kapasitas petani perempuan menjadi kendala dalam meningkatkan nilai jual atas komoditas yang dihasilkan. Kondisi inilah yang berkontribusi pada munculnya persoalan panen raya yang belum bisa teratasi dengan baik dan menjadi persoalan klasik pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil kajian di wilayah pengamatan, ketela merupakan salah satu jenis tanaman yang selalu ditanam sepanjang musim di wilayah pengamatan, penanaman ketela dilakukan selain untuk mengisi kekosongan lahan, penanaman ketela juga biasanya dimanfaatkan untuk makanan sampingan bagi ternak sapi mereka. Dengan demikian tanaman ketela merupakan salah satu komoditas yang dimiliki karena hampir sepanjang musim selalu dapat diperoleh ketela tanpa kesulitan. Selain modal yang rendah dalam menanam ketela untuk perawatannya juga relatif mudah. Namun demikian, komoditas ketela yang dimiliki selama ini masih belum diolah dengan optimal. Berbagai inovasi yang ada untuk mengolah ketela menjadi berbagai produk turunan seperti wingko ataupun jajanan kecil dari ketela masih belum bisa dihasilkan. Demikian halnya untuk komoditas lain seperti cabe yang dapat diolah lebih lanjut menjadi abon cabe atau cabe kering, tomat menjadi kurma tomat dan saos tomat, sayuran hijau menjadi nugget sayur, ataupun produk turunan lain atas komoditas lokal yang dimiliki. Berbagai inovasi untuk menghasilkan produk turunan tentunya membutuhkan kapasitas petani perempuan yang lebih memadai melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang mendukung kewirausahaan dalam rangka pembangunan sektor pertanian. Adanya tradisi lokal seperti saparan memberikan peluang tersendiri bagi petani perempuan melalui pengembangan wirausaha tani bersama untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang bernilai jual lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas petani perempuan menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan wirausaha tani berbasis kelompok.

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Peningkatan kapasitas petani perempuan melalui pendidikan informal yang lebih diarahkan pada peningkatan life-skill menjadi kebutuhan khususnya untuk meningkatkan peran petani perempuan dalam pembangunan sektor pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan akses dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan berbasis kelompok tani melalui pembuatan produk turunan pertanian dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi para petani perempuan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas para petani kecil khususnya petani perempuan dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi. Program peningkatan life-skill ini dirancang untuk dapat meningkatkan kemampuan mengatasi persoalan yang dihadapi petani perempuan. Melalui peningkatan akses ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah banyak dikembangkan dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan untuk berinovasi.

Program pelatihan dan pendampingan dapat memberikan penekanan pada pembentukan sikap dan mental untuk membangun wirausaha di bidang pertanian. Pengembangan sikap disiplin, pantang menyerah, keinginan untuk belajar dan kesabaran yang tinggi dalam merintis usaha baru menjadi modal yang kuat untuk keberlangsungan sebuah usaha bersama. Selain peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola pasca panen melalui pembuatan produk turunan pertanian, para petani perempuan juga dibekali dengan kemampuan dalam mengembangkan wirausaha tani bersama. Hal ini dilakukan agar para petani perempuan dapat mengembangkan kapasitas bersama melalui berorganisasi dalam rangka merintis usaha tani bersama. Selama ini para perempuan sudah terlibat dalam berbagai kegiatan keorganisasian tetapi sebagian besar belum memberi dorongan atau arahan pada kegiatan produktif bersama untuk peningkatan kesejahteraan bersama.

Berbagai pelatihan dan pendampingan yang mengarah pada peningkatan life-skill petani perempuan di pedesaan tentunya dapat menjadi model pemberdayaan yang baik bagi kelompok-kelompok tani khususnya bagi para petani perempuan skala kecil-menengah dalam meningkatkan kapasitas mereka dan peran mereka dalam perekonomian keluarga petani. Mengingat secara makro gambaran petani di Indonesia adalah tidak jauh dari potret kemiskinan sehingga melalui program ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia kedepan.

Daftar Pustaka

- Bougrain, F and Haudeville, B. 2002. Innovation, collaboration and SMEs internal research capacities, *Research Policy* 31, 735-748
- Danse, Myrtille & Sietze Vellema, Sietze. 2007. Small-scale Farmer Access to International Agri-food Chains A BOP-Based Reflection on the Need for Socially Embedded Innovation in the Coffee and Flower Sector <http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail.kmod?productid=2568>.
- Freel, Marks S and Harrison, Richard T. 2006. Innovation and Cooperation in the Small Firm Sector: Evidence from 'Northern Britain'. *Regional Studies*, vol 40.4.
- Huggins, R. 2001. Inter-Firm network policies and firm performance: evaluating the impact of initiatives in the United Kingdom. *Research Policy* 30, 443-458.
- Kasryno, F. dan A. Suryana. 1992. "Long Term Planning for Agricultural Development Related to Poverty Alleviation in Rural Areas". Dalam: Pasandaran, E. et al. (ed). *Poverty Alleviation With Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia Proceeding of National Seminar and Workshop*. Bogor, January 7th-10th, 1992. pp. 60-76.
- Laine Mikko O.J & Laine, Antti V.O. Open innovation, Intellectual Capital and Different Knowledge Source. Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital is the property of Academic Conferences, Ltd.
- Laderman, Daniel and Saenz, Laura. Innovation and Development around the World 1960-2000. *Research Policy Working Paper 3774*, November 2005
- Lu, Shu-Ling dan Sexton, Martin. 2006 Innovation in Small Construction Knowledge-Intensive Profession Service Firm: A Case Study of an Architectural Practice. *Construction Management and Economics*. Vol 24, p 1269-1282.
- Lukman M Baga. 2005. Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani untuk Revitalisasi Pertanian 1. MITI. Jakarta.
- Ningsih, Diah Ayu. 2009. <http://diahayuningsih.wordpress.com/>
- Rahman, Taufiqur M. 2013. <http://m.bisnis.com/industri/read/20131205/99/190760/nilai-tukar-petani-cenderung-stagnan>.
- Romano, Claudio A. 1990. Identifying Factors Which Influence Product Innovation: A Case Study Approach. *Journal of Management Studies*.

- Sikhondze, Wilson B. 1999. The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland, *Journal: Adult Education and Development* No. 53/1999, Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn: 112/DVV.
- Sulaiman, V Rasheed; Thummuru, Laxmi; Hall, Andy and Dijkman, Jeroen. 2011. Tacit Knowledge and Innovation Capacity: Evidence from the Indian Livestock Sector. *Knowledge Management for Development Journal* Vol. 7, No. 1, May 2011, 32-44.
- Sumaryanto. 2002. "Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaharuan Agraria". Paper. Puslitbang Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian.
- Suradisastra, Kedi. 2006. *Pemanfaatan Lembaga Untuk Pembangunan Sektor Pertanian Mendukung Otonomi Daerah*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Setiarso, Bambang. 2003. Pendekatan "Knowledge-Base Economy" untuk Pengembangan Masyarakat. *Komunitas eLearning IlmuKomputer.com*

MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA PADA HUBUNGAN ANTARA PROGRAM JAMSOSTEK DAN KINERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA DI DIY DAN SOLO

Eny Sulistyowati (sulistyowatieny@yahoo.com)

Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Totok Danangdjojo

Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

ABSTRACT. *This study aims to explain the influence of the Social Security program on performance and job satisfaction and job stress as a mediating variable . In addition , this study also describes the effect of job satisfaction on the performance and the effect of work stress on performance .The relationship of each variable in this research is to be measured by conducting a survey on 145 employees of private companies that included in Social Security program on DIY and Solo . Then the path analisis used to test the effect of social security program performance in mediation by job satisfaction , performance and job stress , job satisfaction , and examines the effect on the performance and the effect of work stress on performance. The results showed that the social security program significant positively affects job satisfaction and performance . Job satisfaction was also positively and significantly affect performance. .Even though mediating role of job satisfaction in the relationship between social security program performance partial. Because merely direct relationship between social security program with greater performance than the mediating role of job satisfaction . Social Security program did not significantly affect the stress of work , as well as job stress did not significantly affect performance . Therefore, the mediating role of work stress on the relationship between social security program with the performance did not occur . Individual differences and work experience may be a factor that causes no significant relationship between the two variables .*

Keywords : Social Security Program - Job Satisfaction - Performance - Work Stress

1. PENDAHULUAN

Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh setiap manusia termasuk juga para karyawan atau pekerja. Karena dengan keamanan yang terjamin maka akan membuat pekerja menjadi tenang dalam melakukan pekerjaannya sehingga bisa meningkatkan produktifitas pekerja tersebut. Kebutuhan rasa aman yang diperlukan oleh karyawan sesuai dengan program pemerintah melalui UU RI Nomer 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian. Dengan mengikuti program tersebut karyawan tidak akan khawatir lagi kalau terjadi musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya, sehingga bisa bekerja dengan baik. Tujuan orang bekerja secara individu adalah untuk memperoleh status sosial, peluang untuk pengembangan pribadi, integrasi, serta memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan termasuk di dalamnya kebutuhan rasa aman.(Gallie, 2002).

Keadaan riil pada dunia kerja tidak selalu sejalan seperti yang dibayangkan oleh para pekerja. Para pekerja dihadapkan pada berbagai macam persoalan, seperti ketika tuntutan pekerjaan yang tidak konsisten dengan sumber daya yang ada, ketidakcocokan terhadap rekan kerja, lingkungan kerja yang tidak nyaman, stres terhadap rotasi waktu kerja (shiftwork) , rasa tidak nyaman ketika terkena musibah (sakit alami, kecelakaan,dll). Sehingga hal-hal tersebut dapat menimbulkan stres kerja bagi individu yang bekerja (Akinboye dan Adeyemo,2002). Menurut Robbin (2002), stress merupakan kondisi dinamis dimana seseorang individu dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan atau tuntutan yang tidak sesuai dengan harapan dari hasil yang ingin individu capai dalam kondisi penting dan tidak menentu.

Dengan demikian diasumsikan bahwa pekerja mungkin mengalami stres kerja yang dapat menyebabkan kepuasan kerja rendah (Faragher and Cooper, 2001). Salah satu masalah pokok dalam Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagaimana mencari cara yang terbaik untuk mencapai kepuasan karyawan. Kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu perusahaan.

Beberapa penelitian telah mencoba untuk menentukan hubungan antara stres kerja dan kepuasan kerja. Menurut Stamps dan Predmonte (1986), kepuasan kerja telah ditemukan hubungan yang signifikan dengan stres kerja. Dalam studi lain, Vinokur-Kaplan (1991) menyatakan faktor stres kerja berhubungan negatif dengan kepuasan kerja. Flectcher dan Payne (1980) mengidentifikasi bahwa kurangnya kepuasan kerja

dapat menjadi sumber stres. Sementara kepuasan kerja yang tinggi dapat mengurangi dampak stres kerja.

Ahsan et al., (2009) melakukan penelitian tentang stres kerja terhadap kepuasan kerja antara karyawan universitas di Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja. Hubungan dengan orang lain, work overload, dan konflik dengan keluarga merupakan empat faktor stres yang saling berhubungan.

Kepuasan merupakan hal yang bersifat individual, setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Karena itu, tolak ukur yang mutlak dalam mengukur tingkat kepuasan tidak ada (Hasibuan, 2003). Mengukur tingkat kepuasan karyawan bisa dengan mengetahui perasaan karyawan terhadap aspek-aspek dalam pekerjaannya. Karena hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai kepuasan hidup serta mencapai kepuasan kerja di lingkungan kerja yang optimal (Arifin,1999)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua dan meninggal dunia. (UU RI No. 3 Tahun 1992)

Stres kerja adalah pernyataan emosional dan reaksi psikologi yang muncul ketika memberi respon pada stressor (Greenberg dan Baron, 2003). Stressor merupakan kondisi yang menyebabkan individu mengalami stres yang pada umumnya ditandai dengan kondisi atau situasi yang secara potensial membahayakan atau mengancam individu.

Dalam lingkungan sumber stres dibedakan menjadi dua, yaitu stressor terkait pekerjaan dan stressor tidak terkait dengan pekerjaan (McShane dan Von Glinow, 2003)

Stressor yang terkait dengan pekerjaan meliputi hal . Pertama, lingkungan kerja. Pencahayaan ruang kerja dan kenyamanan merupakan faktor=fakyor yang mempengaruhi stres karyawan oleh karenanya perlu diperhatikan. Kedua stres peran. Stres ini muncul ketika karyawan mengalami kesulitan dalam memahami dan menajalankan berbagai peran dalam hidupnya

Konsep kepuasan kerja telah dikenal sejak karya perdana Hoppock (1995). Yang mana kepuasan kerja berkaitan dengan berbagai bidang yang menjadi perhatian perusahaan-perusahaan seperti perputaran karyawan , produktifitas, absensi, dan komitmen (Locke,1997 ; Mottaz, 1985). Pada bentuk pengukuran yang paling dasar, kepuasan kerja dapat dianggap sebagai respon tunggal untuk pertanyaan mengenai kepuasan dengan pekerjaan secara keseluruhan.

Menurut Robbins (2003), kepuasan kerja diartikan sebagai sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya tersebut.

Faktor yang terkait terhadap berkurangnya kepuasan kerja yaitu : kelebihan beban kerja, perbedaan tujuan , kelelahan emosional , gangguan mental dan fisik , kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan (Burke, 1998; Burke dan Greengluss,1994), stres kerja yang tinggi (Boey,1998), serta kepuasan hidup individu .

Davis dan Newstrom (1985) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisi kesehatan kemampuan, pendidikan. Kepuasan kerja dengan efek lainnya seperti kesehatan fisik-mental, kemampuan mempelajari pekerjaan baru dan kecelakaan dalam bekerja. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya mendukung dan sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak mendukung, pegawai akan merasa tidak puas.

Menurut teori pemenuhan kebutuhan kepuasan kerja karyawan ditentukan oleh adanya pemenuhan terhadap kebutuhannya. Karyawan akan merasa puas jika kebutuhannya dapat terpenuhi, begitu pula sebaliknya karyawan akan merasa tidak puas apabila kebutuhan mereka tidak dapat terpenuhi (Mangkumanegara, 2002).

Menurut Kuswadi (2004), kebutuhan-kebutuhan karyawan berdasarkan hasil dari banyak penelitian selama ini, dapat dikategorikan menjadi banyak kelompok, antara lain: gaji dan pendapatan, variasi pekerjaan, keamanan kerja, merasa dihargai, merasa dipercaya, pengakuan prestasi kerja, hak libur, kesempatan promosi, penghargaan dari perusahaan, pelatihan, jaminan pensiun, kerjasama dengan sesama karyawan, komunikasi dengan pimpinan atas, jumlah jam kerja, bantuan perusahaan atau pembayaran pada waktu sakit, serta hak untuk mendapat kesempatan yang sama, komunikasi antar bagian dalam perusahaan, perusahaan mengetahui apa yang diharapkan dari karyawan, penilaian lokasi kantor dari rumah , penilaian kondisi fisik tempat bekerja, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, keamanan pribadi, kemudahan dalam mencapai

fasilitas kerja, parkir kendaraan, etika atasan, kebijakan dilarang merokok dan K3 (keselamatan, keamanan, dan kesehatan).

Kinerja merupakan konstruk penting yang secara luas digunakan pada teori dan penelitian dalam ilmu psikologi industri, organisasi keperilakuan, dan manajemen sumber daya manusia. Berbagai jenis definisi kinerja telah banyak dikembangkan. Kreitner dan Kinicki (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja yang dicapai individu berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan organisasi.

Kinerja karyawan sangat ditentukan banyak hal. Gellalty dan Irving (2001) menyatakan otonomi sebagai faktor penentu tinggi rendahnya kinerja karyawan. Grrenberg dan Baron (2006) menyatakan peran pemimpin, sistem penghargaan dan hukuman, kepuasan kerja, dukungan sosial dan rekan kerja menjadi faktor yang menentukan kinerja karyawan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kepuasan Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian merupakan jaminan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada para pekerjanya terutama pekerja swasta. Karena pekerja swasta tidak secara otomatis menjadi peserta Astek yang mendapatkan jaminan biaya jika mengalami musibah sakit, kecelakaan, melahirkan ataupun meninggal dunia serta pensiun seperti halnya pegawai negeri. Sehingga dengan diikutsertakan pegawai swasta ke dalam program jamsostek akan merasa tenang dalam bekerja karena tidak memikirkan hal-hal yang mengawatirkan.

Hipotesis 1 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja berpengaruh positif pada kepuasan kerja.

2.2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Stres Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian merupakan jaminan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada para pekerjanya terutama pekerja swasta. Karena pekerja swasta tidak secara otomatis menjadi peserta Astek yang mendapatkan jaminan biaya jika mengalami musibah sakit, kecelakaan, melahirkan ataupun meninggal dunia serta pensiun seperti halnya pegawai negeri. Dengan diikutsertakan dalam program Jamsostek maka para pekerja akan berkurang pikiran-pikiran atau tekanan dalam batin akibat musibah yang menimpa, sehingga dapat mengurangi stres kerja akibat kekawatiran yang berlebih terhadap musibah yang menimpa.

Hipotesis 2 : Jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh negatif pada stres kerja

2.3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kinerja

Dengan disertakan dalam program jamsostek oleh perusahaan, maka karyawan bisa bekerja dengan baik dan cenderung produktif. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut yang dipikirkan pada jam kerja hanyalah bekerja tidak lagi perlu memikirkan biaya yang harus ditanggung jika musibah menimpanya, sehingga kinerja mereka cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki atau diikutsertakan dalam program jamsostek.

Hipotesis 3 : Jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh positif pada kinerja.

2.4. Kepuasan Kerja dan Kinerja

Pola hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja setidaknya terdapat tiga hubungan antara keduanya (Gibson, et al. 2004). 1). Kepuasan kerja mempengaruhi kinerja (pekerja yang puas akan memiliki kinerja yang baik). 2). Kinerja mempengaruhi kepuasan kerja (karyawan yang produktif dan memiliki kinerja yang baik akan memperoleh kepuasan yang tinggi). 3). Kepuasan kerja dan kinerja memiliki hubungan timbal balik. Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 4 : Kepuasan Kerja berpengaruh positif pada kinerja

2.5. Stres Kerja dan Kinerja

Stres kerja memiliki peranan penting dalam membentuk dan mempengaruhi sikap karyawan , seperti komitmen organisasional, kepuasan kerja dan kinerja. Stres juga dapat mengarah pada penyakit fisik, seperti depresi, serangan jantung, sakit kepala. Ada juga sumber stres khusus yang muncul di setiap jenis pekerjaan/ Kurang kendali akan tugas dan beban kerja yang berlebih juga bisa menimbulkan stres bagi pekerja. Semakin tinggi tingkat stres yang dialami karyawan maka akan semakin rendah kinerja karyawan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

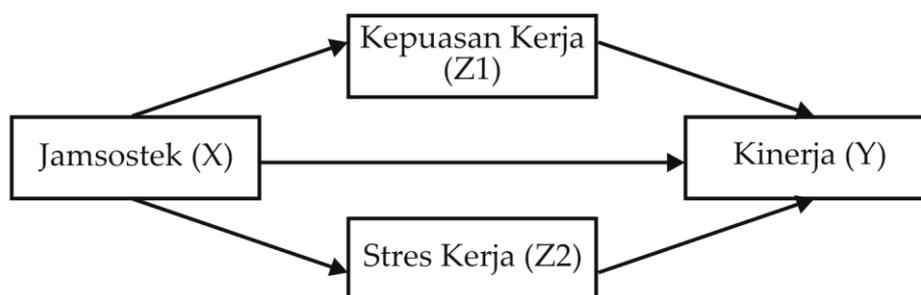
Hipotesis 5 : Stres kerja berpengaruh negatif pada kinerja

2.6. Mediasi Kepuasan Kerja dan Stres Kerja pada Hubungan Antara Kebutuhan Rasa Aman dan Kinerja

Dari berbagai penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja bisa memediasi hubungan antara adanya jaminan sosial tenaga kerja dan kinerja. Sedangkan stres kerja yang dialami karyawan dapat memediasi hubungan antara adanya jaminan sosial tenaga kerja dan kinerja.

Hipotesis 6 : Kepuasan kerja memediasi hubungan antara adanya jaminan sosial tenaga kerja dengan kinerja.

Hipotesis 7 : Stres kerja memediasi hubungan antara adanya jaminan sosial tenaga kerja dengan kinerja.



Gambar 1. Model Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Penelitian melalui survey dengan menyebarkan kuesioner kepada responden karyawan dari perusahaan swasta yang diikutkan pada Program JAMSOSTEK yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian di wilayah Yogyakarta dan Solo. Dari 145 kuesioner yang bisa diolah tersebut, 49 kuesioner berasal dari karyawan perusahaan swasta di wilayah Yogyakarta dan 96 karyawan perusahaan swasta di wilayah Solo. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status pernikahan, dan lama bekerja di perusahaan tersebut.

3.2. Karakteristik Responden

Secara umum, mayoritas responden adalah pria 111 orang (76,6 %), usia mayoritas responden 21 – 30 tahun sebanyak 62 orang (42,8 %). Tingkat pendidikan mayoritas responden adalah SMA sebanyak 119 orang (82,1%), status pernikahan responden mayoritas menikah sebanyak 115 orang (79,3%), masa kerja responden mayoritas adalah 2 – 5 tahun sebanyak 125 orang (86,2 %).

3.3 Statistik Deskriptif dan Korelasi antar Konstruk

Analisis dilakukan terhadap 20 butir pertanyaan yang telah memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut (Valid dan Reliabel). Pengolahan statistik deskriptif meliputi rata-rata (mean), standar deviasi dan korelasi. Hasil deskriptif statistik dan korelasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Data

Variabel	Koefisien Korelasi			
	JS	KK	K	SK
Jamsostek (JS)	1	0,171(**)	0,349(**)	0,038
Kepuasan Kerja (KK)		1	0,468(**)	0,192(*)
Kinerja (K)			1	0,274
Stres Kerja (SK)				1
Mean	5,9431	5,5276	5,5017	3,2453
Stdandard Deviation	0,45998	0,78346	0,85923	1,53610
Minimum	4.00	3.00	3.75	1.00
Maximum	7.00	7.00	7.00	6.00

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Sumber : Output SPSS 13.00 Statistik Deskriptif & Koefisien Korelasi
(Lampiran-4)

Dari hasil pengolahan data (tabel 1) menunjukkan bahwa nilai rata-rata Jamsostek adalah 5,9431 dan standar deviasi 0,45998. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kenyamanan dalam bekerja yang tinggi karena terjamin oleh kepesertaanya di Jamsostek dengan variasi jawabannya rendah. Rata-rata jawaban untuk kepuasan kerja adalah 5,5276 dengan standar deviasi 0,78346. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dengan variasi jawaban tinggi. Rata-rata jawaban responden untuk kinerja sebesar 5,5017 dengan standar deviasi sebesar 0,85923. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kinerja yang tinggi dengan variasi jawaban yang tinggi. Rata-rata jawaban responden terhadap stress kerja sebesar 3,2453 dengan standar deviasi sebesar 1,53610. Hal ini mengindikasikan bahwa responden tidak memiliki persepsi adanya stress dalam bekerja atau memiliki tingkat stress yang rendah dengan tingkat variasi jawaban yang sangat tinggi.

Korelasi antara Jamsostek dan kepuasan kerja sebesar 0,171 signifikan (signifikan pada level $\alpha=0.05$). Sedangkan korelasi antara Jamsostek dan Kinerja menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,349 (signifikasi pada level $\alpha=0,01$). . Korelasi antara Kepuasan Kerja dengan kinerja signifikan sebesar 0,468 (signifikasi pada level $\alpha=0,01$) dan korelasi antara kinerja dan stress kerja sebesar 0,274 signifikan (signifikan pada level $\alpha=0,01$). Dari konstruk yang ada terdapat konstruk yang memiliki nilai korelasi dengan

tingkat signifikansi yang tinggi diantara konstruk yang lain yaitu korelasi antara kepuasan kerja dan kinerja sebesar 0,468. Sementara terdapat juga konstruk yang tidak memiliki korelasi yaitu antara Stress Kerja dengan Jamsostek. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan rasa aman yang diberikan kepada karyawan tidak mempengaruhi stress kerja karyawan.

IV. HASIL PENGUJIAN PATH ANALYSIS

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis (Analisis Jalur) dengan Metode OLS (Ordinary Last Square).

Hasil dari analisis jalur Regresi Linier Model Jalur dengan metode OLS (Ordinary Least Square) berdasarkan persamaan dari model yang telah disusun seperti terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Model Jalur Metode OLS

Variable	Kepuasan Kerja			Stress Kerja			Kinerja		
	B	t	P	B	T	P	β	t	P
Jamsostek	0,17 1	2,5 72	0,0 40	0,03 8	0,452	0,65 2	0,27 7	3,951	0,000
Kepuasan Kerja							0,38 4	5,390	0,000
Stress Kerja							0,19 0	2,698	0,006
R ²	0,029			0,001			0,329		
Adjusted R ²	0,022			-0,006			0,314		
F	4,266			0,205			23,000		

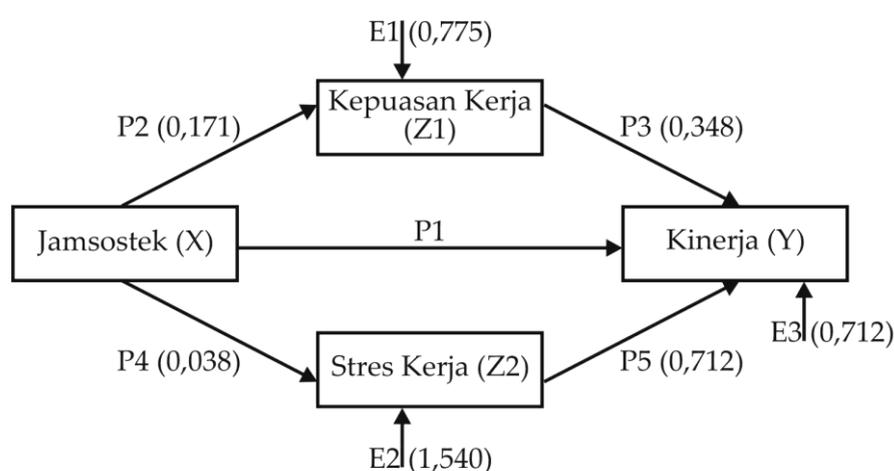
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer SPSS for window release 13.00 pada tabel 2 di atas, diperoleh nilai standardized beta Jamsostek pada persamaan (1) sebesar 0,171 dan signifikan pada 0,040 yang berarti Jamsostek mempengaruhi Kepuasan Kerja. Nilai koefisien standardized 0,171 merupakan nilai path atau jalur p2. Dengan demikian berarti hipotesis 1 terbukti. Pada persamaan (2) nilai standardized beta Jamsostek menunjukkan 0,038 dan signifikan pada 0,652, yang berarti Jamsostek mempunyai pengaruh positif pada stress kerja. Nilai koefisien standardized beta 0,038 merupakan nilai path atau jalur p4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke 2 tidak terbukti.

Dari hasil SPSS persamaan regresi (3) diperoleh nilai standardized beta Jamsostek sebesar 0,277 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai standardized beta Kepuasan Kerja 0,348 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai standardized beta Sters Kerja 0,190 dengan signifikan sebesar 0,006. Hal ini berarti terdapat hubungan antara Jamsostek dengan Kinerja secara langsung, artinya hipotesis 3 terbukti. Sedangkan untuk Kepuasan Kerja memiliki hubungan langsung dengan Kinerja, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 terbukti. Nilai standardized beta Jamsostek 0,277 merupakan nilai jalur path p1 dan nilai standardized beta Kepuasan Kerja 0,348 merupakan nilai jalur path p3. Sedangkan stress kerja memiliki tingkat signifikan 0,190. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara stress kerja dengan kinerja secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 tidak terbukti. Nilai standardized beta stress kerja sebesar 0,190 merupakan nilai jalur path p5.

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Jamsostek dapat berpengaruh langsung terhadap Kinerja dan juga bisa berpengaruh tidak langsung yaitu dari Jamsostek ke Kepuasan Kerja (sebagai varabel mediating) kemudian ke Kinerja. Besaran pengaruh langsung adalah 0,277, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan cara mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,171 \times 0,384) = 0,066$. Karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari pada koefisien hubungan tidak langsung maka sebetulnya bisa dikatakan bahwa hubungan yang terjadi merupakan hubungan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 6 tidak terbukti.

Jamsostek dari hasil perhitungan tidak memiliki hubungan dengan stress kerja. Dengan demikian otomatis stres kerja tidak dapat memediasi hubungan antara Jamsostek dengan Kinerja. Hal ini berarti bahwa hipotesis 7 tidak terbukti.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat digambarkan model jalur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Gambar Analisis Jalur

V. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Program Jamsostek dan Kinerja, dimana kepuasan kerja dan stress kerja sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini dilakukan pada 14 orang karyawan perusahaan swasta peserta Program Jamsostek di wilayah Yogyakarta dan wilayah Solo. Hasil pengujian dengan menggunakan Path Analisis menunjukkan bahwa ada tiga hipotesis yang terbukti yaitu H1, H3 dan H4 dan empat hipotesis yang tidak terbukti yaitu H2, H5, H6 dan H7.

Hipotesis 1 terbukti bahwa Jamsostek berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Program Jamsostek yang diberikan kepada karyawan swasta di perusahaan akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Orang yang merasa aman dan tidak ada kekhawatiran jika terjadi musibah baik pada diri sendiri dan keluarga terbukti akan memberikan kepuasan kerja pada dirinya. Hal ini disebabkan perhatian perusahaan terhadap keamanan karyawan.

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa Program Jamsostek berpengaruh positif pada kinerja karyawan. Karyawan yang terjamin keamanannya (tidak ada kekhawatiran jika terjadi musibah baik terhadap dirinya maupun keluarganya) akan bisa bekerja dengan tenang yang berujung pada konsentrasi pekerjaan dan berakibat kinerjanya meningkat.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif pada kinerja. Karyawan dari perusahaan swasta yang merasa puas tentu akan mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin dan akan meningkatkan kinerjanya.

Dalam penelitian ini hipotesis 2 yang menyatakan Jamsostek berpengaruh negatif terhadap stress kerja tidak terbukti. Ketidak konsistenan hasil dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu disebabkan beberapa hal. Stress dipengaruhi oleh banyak faktor. **Pertama**, Stress dipengaruhi oleh karakteristik individu. Karyawan perusahaan mungkin menghadapi sumber stress yang sama namun memiliki tingkat stress yang berbeda. Hal ini terjadi karena perbedaan individu. Situasi yang sama mungkin dipersepsikan secara berbeda oleh individu yang berbeda. Setiap individu juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatasi situasi yang dianggap sebagai ancaman (Greenberg dan Baron, 2003). Perbedaan-perbedaan ini mungkin menjadi penyebab tidak signifikannya hubungan jamsostek dengan stress kerja karyawan.

Kedua, pengalaman kerja menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat stress karyawan dalam bekerja. Pengalaman kerja membentuk kepercayaan diri karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan menghadapi stressor.

Ketiga, perbedaan persepsi mengenai stress. Persepsi individu mengenai stress adalah hasil evaluasi kognitifnya mengenai kondisi yang dihadapinya (Greenberg dan Baron, 2003). Rasa aman dalam bekerja

membentuk faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku karyawan . Dengan diikutkan dalam program Jamsostek, maka individu lebih mampu mengatasi kekawatiran akan terjadi musibah yang dihadapi dalam menjalankan pekerjaan. Hal ini mengubah persepsi karyawan mengenai stress. Karyawan tidak lagi mempersepsikan stressor sebagai ancaman dalam pekerjaan melainkan sebagai sesuatu yang membangun. Perubahan persepsi ini mungkin menjadi penyebab tidak signifikannya peran mediasi stress kerja pada hubungan jamsostek dengan kinerja (hipotesis 7).

Hasil hipotesis 4 menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif pada kinerja. Karyawan yang puas akan mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin dan akan meningkatkan kinerja. Hasil ini mendukung pola pertama dari tiga kemungkinan pola hubungan kepuasan kerja dengan kinerja., yaitu karyawan yang puas adalah karyawan yang efektif dan bekinerja baik. Temuan ini juga mendukung penelitian engko (2006) dan hasil meta analisis yang dilakukan Petty et al. (1984) yang menemukan bahwa pola hubungan pertama (kepuasan mempengaruhi kinerja) adalah hubungan yang lebih konsisten. Namun hasil penelitian ini kepuasan kerja tidak memediasi hubungan antara Jamsostek dengan kinerja (hipotesis 6). Hal ini terjadi karena antara Jamsostek dengan kinerja memiliki hubungan langsung yang lebih besar. Artinya bahwa tanpa individu merasa puas terhadap pekerjaannya, Jamsostek sudah mampu mempengaruhi kinerja bagi karyawan tersebut.

Stress kerja memiliki peranan dalam membentuk dan mempengaruhi sikap karyawan, seperti komitmen organisasional, kepuasan kerja dan kinerja (Sager, 1994). Oleh karena itu, dalam penelitian ini stress kerja diduga mempengaruhi kinerja (hipotesis 5). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stress kerja tidak berpengaruh pada kinerja karyawan secara negatif tetapi berpengaruh secara positif. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Spector (1986) mengenai stress dan kinerja. Ketidak konsistenan hasil ini mendukung hasil meta analisis Lepine et al. (2005) mengenai hubungan stress dan kinerja Lepine et al.(2005) menyatakan ketidak konsistenan hubungan stress dan kinerja terjadi karena pada kenyataannya stress kerja terdiri dari stress positif dan negatif. Stress positif (challenge stress) merupakan stress yang memberikan pengaruh positif karena menawarkan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan diri. Stress negative (hindrance stress) merupakan stress yang memberikan pengaruh negative karena menghambat perkembangan dan tujuan pribadi. Oleh karena itu, Lepine et al. (2005) menyarankan agar dalam penelitian tiap jenis stress diperlakukan dan diukur secara berbeda. Dalam penelitian ini stress hanya diperlakukan sebagai stress negatif (hindrance stress). Hal ini mungkin menyebabkan hubungan stress dan kinerja menjadi tidak signifikan.

VI. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Program Jamsostek terhadap kinerja dengan kepuasan kerja dan stress kerja sebagai variabel pemediasi. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dan pengaruh stress kerja terhadap kinerja.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Program Jamsostek secara positif signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja juga secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja. Namun demikian peran kepuasan kerja dalam memediasi hubungan antara Program Jamsostek dengan kinerja hanya bersifat parsial. Karena hubungan langsung antara Program Jamsostek dengan kinerja lebih besar dibandingkan peran mediasi kepuasan kerja.
2. Jamsostek tidak signifikan mempengaruhi stress kerja, demikian juga stress kerja tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu peran mediasi stress kerja terhadap hubungan antara Program Jamsostek dengan kinerja tidak terjadi. Perbedaan individu dan pengalaman kerja mungkin menjadi faktor yang menyebabkan tidak signifikannya hubungan kedua variabel ini.

VII. SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang disampaikan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya hendaknya penilaian kinerja karyawan tidak dilakukan sendiri oleh karyawan melainkan dilakukan atasan, sehingga lebih bersifat obyektif sehingga bisa memberikan data yang lebih akurat. Selain itu juga harus menggunakan instrument stress kerja positif dan negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, N., Abdullah, Z., Yong Gun Fai, D., & Shah Alam, S. (2009). A Study of job stress on job satisfaction among University staff in Malaysia: *Empirical Study European Journal of Social Sciences*. 8, (1), 121-131
- Akinboye J. O., Akinboye, D. O & Adeyemo, D. A. (2002). *Coping with stress in life and Work place*. Ibadan: Stirling- Hordern Publishers (Nig) Ltd.
- Boey, K.W. (1998). Coping and family relationships in stress resistance: a study of job satisfaction of nurses in Singapore. *International Journal of Nursing Studies*, 35, 353-361.
- Burke, R.J. (1998). Work and non-work stressors and well-being among police officers: The role of coping. *Anxiety, Stress and Coping*, 11, 345-362.
- Gellalty, Ian R & Irving P.,Gregory (2001), Personality, Autonomy and ContextualPerformance for Managers. *Human Performance*, Vol. 43, No. 3. Pg. 231-245.
- Gibson, Ivancevic, Donnelly & Konopaske (2004), *Organizational Behavior, Structur, Processes*. 11 th edition. McGraw Hill Companies.I
- Greenberg,Jerald & Baron, Robert.A (2003). *Behavior in Organisation*, 8th edition. Pearson Educational. Inc., Upper Saddle.
- Hair, J.F. Jr, Anderson,R.E.Tatham, R.L. & Black, W.C.(2006). *Multivariate Data Analysis*, 6th edition. Upper Sddle River. Pentice Hall International. Inc.
- Hasibuan, M.S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hoppock, R. (1995). *Job satisfaction*. New York: Harper & Brothers Publishers
- Koeske, G.F., Kirk, S.A., Koeske, R.D., & Rauktis, M.B. (1994). *Measuring the monday blues: Validation of a job satisfaction scale for the human services*. *Social Work Research*, 18, 27-35.
- Kuswadi.2004. *Cara Mengukur Kepuasan Karyawan*. Penerbit Gramedia Pustaka
- Locke, E.A. (1977). The nature and causes of job satisfaction. In Dunnette, M.D. (Ed). *Handbook of industrial and organizational psychology*, pp.1297-1349
- MacShane, Steven L,. & Von Glinow, Mary Ann. (2003). *Organizational Behavior: Emerging Realities for The Workplace Revolution*, 2nd edition, McGraw HillCompanies, Inc.

- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Cipta, Bandung.
- Miao, C. Fred. Evans, Kenneth, R. & Zou, Shaoning (2007). *The Role of Salesperson Motivation in Sales Control System-Intrinsic and Extrinsic Motivation Revisted*, *Journal of Business Research*. Vol. 60. Pg. 417-425.
- Robbins, dan Judge, Timothy. 2007. *Perilaku Organisasi*, edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Stamps, P.L., & Piedmonte, E.B. 1986. *Nurses and work satisfaction: An index for measurement*. Ann Arbor, MI: Health Administration Press Perspectives.
- Sulistyowati Eny dan Widjajani Susi, “*Mediasi Kepuasan Kerja Stress Kerja Pada Hubungan Antara Self-Efficacy Dan Kinerja Penjual Jasa Asuransi*”, Hasil Penelitian Tahun 2012
- Vinokur-Kaplan J.X. 1991. “*Job Satisfaction among Social Workers in Public and Voluntary Child Welfare Agencies*”, *Child Welfare*, 155, pp. 81-91.

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PEW UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA YOGYAKARTA

Yuli Kurniyati (yulikurniyati@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45

ABSTRACT. *The purpose of this study was to analyze institutional capacity the PEW Group Members , and analyzing institutional performance , and formulate strategies and institutional capacity building programs in the PEW Group of local economic development in the city of Yogyakarta . The method used in this study is a qualitative method . Data collection techniques used are: observation , documentation studies , in-depth interviews , and questionnaires . Assessment strategies in the analysis of this problem using the Logical Framework Analysis . Repayment rates in Sub Pringgokusuman PEW group 76 % (25 groups) are classified as current , 12 % classified as substandard , and there are 4 groups (12 %) were classified as jammed . Judging from the direction of development of the group based on the performance aspects of the organization , administration , financing , production and rooting business , there are 18 (54.55 %) groups were included in the growth category , and 15 (45.45 %) group included in the category of development , while the group in the category are not independent . Formulation of institutional capacity strengthening program group includes : 1) . Improvement Skills Productive Economic Business Members . 2) Strengthening Institutions Norm 3) . Administrative Arrangement group 3) . Increased Capital to expand cooperative network .*

Key words: empowerment ,institutional capacity , local economi

I. PENDAHULUAN

Program pengembangan ekonomi masyarakat di daerah berintikan pada kebijakan pembangunan yang menggunakan sumberdaya lokal (sumberdaya alam, fisik dan lingkungan), kelembagaan dan sumberdaya sosial ekonomi yang dimiliki daerah. Titik sentral program pengembangan ekonomi masyarakat adalah pada inisiatif daerah (masyarakat dan pemerintah daerah) untuk menggerakkan proses pengembangan ekonomi daerah. Pemikiran dan inisiatif tersebut dituangkan dalam rencana umum yang dapat diterapkan, sesuai dengan permasalahan dan potensi yang

ideal dalam artian aspiratif, serta rencana pembangunan multisektoral yang disusun oleh pemerintah baik di tingkat regional maupun nasional (Djuli sugiarto, 2006 : 2)

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengembangan partisipasi aktif dan meningkatkan prakarsa masyarakat dalam menentukan arah tujuan yang akan dicapai dalam lembaga yang dibentuk bersama oleh masyarakat, pengembangan masyarakat merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi berbagai kegiatan pembangunan tingkat lokal baik yang dilakukan pemerintah dan non-pemerintah (Adi 2001). Menurut (Sumarjo & Saharudin 2004) partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat, karena melalui partisipasi masyarakat dapat diperoleh, Pertama, informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat. Kedua, masyarakat lebih percaya dan bertanggung jawab bila dilibatkan dalam kegiatan mulai dari perencanaan hingga memanfaatkan hasil program. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan mereka dalam pembangunan merupakan hak demokrasi masyarakat itu sendiri.

Penguatan kapasitas lembaga ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, adalah salah satu model peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dirancang dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran dan memberdayakan masyarakat lewat lembaga ekonomi lokal untuk menopang perekonomian masyarakat itu sendiri. Lembaga ekonomi lokal di atas mengandung makna "ikatan sosial" yang dibangun berdasarkan jejaring sosial (social networking) sebagai nilai tambah dari modal sosial (social capital) dengan satu fokus interaksi pada pengembangan masyarakat (Nasdian 2004). Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop mulai tahun 2006 telah memberikan penguatan permodalan kepada para pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam kelompok di 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil yang disempurnakan dengan Perwal 106 tahun 2009. Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan melalui penguatan modal usaha mikro dan kecil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat usaha mikro dan kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini kondisi usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta masih lemah dalam berbagai aspek usaha diantaranya pada aspek permodalan baik dalam hal kemampuan penyediaan modal maupun dalam pengelolaannya. Sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 922 kelompok telah mendapatkan penguatan modal dalam bentuk bantuan dana bergulir melalui program PEW ini. (Disperidagkoptan, 2012)

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan dengan memberikan penguatan permodalan usaha, penguatan modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan permodalan usaha mikro dan kecil melalui program bantuan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok sebagai pinjaman lunak dana bergulir . Karena program PEW ini sifatnya dana bergulir , maka untuk menghindari kemacetan dalam proses pengembalian diberlakukan sistem tanggung renteng oleh anggota kelompok. Tanggung Renteng adalah kewajiban mengembalikan pinjaman yang harus ditanggung oleh anggota kelompok, manakala salah satu anggota kelompok mengalami masalah dalam proses pengembalian pinjaman. Anggota kelompok ini sekaligus melakukan fungsi kontrol bagi kelestarian dan kesinambungan kelompok. Permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal adalah rendahnya tingkat keterampilan dan pengetahuan masyarakat, mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan akses sumberdaya yang tersedia. Hambatan lain yang signifikan berupa, rendah kemampuan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat dalam mengelola sumberdaya untuk meningkatkan kompetensinya.

Kajian ini penting mengingat potensi usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta cukup besar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, sehingga perlu untuk didorong dan dikembangkan agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan berdaya saing melalui program pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW) ini. Dengan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kapasitas kelembagaan dan anggota kelompok Program Pemberdayaan Ekonomi wilayah (PEW) di kota Yogyakarta.
- b. Bagaimana kinerja kelompok PEW sebagai lembaga simpan pinjam dalam memberdayakan anggotanya ?
- c. Bagaimana merumuskan strategi dan program penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a). Menganalisis Kapasitas Kelembagaan dan anggota Kelompok penerima bantuan Program pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW) di kota Yogyakarta.
- b). Mengevaluasi kinerja kelompok PEW sebagai lembaga simpan pinjam dalam memberdayakan anggotanya.
- c) Merumuskan strategi dan program penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Syaukat dan Hendrakusumaatmaja (2004), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan kerjasama seluruh komponen masyarakat di suatu daerah (lokal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup seluruh masyarakat di dalam komunitas. PEL diperlukan karena selama ini daerah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam, manusia dan sosial budaya, belum termanfaatkan secara optimal dalam rangka pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan program PEL sangat ditentukan oleh motivasi pemerintah Pusat/Daerah dalam merencanakan, memformulasikan dan mengimplementasikan program-program Otonomi Daerah. Menurut Syaukat dan Hendrakusumaatmaja (2004), Pengembangan ekonomi lokal memberi kesempatan kepada pemerintah lokal, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal untuk secara bersama-sama pro-aktif berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan bisnisnya sehingga mereka mampu berkompetisi dengan daerah lainnya, bahkan internasional.

Pengembangan ekonomi lokal difokuskan pada upaya peningkatan daya saing (competitiveness), peningkatan pertumbuhan, dan redistribusi pertumbuhan tersebut melalui pembentukan usaha kecil dan menengah (SME: small and medium enterprises) dan penciptaan lapangan kerja (job creation). Pengembangan Ekonomi Lokal pada lintasan terakhir adalah perbaikan kesejahteraan dan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, sedangkan kemiskinan tersebut dicirikan : rendahnya kemampuan masyarakat dalam meningkatkan penguasaan sumber daya lokal (Syaukat dan Hendrakusumaatmaja, 2004). PEL yang mampu menyentuh kelompok lemah tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi memerlukan keberpihakan terhadap kelompok sasaran berupa kebijakan pemerintah daerah dan upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, harus dilakukan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tersebut. Syaukat dan Sumarti (2004) menjelaskan bahwa, sumber-sumber daya saing ekonomi lokal antara lain : lahan, tenaga kerja, dan modal.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan usaha simpan pinjam sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimiliki komunitas. Menurut Sumodiningrat (2001) bahwa dalam penyaluran kredit kepada pengusaha kecil menengah harus melalui lembaga keuangan pedesaan yang sesuai dengan pola usaha masyarakatnya. Untuk itu diperlukan syarat-syarat bagi lembaga keuangan pedesaan

supaya mampu berkembang, yaitu: (1) harus mencerminkan kebutuhan masyarakat; (2) mudah diawasi, dipantau dan dikelola oleh masyarakat setempat; (3) menguntungkan bagi masyarakat maupun lembaga; (4) memberikan pelayanan keuangan yang menjangkau masyarakat sesuai kondisi masyarakat setempat.

Menurut Syaikat dan Hendrakusumaatmaja (2004), untuk dapat mengukur keberhasilan suatu pembangunan khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal dapat menggunakan beberapa indikator-indikator keberhasilan, yaitu :

a. Indikator Masukan

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk program-program terpadu yang berwawasan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan pada instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kebijakan ini haruslah ditopang dengan adanya alokasi dana dari APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program tersebut.

b. Indikator Proses

Terselenggaranya kegiatan-kegiatan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan alokasi jadwal kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan kesinambungan program.

c. Indikator Keluaran

- Indikator Penghasilan

Jika penghasilan kelompok masyarakat meningkat dari waktu ke waktu, ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Indikatornya adalah pendapatan perkapita penduduk dan persentase penduduk miskin.

- Indikator Ketahanan dan Kecukupan Pangan

Dapat dilihat dari sejauh mana ada peningkatan konsumsi bahan pangan, indikatornya antara lain: ketersediaan pangan yang mencukupi, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang memadai, serta proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan bukan makanan.

- Indikator Pendidikan

Indikator sektor pendidikan untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah: partisipasi sekolah dan putus sekolah, dan proporsi orang dewasa yang buta huruf.

- Indikator Kesehatan.

Indikator sektor kesehatan untuk mengukur keberhasilan antara lain: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka harapan hidup.

- Indikator Kesempatan Kerja
Indikator kesempatan kerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan antara lain: tingkat upah riil; proporsi tenaga kerja di sektor formal; jumlah pengangguran; tenaga kerja dibawah umur.
- Indikator Sarana dan Prasarana
Indikator sarana dan prasarana yang penting adalah: ketersediaan transportasi, penerangan (listrik), informasi dan ketersediaan akses untuk memperoleh air bersih, air minum, dan sanitasi yang sehat.
- Indeks Pembangunan Jender
Merupakan indeks yang menunjukkan upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam pencapaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Jender antara lain: angka harapan hidup laki-laki dan perempuan; persentase tingkat melek huruf laki-laki dan perempuan; rata-rata lamanya sekolah laki-laki dan perempuan; persentase kontribusi pendapatan laki-laki dan perempuan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya membangun daya saing, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan aksi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita 1996) dalam pemberdayaan tersebut menurut (Suharto 2005) menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : 1). Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan). 2). Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 3). Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan dengan demikian merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan, menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu; masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat

fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tiga cara pemberdayaan ekonomi menurut (Kartasasmita 1996) antara lain :1). Menciptakan iklim yang memungkinkan lapisan masyarakat berkembang. 2). Memperbaiki potensi atau daya yang dimiliki. 3). Memberikan perlindungan bagi si lemah, mencegah persaingan tidak seimbang dan eksploitasi . Pemberdayaan masyarakat bukan menjadikan mereka tergantung pada pemberian, tetapi merupakan hasil usaha sendiri yang dapat dipertukarkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonominya.

3. Penguatan Kapasitas

Penguatan adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat (Sumpeno 2002), penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk : 1). Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap; 2). Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya; 3). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan. Penguatan kelembagaan kelompok sangat diperlukan, karena dengan penguatan kapasitas masyarakat/usaha mikro kecil sebagai anggota bisa mengembangkan modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh (Rubin & Rubin 1992) bahwa “pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada dirinya dan ada upaya untuk meningkatkan kekurangannya tersebut” .

Hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas menurut (Sumpeno 2002) adalah :1). Penguatan individu, organisasi dan masyarakat. 2). Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan progra 3). Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan.

Pengertian pengembangan kelembagaan menurut (Israel 1992) adalah proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Lebih lanjut (Rubin & Rubin 1992) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat miskin dapat dilakukan dengan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dimana kelembagaan tersebut menciptakan dan

membangun perasaan anggota untuk membangkitkan kapasitas lembaga dalam pemecahan masalah. Penguatan kapasitas lembaga simpan pinjam dapat dicapai melalui komponen kepercayaan, kerjasama dan kemitraan sehingga melalui pemberdayaan anggota dan lembaga akan dapat meningkatkan kemampuan atas pengetahuan, keterampilan dan sikap disamping dapat meningkatkan kemampuan lembaga dan kemampuan masyarakat miskin sebagai anggotanya.

4. Kinerja Kelompok

Analisis terhadap kinerja akan membantu menggambarkan bagaimana prospek suatu kelompok dapat berkembang. Kinerja mengacu pada tingkat kemampuan pelaksanaan tugas dengan standar perbandingan ideal antara pelaksanaan tugas dan yang diharapkan (perencanaan) dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan (evaluasi). Pengertian kinerja merujuk kamus Bahasa Indonesia, (Purwadarminta 1992) menjelaskan kinerja sebagai keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dimunculkan melalui perbuatan. Kinerja menurut (Bernadin & Russel dikutip dalam Mulyono 1993) menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu cara untuk mengukur kontribusi individu anggota organisasi terhadap organisasinya. Kinerja juga diartikan perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai respon terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga kinerja dapat dilihat dari hasil kerja, derajat kecepatan kerja dan kualitas kerja. Kinerja sebagai unsur kegiatan pengendalian program pemberdayaan masyarakat atau usaha mikro kecil bertumpu pada pemantauan indikator kinerja sesuai tujuan khusus yang akan dicapai, baik yang indikator yang bersifat obyektif maupun subyektif.

Pengertian kinerja dari uraian di atas bisa disebut sebagai kualitas penatalaksanaan lembaga meliputi sistem pengorganisasian terdiri atas input, proses dan output pelaksanaan manajemen lembaga simpan pinjam. Pengertian tersebut mencakup; 1) Input meliputi sarana, bahan, pengurus dan organisasi, sedangkan proses meliputi sosialisasi program perguliran dana simpan pinjam, pemberian kredit serta kegiatan pelaporan dan tindak lanjutnya, 2) Output yang dimaksud adalah kegiatan pelaporan perguliran dana serta laporan kegiatan pengorganisasian lembaga simpan pinjam. Penjelasan kinerja tersebut bisa dikatakan bahwa, indikator kinerja lembaga simpan pinjam berarti suatu kegiatan yang dapat memberi petunjuk baik buruknya kegiatan input, proses dan output pelaksanaan kegiatan lembaga simpan pinjam. Kinerja bisa disimpulkan sebagai aspek yang berpengaruh terhadap maju dan mundurnya lembaga yaitu, kinerja pengurus dan anggota dari lembaga simpan pinjam. Dikatakan berpengaruh sebab masing-masing anggota suatu lembaga secara spesifik bisa muncul kinerja yang berbeda dan akibat dari kinerja anggota tersebut akan berpengaruh

terhadap hubungan kerjasama di dalam lembaga. Kinerja sebagai alat ukur digunakan untuk melihat maju dan mundurnya lembaga dilihat dari pencapaian target, efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan penjelasan oleh (Mulyono 1993), yaitu :1). Derajat pencapaian tujuan pokok, 2) Seberapa efisien sumberdaya (dapat berupa masukan, antara lain tenaga kerja, material, jasa pelayanan yang dibeli dan modal) digunakan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat, dalam arti hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. 3). Perbandingan mengenai performa organisasi dari waktu terdahulu dengan waktu sekarang, menunjukkan penurunan, statis atau berkembang.

5. Pengembangan Kapasitas dalam Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan sosial merupakan terjemahan langsung istilah social institution. Akan tetapi ada pula yang menggunakan istilah pranata sosial untuk istilah social institution tersebut, yang menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Koentjaraningrat dalam Nasdian dan Utomo (2004) mengatakan pranata sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Bertrand dalam Nasdian dan Utomo (2004) mendefinisikan kelembagaan sosial sebagai tata abstraksi yang lebih tinggi dari group, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Menurut Syahyuti (2003), di dalam setiap kelembagaan terdapat dua bagian yang membangun kelembagaan tersebut. Kedua bagian tersebut adalah aspek-aspek kelembagaan dan aspek-aspek organisasi. Perbedaan dalam melihat kelembagaan melalui aspek kelembagaan dan aspek organisasi bertujuan agar dapat menganalisa kelembagaan tersebut secara mendalam. Aspek kelembagaan merupakan sisi dinamis yang lebih bersifat kultural dari suatu kelembagaan, sedangkan aspek keorganisasian merupakan sisi statisnya yang lebih bersifat struktural. Jika aspek kelembagaan fokus utama kajian adalah perilaku dengan inti kajiannya adalah nilai (value), aturan (rule), dan norma (norm), maka fokus utama dari aspek keorganisasian adalah struktur dengan inti kajiannya pada peran (roles).

Menurut Eade (1997) dalam Nasdian dan Utomo (2004), pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok berikut :

- a. Pengembangan kapasitas sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan. Kelembagaan dengan demikian merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Pengembangan kapasitas dapat juga menunjuk pada upaya mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog politik dan atau memberikan kontribusi dalam mencari alternatif pembangunan. Pandangan ini

menekankan peran mendemokratisasikan organisasi non pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam “masyarakat madani”.

- c. Jika pengembangan kapasitas adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut serta, maka fokus pengembangan adalah mengembangkan hubungan antara struktur, proses, dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan dan kualitas serta jumlah output dari hasil kerjanya.
- d. Jika pengembangan kapasitas adalah tujuan akhir itu sendiri, maka fokusnya adalah misi organisasi yang berimbang, dan pertautannya dengan lingkungan eksternalnya, strukturnya dan aktivitasnya.
- e. Jika pengembangan kapasitas adalah suatu proses penyesuaian, maka fokusnya adalah membantu mitra kerja menjadi lebih mandiri dan aktor otonom dalam hubungan jangka panjang atau penyertaan donor dan agen –agen yang relevan lainnya.

Keberhasilan suatu kelembagaan dipengaruhi oleh kuatnya kepemimpinan serta adanya manajemen yang baik dalam kelembagaan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Israel (1992) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kelembagaan adalah:

1. Faktor-faktor eksogen: faktor yang mempengaruhi seluruh negara, wilayah atau sektor untuk periode tertentu, misalnya: banjir, kekeringan, peperangan, krisis ekonomi, perubahan-perubahan penting dalam kebijakan ekonomi.
2. Kepemimpinan individu-individu yang menonjol.
3. Manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.
4. Komitmen.

Pemberdayaan masyarakat selain meliputi penguatan individu anggota masyarakat sendiri, juga meliputi penguatan pranata. Pranata atau kelembagaan yang dimaksud baik berupa kelembagaan atau yang bersifat “badan” atau organisasi, maupun kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial disini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan modal sosial serta kemandirian yang dimiliki masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan kajian, data yang dibutuhkan, sumber data dan teknik pengumpulan data ditampilkan dalam tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Tujuan, Jenis Data, sumber data dan Teknik Pengumpulan data

No.	Tujuan	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Identifikasi potensi pengembangan ekonomi lokal	Sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi.	Pengurus, anggota kelompok PEW, tokoh masyarakat, aparat desa dan pemerintah	Observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner
2.	Identifikasi kapasitas kelembagaan dan anggota kelompok PEW	Karakteristik anggota, pengetahuan dan ketrampilan, kapasitas pengurus, norma/ aturan kelompok, kepemimpinan dan manajemen	Pengurus, anggota dan fasilitator kelompok PEW	Observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner
3.	Evaluasi kinerja kelompok PEW	Perkembangan modal, perkembangan anggota, perkembangan kegiatan, hambatan kegiatan dan administrasi	Pengurus, anggota kelompok PEW, tokoh masyarakat, aparat desa dan pemerintah	Wawancara, studi dokumen, kuesioner
4.	Rumusan program penguatan kapasitas kelembagaan kelompok	Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) Analisis faktor eksternal (Kesempatan dan Ancaman)	Pengurus, anggota kelompok PEW dan stockholder	Wawancara, studi dokumen

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sitorus dan Agusta (2004), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Dengan kondisi data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya tidak terbatas, maka peneliti harus melakukan reduksi, yaitu hanya memilih hal-hal pokok dan tema-tema yang relevan dengan fokus kajian. Data yang direduksi itu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil kajian dan dapat membantu dalam kode-kode tertentu.

2. Penyajian Data

Yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, network dan sebagainya yang memungkinkan data hasil kajian tidak tercampur dengan setumpuk data yang belum diolah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Yaitu upaya untuk mencari pola, model, tema atau hal-hal yang sering muncul sehingga di dapat suatu kesimpulan yang semakin lama menjadi semakin jelas seiring dengan semakin banyak data yang diperoleh.

Strategi kajian dalam analisis masalah ini menggunakan Logical Framework Analysis. Penggunaan alat analisis Logical Framework untuk mempermudah dalam menganalisis masalah, tujuan hingga penyusunan program. Tahapan-tahapan dalam Logical Framework Analysis (Sumardjo & Saharudin 2003) adalah : Tahap Pertama, melaksanakan analisis permasalahan berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat . Tahap Kedua, melaksanakan analisis tujuan berdasarkan analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Tahap Ketiga, melaksanakan matrik alternatif kegiatan, berdasarkan analisis tujuan dirumuskan analisis alternatif strategi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal. Tahap Keempat, menyusun analisis pihak terkait berdasakan identifikasi yang telah dilakukan. Tahap Kelima, menyusun rencana kegiatan.

IV. HASIL YANG DIPEROLEH

1. Identifikasi potensi Pengembangan Ekonomi lokal

Pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan, industri, koperasi dan jasa sehingga dapat terwujud kegiatan yang menggairahkan kehidupan ekonomi kota, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK)
- b. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi

- c. Mendorong usaha yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.

Potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 18.234 unit usaha yang terdiri dari sektor industri sekitar 4.569 unit usaha dan sektor perdagangan dan jasa mencapai sekitar 13.126 unit usaha, dan koperasi 539 unit. Berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah merupakan produk unggulan yang telah mampu menembus pasar secara luas baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional sehingga pemerintah perlu memfasilitasi secara terus menerus agar keberadaan usaha mikro kecil dan menengah dapat semakin berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian di Kota Yogyakarta. Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memfasilitasi UMKM agar keberadaannya dapat dipertahankan dan dikembangkan sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat dalam menghadapi era pasar bebas mendatang.

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop telah memberikan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) kepada para pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam kelompok – kelompok di 5 kecamatan. Pada awalnya, direncanakan permodalan ini ditujukan kepada 14 kecamatan se-Kota Yogyakarta. Namun dengan adanya peristiwa gempa 26 Mei 2006, maka permodalan dialihkan kepada 5 kecamatan korban gempa terparah di Kota Yogyakarta, yakni Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron, dan Gondokusuman. Tercatat sebanyak 28 kelompok usaha mikro kecil yang saat itu menerima guliran dana PEW, dengan total dana sebesar Rp.1.048.000.000,-.

Tahun 2007, dana PEW kembali diluncurkan dengan sasaran 9 kecamatan yang belum menerima PEW di tahun 2006, yakni Kecamatan Kraton, Gondomanan, Gedongtengen, Danurejan, Jetis, Tegalrejo, Wirobrajan, Ngampilan dan Pakualaman. Penerima dana PEW 2007 adalah sebanyak 23 kelompok dengan total penerimaan sebesar Rp.912.000.000,-. Bentuk dana bergulir PEW 2006 dan 2007 adalah pinjaman lunak bersyarat, di mana kelompok penerima dana PEW memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan. Dana bergulir PEW 2008, 2009, 2010, 2011 dan yang akan dilaksanakan tahun 2012 berbentuk hibah kepada kelompok dan bergulir di internal kelompok, sehingga anggota kelompok memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada kelompok, namun kelompok tidak memiliki kewajiban kepada pemerintah

untuk mengembalikan dana tersebut. Kelompok diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut demi perkembangan kelompok dan anggota kelompoknya sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok. Untuk diketahui, jumlah penerima dana PEW tahun 2008 adalah sebanyak 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000,-. PEW 2009 berjumlah 421 kelompok dengan total dana Rp.4.325.000.000,-. Dan PEW 2010 berjumlah 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000,- serta PEW 2011 sebanyak 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000. Sampai dengan saat ini, total jumlah kelompok PEW dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 1.147 kelompok dengan dana Rp.13.035.000.000,-.

Tujuan Program adalah Memberikan fasilitasi kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan dengan pola bergulir di internal kelompok. Sasaran kegiatan ini adalah komunitas usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam kelompok di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta sehingga usaha dan kegiatannya semakin berkembang. Jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan hibah bersyarat yang akan dipergunakan untuk penguatan permodalan dan peningkatan sarana prasarana usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang tergabung dalam kelompok-kelompok UMKM di 45 kelurahan se- Kota Yogyakarta.

b. Kelembagaan

Untuk mengelola bantuan pengembangan ekonomi wilayah berbasis kelurahan di Kota Yogyakarta diperlukan lembaga-lembaga pengelola sebagai berikut:

- Tim Koordinasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta dengan anggota yang berasal dari unsur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, DPDPK Kota Yogyakarta, Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Bank Pelaksana, Kecamatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Mempersiapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Umum pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Mempersiapkan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan.

- 3) Mensosialisasikan Peraturan Walikota Yogyakarta dan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian tentang Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Menerima dan mengevaluasi proposal dari kelompok calon penerima bantuan.
 - 5) Memfasilitasi pencairan bantuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada kelompok penerima bantuan.
 - 6) Memonitor pelaksanaan penyaluran dan pengguliran bantuan kepada para anggota kelompok penerima bantuan.
 - 7) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
- Kelompok usaha mikro kecil dan menengah penerima bantuan. Kelompok ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Mensosialisasikan program bantuan kepada para anggotanya.
 - 2) Mengajukan proposal pencairan bantuan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dnas Perindagkoptan Kota Yogyakarta.
 - 3) Membuka rekening di Bank Pelaksana.
 - 4) Menerima dan mengevaluasi permohonan pencairan bantuan dari para anggota.
 - 5) Menyetujui atau menolak permohonan pencairan bantuan dari para anggota dengan berpedoman pada petunjuk teknis.
 - 6) Mencairkan bantuan kepada para anggota sesuai petunjuk teknis.
 - 7) Mengelola dan mengadministrasikan perguliran bantuan di kelompok yang bersangkutan.
 - 8) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.

c. Profil Kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen, diketahui bahwa jenis usaha mikro kecil di kelurahan gedontengen adalah usaha jasa berjumlah 2 , toko ada 1, niaga ada 4, percetakan ada 1, warung sembako 2, warung makan 3, makanan tradisional 18 dan yang paling banyak adalah usaha kerajinan yang berjumlah 24 seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Jumlah dan jenis usaha mikro kecil di Pringgokusuman

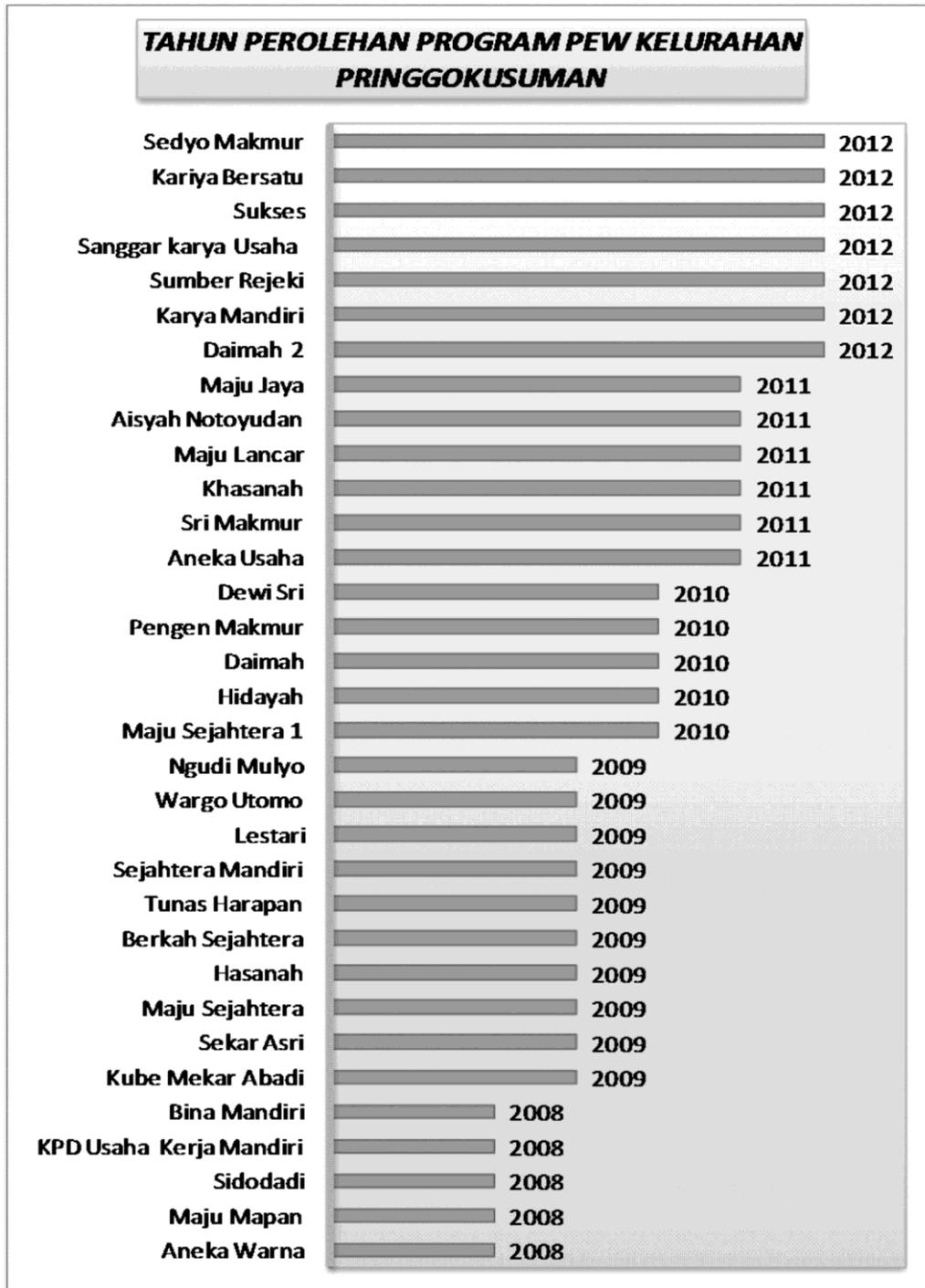
Di Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen terdapat 33 kelompok yang menerima bantuan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) serta tercantum dalam tabel 2

Tabel 2. Profil Kelompok Penerima bantuan Permodalan program PEW

No.	Nama Kelompok	Tahun Perolehan	Jumlah Anggota	Bantuan Dana Bergilir Program PEW
1	Aneka Warna	2008	10	Rp. 10.000.000,00
2	Maju Mapan	2008	10	Rp. 10.000.000,00
3	Sidodadi	2008	10	Rp. 10.000.000,00
4	KPD Usaha Kerja Mandiri	2008	10	Rp. 10.000.000,00
5	Bina Mandiri	2008	10	Rp. 10.000.000,00
6	Kube Mekar Abadi	2009	15	Rp. 10.000.000,00
7	Sekar Asri	2009	15	Rp. 10.000.000,00
8	Maju Sejahtera	2009	10	Rp. 10.000.000,00
9	Hasanah	2009	10	Rp. 10.000.000,00
10	Berkah Sejahtera	2009	10	Rp. 10.000.000,00
11	Tunas Harapan	2009	10	Rp. 10.000.000,00
12	Sejahtera Mandiri	2009	11	Rp. 10.000.000,00
13	Lestari	2009	10	Rp. 10.000.000,00
14	Wargo Utama	2009	12	Rp. 10.000.000,00
15	Ngudi Mulyo	2009	10	Rp. 10.000.000,00
16	Maju Sejahtera I	2010	10	Rp. 10.000.000,00
17	Hidayah	2010	10	Rp. 10.000.000,00

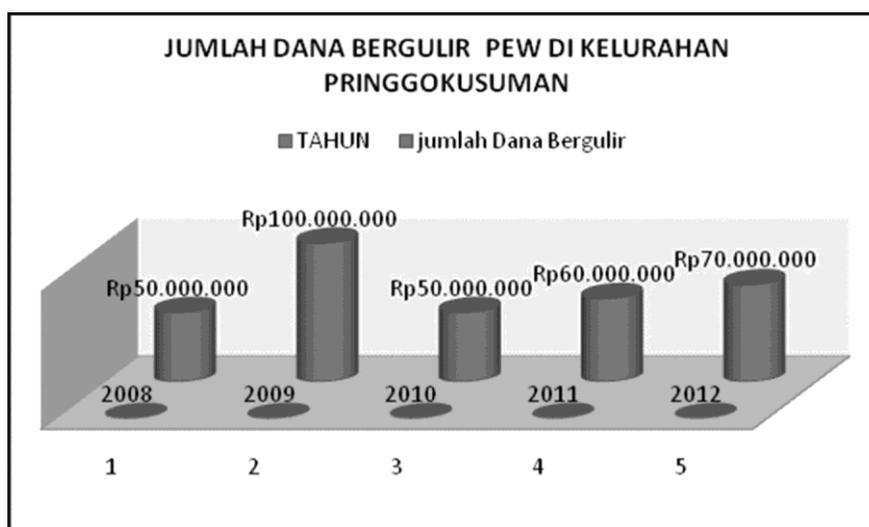
No.	Nama Kelompok	Tahun Perolehan	Jumlah Anggota	Bantuan Dana Bergilir Program PEW
18	Daimah	2010	10	Rp. 10.000.000,00
19	Pengen Makmur	2010	10	Rp. 10.000.000,00
20	Dewi Sri	2010	10	Rp. 10.000.000,00
21	Aneka Usaha	2011	10	Rp. 10.000.000,00
22	Sri Makmur	2011	10	Rp. 10.000.000,00
23	Khasanah	2011	10	Rp. 10.000.000,00
24	Maju Lancar	2011	10	Rp. 10.000.000,00
25	Aisyah Notoyudan	2011	10	Rp. 10.000.000,00
26	Maju Jaya	2011	10	Rp. 10.000.000,00
27	Daimah 2	2012	10	Rp. 10.000.000,00
28	Karya Mandiri	2012	10	Rp. 10.000.000,00
29	Sumber Rejeki	2012	10	Rp. 10.000.000,00
30	Sanggar Karya Usaha	2012	10	Rp. 10.000.000,00
31	Sukses	2012	10	Rp. 10.000.000,00
32	Kariya Bersatu	2012	10	Rp. 10.000.000,00
33	Sedyo Makmur	2012	10	Rp. 10.000.000,00
	Jumlah		343	Rp. 330.000.000,00

Terdapat 5 kelompok yang memperoleh bantuan penguatan modal tahun 2008, 10 kelompok pada tahun 2009 , tahun 2010 ada 5 kelompok, tahun 2011 terdapat 6 kelompok, dan tahun 2012 terdapat 7 kelompok penerima bantuan penguatan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) seperti dapat dilihat dalam gambar 2



Gambar 2. Kelompok PEW dan tahun perolehan bantuan

Selanjutnya jumlah dana PEW yang telah digulirkan kepada kelompok PEW di kelurahan Pringgokusuman dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat dalam gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Dana Bergulir PEW di Kelurahan Pringgokusuman

2. Identifikasi Kapasitas Kelembagaan dan Anggota Kelompok PEW

a. Aspek Organisasi Kelompok

Penilaian aspek organisasi yang pertama adalah Jumlah anggota dalam kelompok, dari 33 kelompok penerima bantuan modal PEW di kelurahan pringgokusuman yang memiliki jumlah anggota tiga sampai lima orang berjumlah 4 kelompok atau sekitar 12%, yang beranggotakan 6-10 orang sebanyak 26 kelompok atau sekitar 79%, sedangkan yang beranggotakan 11-20 orang sebanyak 3 kelompok atau sekitar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota Kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman sebagian besar berkisar antara 6-10.

Tabel 3. Aspek Organisasi kelompok

Aspek Organisasi		
Jumlah Anggota	Jml Kelompok	%
a. 3 - 5 orang	4	12%
b. 6 - 10 orang	26	79%
c. 11 - 20 orang	3	9%
	33	100%
Jumlah Pengurus dalam Kelompok		
Jumlah Pengurus	Jml Kelompok	%
a. Min 1 orang	4	12%
b. Min 3 orang ditambah seksi	29	88%
c. Min 3 orang ditambah seksi lengkap	0	0%
	33	100%

Kehadiran dalam Pertemuan Anggota/ Pengurus

Tingkat Kehadiran	Jml Kelompok	%
a. Tidak menentu	4	12%
b. Minimal 75%	8	24%
c. Minimal 90%	21	64%
	33	100%

Pertemuan Anggota/ Pengurus

Pertemuan Anggota/Pengurus	Jml Kelompok	%
a. Tidak teratur	8	24%
b. Teratur	0	0%
c. Teratur minimal 1 kali/bulan	25	76%
	33	100%

Aturan Main dalam Kelompok

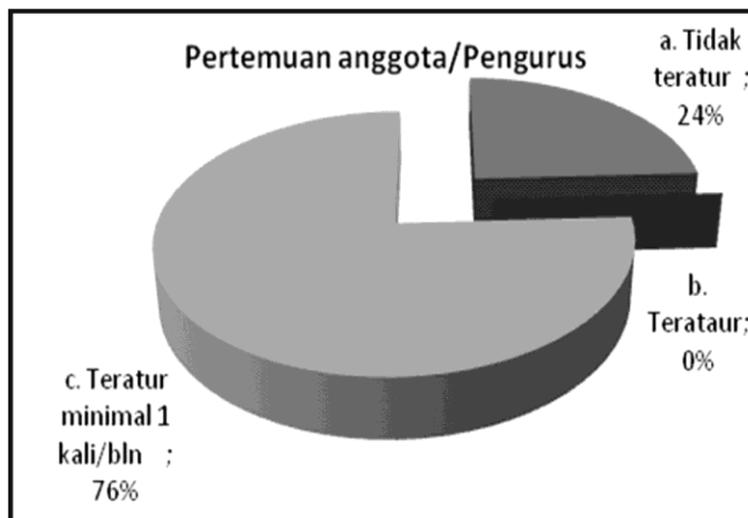
Aturan Kelompok	Jml Kelompok	%
a. Ada, belum tertulis	4	12%
b. Ada tertulis, tetapi tidak konsisten	5	21%
c. Ada, tertulis, dilaksanakan	24	73%
	33	100%

Penilaian aspek organisasi yang kedua adalah Jumlah Pengurus dalam Kelompok, dari 33 kelompok penerima bantuan modal PEW di kelurahan Pringgokusuman terdapat empat kelompok yang jumlah pengurusnya hanya satu, ada 29 kelompok (88%) yang memiliki pengurus minimal tiga orang ditambah seksi, sedangkan kriteria kelompok yang memiliki jumlah pengurus minimal tiga ditambah seksi lengkap tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman memiliki kepengurusan yang lengkap (tiga orang ditambah seksi).

Dari 33 Kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman terdapat 4 kelompok (12%) yang tingkat kehadiran dalam pertemuan kelompok tidak menentu, sedangkan yang tingkat kehadirannya minimal 75% ada 8 kelompok (24%), dan yang tingkat kehadirannya minimal 90 % ada 21 kelompok (64%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dalam pertemuan kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman sebagian besar sangat baik.

Dari 33 kelompok PEW di kelurahan Pringgokusuman terdapat 8 kelompok atau sekitar 24% yang pertemuan anggota/pengurusnya tidak teratur, sedangkan 25 kelompok atau sekitar 76% yang pertemuan anggota/pengurusnya tertarus minimal satu bulan sekali (gambar 4).

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman selalu mengadakan pertemuan rutin setiap bulan, hal ini akan menyumbang penilaian dari aspek organisasi yang baik untuk masing-masing kelompok PEW.



Gambar 4. Pertemuan anggota/Pengurus

Dari 33 kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman terdapat empat kelompok (sekitar 11%) yang sudah memiliki aturan tetapi belum tertulis, dan terdapat 5 kelompok (sekitar 20%) yang memiliki aturan tertulis tetapi tidak digunakan atau tidak konsisten dalam pelaksanaannya, sisanya 24 kelompok atau sekitar 69% telah memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian sebagian besar kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman telah memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan, hal ini menunjukkan hal yang baik ditinjau dari aspek organisasi. Sedangkan untuk kelompok-kelompok yang belum memiliki aturan main dalam kelompok perlu dibina dan didampingi secara intensif oleh fasilitator, sehingga kapasitas kelembagaan kelompok semakin meningkat. Sedangkan kelompok yang sudah memiliki aturan main kelompok tetapi belum dilaksanakan secara konsisten, perlu dimotivasi agar semua komponen melakukan kontrol internal agar aturan main dalam kelompok bisa dilaksanakan secara konsisten

b. aspek Administrasi

Dilihat dari aspek administrasi organisasi terdapat sembilan kelompok (27%) yang sudah memiliki administrasi tetapi belum lengkap, terdapat dua kelompok yang telah memiliki administrasi organisasi yang lengkap tetapi belum digunakan sedangkan sisanya 22 kelompok telah memiliki administrasi organisasi yang lengkap dan telah digunakan. Buku-buku yang diperlukan dalam administrasi organisasi umum ini meliputi : buku

aturan kelompok, buku daftar pengurus dan anggota, buku daftar hadir pertemuan rutin/kegiatan lain, buku notulen dan buku tamu.

Administrasi Kelompok bermanfaat untuk tersedianya informasi yang komprehensif tentang keadaan kelompok baik yang bersifat umum maupun keuangan bagi anggota maupun pihak luar. Administrasi diperlukan untuk menjaga keakuratan catatan atas semua kegiatan transaksi dan keputusan-keputusan yang dibuat kelompok. Manfaat administrasi Kelompok antara lain : sebagai alat kontrol/evaluasi, alat dokumentasi/arsip, sebagai alat/bahan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk memonitor perkembangan kelompok, alat pemupuk kepercayaan anggota terhadap pengurus.

Tabel 4. Aspek Administrasi Kelompok

Aspek Administrasi Kelompok		
Administrasi Organisasi	Jml Kelompok	%
a. Ada, belum lengkap	9	27%
b. Ada, lengkap, belum digunakan	2	9%
c. Ada, lengkap, digunakan	22	67%
	33	100%

Administrasi Keuangan	Jml Kelompok	%
a. Ada, belum lengkap	3	9%
b. Ada, lengkap, belum digunakan	8	25%
c. Ada, lengkap, digunakan	21	66%
	32	100%

Sedangkan kriteria yang kedua dari aspek organisasi adalah administrasi Keuangan, Administrasi Keuangan atau pembukuan keuangan adalah catatan transaksi keuangan yang dibuat secara kronologis (menurut urutan waktu) dan sistematis (menurut cara-cara tertentu). Administrasi Keuangan juga dapat diartikan sebagai pencatatan yang berkaitan dengan kekayaan kelompok. Sangat penting untuk mengetahui keadaan kekayaan kelompok dengan jelas/transparan dan sebagai alat untuk pengawasan dalam pengelolaan permodalan kelompok. Sedemikian pentingnya administrasi keuangan ini sehingga dapat dikatakan bahwa nilai administrasi keuangan ini setara dengan nilai uangnya bahkan lebih daripada itu. (Disperindagkoptan kota Yogyakarta, 2012:8).

c. Aspek Permodalan

Jumlah Kelompok yang memiliki modal swadaya kurang dari 5% dari modal sendiri berjumlah empat kelompok, sedangkan kelompok yang kriteria modal swadaya antara 5-9% dari modal sendiri sebanyak 29

kelompok atau sekitar 88%. Sedangkan kelompok yang memiliki modal swadaya lebih dari 10% dari modal sendiri belum ada. Permodalan merupakan variabel penting dalam menilai kinerja kelompok PEW. Semakin besar simpanan anggota maka semakin besar pula Modal sendiri (Equity) yang dimiliki oleh Kelompok. Jika kelompok PEW mengacu kepada sistem koperasi maka ada tiga jenis simpanan yang harus diadakan oleh kelompok PEW, yaitu: simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela/Tabungan.

Tabel 5. Aspek Permodalan Kelompok

Aspek Permodalan

Modal Swadaya	Jml Kelompok	%
a. <5% dari modal sendiri	4	12%
b. 5%-9% dari modal sendiri	29	88%
c. >10% dari modal sendiri	0	0%
	33	100%

Pengembalian Pinjaman	Jml Kelompok	%
a. Teratur dengan rata-rata <75% dari kewajiban	4	12%
b. Terencana dan teratur dengan rata-rata 75%-90% dari kewajiban	11	33%
c. Terencana dan teratur dengan rata-rata 91%-100% dari kewajiban	14	42%
d. Macet	4	12%
	32	100%

Sedangkan Jika dilihat dari kriteria pengembalian pinjaman terdapat empat kelompok yang mengalami kemacetan, empat kelompok masuk katagori teratur dengan rata-rata < 75% dari kewajiban, 11 kelompok termasuk dalam kriteria teratur dan terencana dengan rata-rata 75% -90% dari kewajiban. Sedangkan 14 kelompok termasuk dalam kriteria teratur dan terencana dengan rata-rata 91% - 100 dari kewajiban.

d. Aspek Usaha Produktif

Penilaian aspek usaha produktif kelompok PEW terdiri dari manajemen usaha, omzet atau hasil penjualan, pemasaran dan pemantauan usaha seperti terlihat dalam tabel 6 dibawah ini. Dilihat dari manajemen usaha terdapat 13 kelompok belum memiliki rencana pengembangan usaha (sekitar 39%), sedangkan yang telah memiliki rencana pengembangan usaha sebanyak 11 kelompok (33%), dan kelompok PEW yang telah memiliki rencana pengembangan usaha dan kelayakan usaha serta dapat menilai

perkembangannya sebanyak sembilan kelompok atau sekitar 27%.

Sedangkan jika dilihat dari Hasil Penjualan (omzet), ada lima kelompok PEW yang omzetnya masih relatif kecil dan belum berkembang, sedangkan kelompok PEW yang hasil penjualannya mengalami peningkatan sebanyak 16 kelompok atau sekitar 48%. Kelompok PEW yang SHU atau perolehan labanya mengalami peningkatan sebanyak 11 kelompok.

Tabel 6. Aspek Usaha Produktif Anggota

Aspek Usaha Produktif

Manajemen Usaha	Jml Kelompok	%
a. Blm ada rencana pengembangan usaha	13	39%
b. Ada rencana pengembangan usaha	11	33%
c. Ada rencana pengembangan usaha dan kelayakan usaha serta dapat menilai perkembangannya	9	27%
	33	100%

Hasil Penjualan (Omzet)	Jml Kelompok	%
a. Masih relatif kecil dan belum berkembang	6	18%
b. Penjualan meningkat	16	45%
c. Rugi/laba meningkat	11	33%
	33	100%

Pemasaran	Jml Kelompok	%
a. Tradisional/ blm ada jaringan pemasaran	5	15%
b. Pemasaran masih terbatas ditempat lokasi	10	30%
c. Mempunyai jaringan pemasaran	18	55%
	33	100%

Pemantauan Usaha	Jml Kelompok	%
a. Usaha Anggota tidak terpantau	5	15%
b. Baru sebagian anggota yg dpt dipantau	0	0%
c. Kelompok memantau usaha anggota	28	85%
	33	100%

Jika dilihat dari Pemasarannya, terdapat lima kelompok yang jaringan pemasarannya masih tradisional atau belum ada jaringan pemasaran sama sekali. Terdapat 10 kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman yang pemasarannya masih terbatas di tempat lokasi, sedangkan 18 kelompok PEW atau sekitar 55% telah memiliki jaringan pemasaran. Dari sisi pemantauan usaha terdapat 5 kelompok yang usaha anggotanya tidak

terpantau, sedangkan sisanya berjumlah 28 kelompok PEW atau sekitar 89% merupakan kelompok yang selalu memantau usaha anggotanya.

e. Aspek pengakaran

Setelah anggota mendapat fasilitas penguatan modal diharapkan usahanya akan berkembang maju. Maka ketika banyak anggota yang usahanya semakin maju setelah bergabung dengan kelompok akan menjadi salah satu indikator bahwa kelompok PEW berhasil. Sehingga hal ini akan memotivasi anggota masyarakat yang lain tertarik ingin menjadi anggota kelompok PEW atau bahkan memotivasi sekelompok masyarakat yang lain untuk membentuk kelompok yang sama.

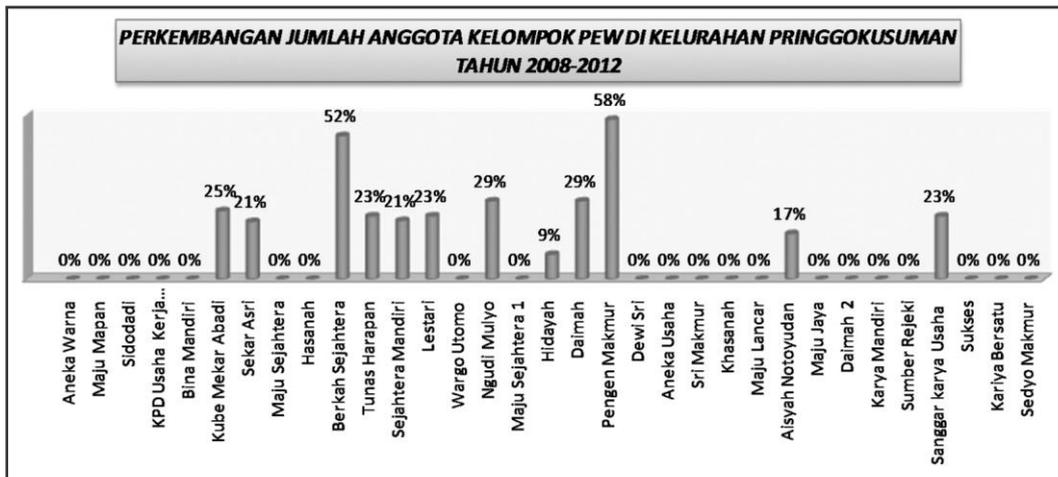
Tabel 7. Aspek Pengakaran

Aspek Pengakaran		
Pengakaran di Masyarakat	Jml Kelompok	%
a. Dikenal	4	12%
b. Dikenal dan diterima	15	45%
c. Anggota Masyarakat banyak yg ingin masuk	14	42%
	33	100%
Jaringan Kerjasama		
Jaringan Kerjasama	Jml Kelompok	%
a. Belum ada	7	21%
b. Sudah mulai dirintis	7	21%
c. Sudah ada jaringan kerjasama dengan pihak lain	19	58%
	33	100%

Sedangkan jika dilihat dari jaringan kerjasama, terdapat 7 kelompok yang belum mempunyai jaringan kerjasama, yang telah mulai merintis kerjasama ada 7 kelompok, dan yang sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan pihak lain sebanyak 19 kelompok atau sekitar 58%.

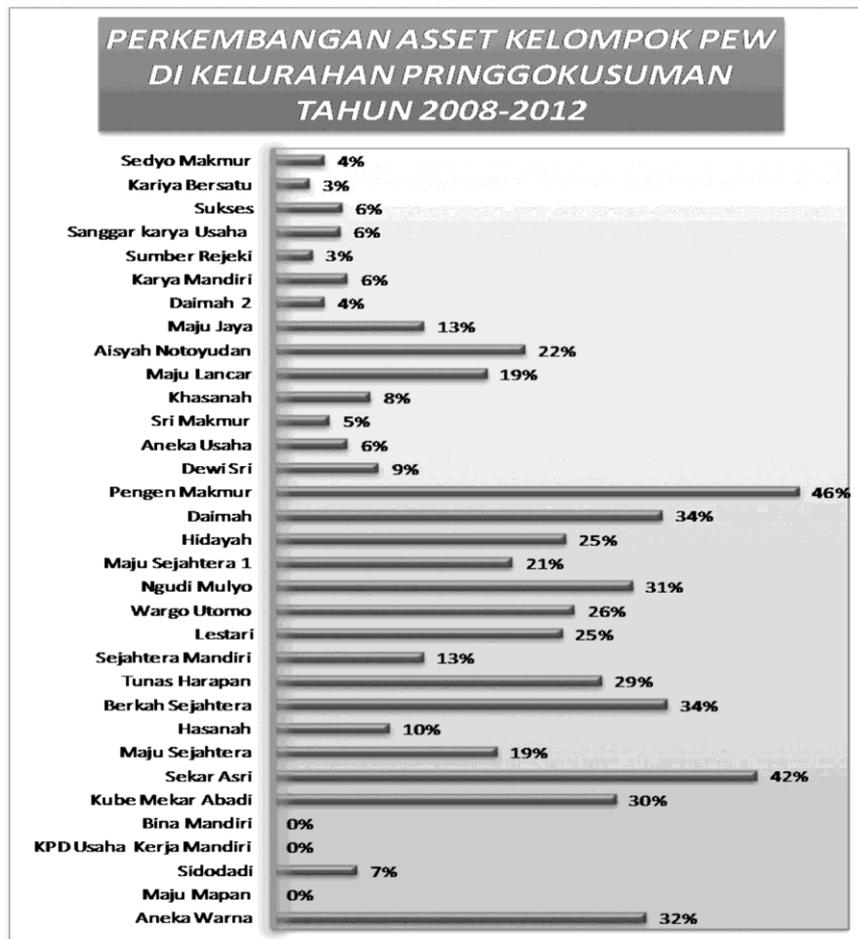
3. Evaluasi Kinerja Kelompok

Jika dilihat dari perkembangan Jumlah keanggotaan kelompok terdapat 21 kelompok penerima bantuan PEW yang tidak mengalami penambahan jumlah anggota, diantaranya adalah 5 kelompok yang telah menerima bantuan modal PEW tahun 2008.



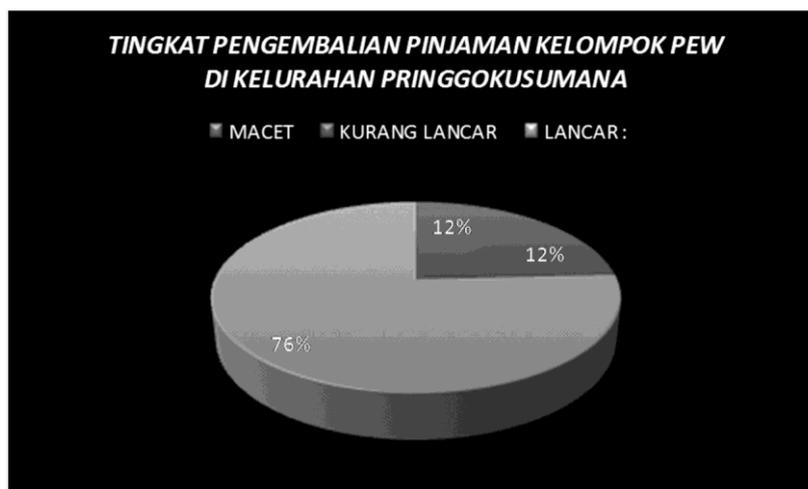
Gambar 5. Perkembangan Jumlah anggota

Perkembangan aset kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman dapat dilihat dalam gambar dibawah ini. Kelompok Pingin Makmur mengalami perkembangan aset 46 % atau sekitar Rp 8.412.800,00 sejak tahun 2010 , kemudian disusul oleh kelompok sekar asri sebesar 42 % atau sekitar Rp 7.261.683,00 sejak tahun 2009



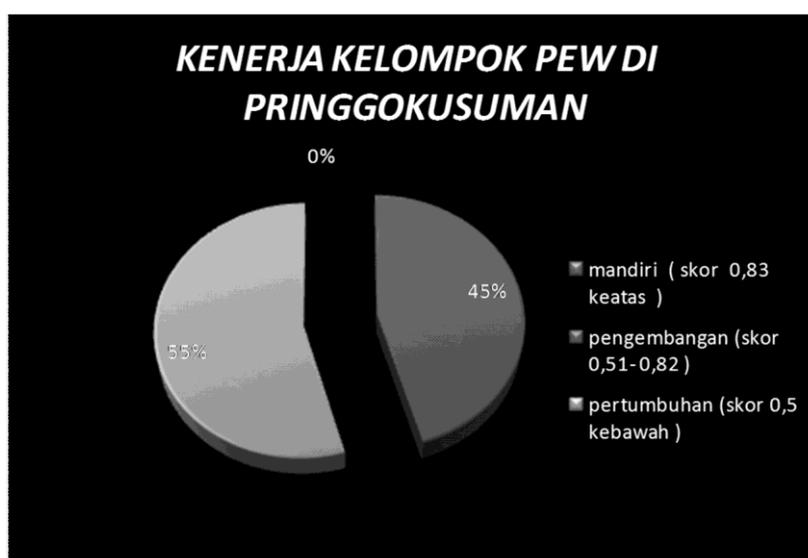
Gambar 6. Perkembangan Asset kelompok

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 33 kelompok yang menerima bantuan perguliran modal program PEW dari disperindagkoptan Kota Yogyakarta dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok sehingga berpotensi mengembangkan ekonomi lokal. Tingkat pengembalian pinjaman kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman 76 % (25 kelompok) tergolong lancar , 12% tergolong kurang lancar, dan terdapat 4 kelompok (12%) yang tergolong macet.



Gambar 7. Tingkat Pengembalian Pinjaman

Dilihat dari arah perkembangan kelompok berdasarkan kinerja aspek organisasi, administrasi, permodalan, usaha produksi dan pengakaran terdapat 18 (54,55%) kelompok yang termasuk dalam kategori pertumbuhan, dan 15 (45,45%) kelompok termasuk dalam kategori pengembangan, sedangkan kelompok yang masuk dalam kategori mandiri belum ada.



Gambar 8. Kinerja Kelompok PEW

4. Rumusan Program penguatan kapasitas

Rumusan Program penguatan kapasitas kelembagaan kelompok meliputi:

- a. Peningkatan Ketrampilan Usaha Ekonomis Produktif Anggota melalui:
 - 1) Menjalin kerjasama dengan instansi teknis
 - 2) Pelatihan usaha ekonomis produktif bagi anggota dan masyarakat
- b. Penguatan Norma Lembaga
 - 1) Mersiapkan bahan sosialisasi
 - 2) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
 - 3) Mengadakan Pertemuan rutin antar anggota, pengurus dan masyarakat
- c. Penataan Administrasi kelompok
 - 1) Menyusun Job Discription
 - 2) Mengadakan pelatihan guna meningkatkan Kemampuan/Kapasitas Pengurus
 - 3) Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok
 - 4) Melakukan perencanaan kegiatan yang partisipatif
- d. Peningkatan Modal Usaha dengan memperluas jaringan kerjasama,
 - 1) Menggalakkan kegiatan menabung
 - 2) Memberlakukan simpanan wajib
 - 3) Menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lain baik formal seperti bank ataupun swasta, BUMN dan instansi pemerintah.

V. KESIMPULAN

- a. Usaha mikro kecil yang berpotensi di kembangkan di wilayah Kelurahan Pringgokusumana adalah usaha kerajinan, usaha makanan tradisional, usaha warungan dan niaga. Usaha ekonomi tersebut mampu menopang perekonomian lokal di wilayah Kelurahan Pringgokusuman. Pengembangan usaha ekonomi tersebut perlu mendapatkan dukungan dari pemerintahan setempat dan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindagkoptan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan
- b. Dilihat dari arah perkembangan kelompok berdasarkan kinerja aspek organisasi, administrasi, permodalan, usaha produksi dan pengakaran terdapat 18 (54,55%) kelompok yang termasuk dalam kategori pertumbuhan, dan 15 (45,45%) kelompok termasuk dalam kategori pengembangan, sedangkan kelompok yang masuk dalam kategori mandiri belum ada.
- c. Kinerja Kelompok PEW di Wilayah Kelurahan Pringgokusuman di

pengaruhi oleh lemahnya manajemen lembaga yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota dalam pengelolaan usaha; keterbatasan modal yang dimiliki kelompok untuk memenuhi modal usaha anggota; kurangnya partisipasi kelompok dalam perencanaan program, monitoring dan evaluasi pada pengelolaan usaha anggota; kurang adanya kerjasama antara pengurus, anggota, tokoh masyarakat dan instansi terkait. Adapun akibat dari lemahnya manajemen pengelolaan Kelompok PEW tersebut adalah : masih terbatasnya akses permodalan dalam pengelolaan usaha , belum optimalnya usaha ekonomi produktif dalam jejaring pemasaran.

- d. Rumusan strategi dan program penguatan kapasitas kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal di wilayah kota Yogyakarta sesuai permasalahan yang telah teridentifikasi, melalui peningkatan kinerja pengurus dan peningkatan kesadaran seluruh anggota dalam membenahi manajemen pengelolaan usaha dengan cara :1). Penguatan economic capital, yaitu dengan meningkatkan modal lembaga melalui peningkatan iuran bulanan dan iuran kesejahteraan sosial, disamping mengupayakan usaha peningkatan usaha produktif anggota.2)Penguatan human capital, yaitu mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik bagi pengurus ataupun anggota dalam pengelolaan usaha dan pengembangan lembaga, baik dalam bentuk pelatihan kelembagaan, kewirausahaan dan perencanaan partisipatif, disamping perlunya melakukan studi banding untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, teknologi dan informasi pasar atau alternatif permodalan.3) Penguatan social capital, yaitu dengan kesadaran anggota untuk aktif dalam mengikuti pertemuan bulanan yang digunakan sebagai wadah untuk membangun kerekatan dan keterikatan antar seluruh anggota dengan menghasilkan tindakan bersama dan perilaku kerjasama yang diatur dengan norma yang disepakati bersama. Membuka jaringan kerja dan kemitraan dengan lembaga sejenis, untuk memperoleh dukungan, fasilitasi, pendampingan, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai sistem sumber untuk mengembangkan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi R. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran Pendekatan Praktis*. Jakarta. Lembaga Penerbit FE-UI.
- Cook, James B.1994,.*Community Development Theory*.*Community Development Publication MP568. Dept.of Community Development*.University Of Missouri-Columbia.
- Dahana, O.P. and O.P Bhatnagar,.1980,.*Education and Communication for Development*. New Dehli: Oxford & IBH Publishing CO.
- Gunardi, Agung, Sarwititi,S. Dan. Purwaningsih,N,. 2004. *Pengantar Pengembangan Masyarakat*. MPPM, IPB, Bogor.
- Haeruman dan Eriyatno. 2001,.*Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Jakarta, Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia.
- Hikmat, Harry,.2001.*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Perss, Bandung.
- Ife, Jim. 2002. *Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalizationd*, Pearson Education, Australia.
- Israel, Arturo, 1992, *Pengembangan Kelembagaan*. LP3S.,Jakarta
- Kartasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* .Pustaka Cidesindo,Jakarta
- Nasdian & Utomo, 2004. *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*. jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.,Bogor.
- Mardikanto,Totok dan Poerwoko.S. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfa Beta , Bandung.
- Mikkelsen, Britha, 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mulyono, Mauzid. 1993.*Penerapan Produktivitas dalam Organisasi*. Bumi Aksara ,Jakarta.
- Purwadarminta. WJS.1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rubin, Herbert dan Irene S. Rubin,.1992. *Community Organizing and Development*. Mac Milian Publishing Company, New York.
- Subejo dan Supriyanto. 2004. *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*., short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Suharto, Edy.2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Aditama,Bandung.
- Suharto, Edy. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta,Bandung.
- Sumarjo dan Saharudin.2004. *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Sumpeno, 2002. *Capacity Building, Persiapan dan Perencanaan*. Catholic Relief Services, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan.2003. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT Bina Rena Parawira,Jakarta.
- Sutarso. 2005. *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. BALATBANGSOS DEPSOS RI, Jakata.
- Sugiarto,D. 2006. *Penguatan kapasitas Lembaga Simpan Pinjam Rukun Lestari untuk pemberdayaan masyarakat miskin*, Tesis, Sekolah paskasarjana, IPB, Bogor
- Syahyuti.2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya Dalam Penelitian pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian Bogor.
- Syaukat, Yusman dan Hendrakusumaatmaja, S.2004. *Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Lokal*, MPPM, IPB, Bogor.
- Thoha, Miftah.2003 *Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi*. PT RajaGrafindo Persada,Jakarta.

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)/USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Vertasius Sanjaya Nugraha (esanug@yahoo.co.id)

DTPK Akademi Teknologi Kulit

ABSTRACT. *Growth of Informal Sector UKM / URT leather so far has been getting the attention of the government , but not enough attention is because it has not touched the substance of empowering UKM / URT as part of the global economic system . This is because coordination , focus and formulation of each department tends to rule out a profitable strategy UKM / URT but more nuanced political or business-oriented on the other side . Growth of SME / URT themselves usually stop at the base phase where after working through internships (replication) for a bold new step on their own (work Independently) goes directly compete and survive . This method is very common UKM / URT for this so that UKM / URT less have a comparative advantage , because it is still a single fighter for all matters both for the production , management , marketing , etc. in fact everything is done the traditional (manual , non- corporated) . Under these conditions, the role of government and business associations are expected to be suporting system is vital for UKM / URT , thus in the era of regional autonomy of local governments should empower UKM / URT as the main pillars of the regional economy . The role of business associations are not limited to the expected orientation solely capital adequacy but also to think of innovation , improvement of production systems , design , quality control , management , marketing systems , as well as having a dual role that regulate the production and marketing systems , including the progressively explore marketing . Until this approach is necessary as a form of cultural and structural dynamics of society from an agrarian society to a modern society that direction must inevitably be faced by society as a whole is not denied even occur in all sectors of development.*

Keywords : UKM , activity , competitiveness , part of the global economic system , the role of government and associations .

I. PENDAHULUAN

Ketangguhan sektor informal UKM/URT sebagai motor penggerak ekonomi telah dibuktikan pada saat Negara Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997, namun ketangguhan dalam bersaing di pasar global masih perlu dipertanyakan. Alasan kuat keraguan ini didasarkan pada lemahnya strategi yang dimiliki UKM/URT ternyata tidak banyak melakukan ekspansi pasar tetapi hanya sekedar bertahan hidup saja. Memang dari sisi jumlah pelaku UKM/URT cukup tersebar luas, namun perlu disadari bahwa banyak UKM/URT ini berangkat dari “nol” dalam segala aspeknya, baik sumber daya manusia, permodalan dan akses pasarnya. Fenomena UKM/URT yang merupakan sektor informal yang paling populer yang mudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ketimbang mereka harus bekerja di sektor formal yang menuntut persyaratan yang ketat, sehingga sektor informal UKM/URT menjadi idola karena memberi banyak kemudahan untuk dapat dikerjakan sendiri. Salah satu sektor informal tersebut adalah UKM Kerajinan kulit dan diversitasnya yang ada di Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Bantul pada khususnya.

Perkembangan sektor kerajinan ini menempatkan UKM/URT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai peluang bisnis yang menarik karena mencitrakan entitas budaya, pariwisata dan pendidikan apalagi ditunjang dengan aset sejarah, aset budaya yang sangat khas sebagai daya tarik pariwisata yang pada akhirnya akan membawa dampak bagi perekonomian masyarakatnya. Salah satu UKM/URT Kerajinan kulit dan diversitasnya yang berkontribusi terhadap entitas budaya ini cukup mampu mengangkat aksesoris budaya dimana saat ini eksplorasinya berhenti dan menyisakan benda budaya yang terkadang dicari keunikannya. Sementara masyarakat lokal cenderung tidak begitu tertarik lagi mengapresiasi prosesi budaya wayang kulit walaupun tradisi budaya tersebut sarat nilai adiluhung yang sebenarnya mampu membendung kebudayaan asing bila dilihat sebagai kohesi sosial. Dengan demikian maka praktis apresiasi budaya menjadi terhenti karena ruang dialektika yang ada sepi oleh tradisi kebudayaan yang lambat laun telah tergantikan oleh budaya baru yaitu budaya kapitalism. Semakin berkurangnya intensitas pertunjukan seni dan budaya tradisional telah menyurutkan perhatian masyarakat terhadap pesan atas nilai-nilai budaya yang disampaikan melalui makna simbolik dari tokoh perwayangan terutama wayang kulit. Pengaruh kapitalism sebagai bagian dari tradisi baru begitu mudah diadopsi oleh masyarakat sampai di pelosok negeri sehingga besar pengaruhnya terhadap eksistensi budaya lokal yang harus rela tergeser, terdistorsi kemajuan informasi dari belahan dunia yang lain sehingga eksistensinya menjadi sangat tergantung pada pengagum kebudayaan yang biasanya justru berasal dari kawasan lain. Mereka datang ke Yogyakarta untuk mengapresiasi budaya melalui benda kerajinan seperti halnya wayang kulit tetapi masyarakat lokal sendiri belum

tentu mau mengapresiasinya. Disini dibutuhkan solusi untuk mencitrakan kembali budaya lokal sebagai identitas budaya yang dapat dibanggakan sebagai produksi pasar seni budaya yang harus bersanding dengan budaya modern untuk dapat saling bersinergi.

Keunggulan daya saing UKM/URT Yogyakarta seolah terpatahkan bilamana melihat aspek sumber daya manusia, aspek pengelolaan, perangkat produksi dan penguasaan akses pasarnya karena pengaruh budaya lokal disalah asumsikan telah melemahkan kreatifitas bila diukur dari rendahnya inovasi dan mentalitas pelaku bisnis yang masif. Hal ini akan tampak jelas bila kita masuk dalam sistem pengelolaan usaha di sektor kerajinan wayang kulit yang banyak ditekuni oleh masyarakat Bantul yang merupakan klaster skala Usaha kecil menengah (UKM) atau usaha rumah tangga (URT) banyak yang tidak berbadan hukum dan perangkat kerjanya seadanya. Padahal kerajinan semacam ini merupakan salah satu komoditi yang dapat dijadikan andalan pemasaran domestik maupun pemasaran di Luar negeri. Namun secara umum sistem pengelolaan jenis kerajinan ini masih dilakukan secara *single fighter*, manual, tradisional yang tentu saja memiliki banyak sekali kelemahan, dari sisi design, kualitas pengerjaan, pengepakan dan cara pemasarannya relatif masih dilakukan secara monoton, artinya belum bersentuhan dengan teknologi sehingga kapasitas produksi dan akses pasarnya relatif terbatas.

Kegiatan pemberdayaan UKM/URT kerajinan kulit sebaiknya dilakukan melalui reorientasi peran pemerintah untuk melepas unsur kepentingan politisnya tetapi perlu mengutamakan proses kesiapan sebagai bagian dari sistem perekonomian global. Begitu juga penguatan komunitas ini perlu dilakukan dengan memberdayakan asosiasi UKM/URT sebagai wadah perekonomian milik bersama. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan strategi pengembangan UKM/URT melalui sistem perekonomian global dan bagaimana merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam pemberdayaan UKM dan URT disektor kerajinan di Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata.

Hal mendasar mengenai pertumbuhan dan perkembangan UKM/URT di wilayah DIY yang dari waktu ke waktu sebenarnya tingkat pertumbuhan berjalan lambat, walau pemerintah melakukan banyak hal untuk memfasilitasi namun tidak banyak perubahan yang berarti. Permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh pelaku industri kecil adalah daya saing di pasar global tuntutan dan persyaratannya ketat sehingga hanya dapat dipenuhi bila mengandalkan sistem kerja yang baik terutama bagaimana menghadirkan diversitas yang kaya inovasi dengan kualitas yang lebih baik. Begitu juga dengan iklim persaingan ditingkat lokal terkadang diantara pelaku usaha itu sendiri saling mematikan, hal ini berakibat pada tidak ketidakmampuan UKM/URT untuk berkembang secara bertahap. Sementara untuk meningkat kejenjang tahapan berskala

industri besar terasa masih jauh dari harapan karena sumber daya manusia pelaku bisnis ini butuh penyesuaian kultur budaya yang baru guna mengedepankan spesialisasi kerja secara komplementer dan terorganisir sebagaimana layaknya skala industri yang kompetitif. Disini tentu disadari bahwa memang ada kendala mentalitas budaya masyarakat yang berlatar belakang agraris tentu harus dilakukan pelan-pelan menyesuaikan kearah pola budaya baru yang serba modern.

Begitu kompleksnya permasalahan pengembangan UKM/URT Kerajinan Kulit di Wilayah Bantul ini, sehingga diharapkan suatu kegiatan perbaikan kedalam atau internal ship untuk mampu menjawab tantangan tersebut melalui reorientasi peran pemerintah terutama melalui regulasi kebijakan serta koordinasi yang lebih baik serta menempatkan peran assosiasi usaha sebagai suporting sistem sekaligus wadah perekonomian masyarakat. Diharapkan strategi ini mampu memberdayakan pelaku usaha UKM/URT kerajinan sebagai bagian dari sistem perekonomian global.

II. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, maka strategi pengembangan UKM/URT, perlu dilakukan secara holistik mulai dari regulasi kebijakan untuk penyempurnaan mekanisme cara kerja sebelumnya guna membangun kesiapan masyarakat yang merupakan faktor penentu kemandirian UKM/URT. Sudah barang tentu pendekatan secara terintegrasi semacam ini dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kelemahan UKM/URT selama ini seperti ditegaskan oleh Anas Hidayat (1994) dimana ada beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam :

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola perseorangan yang merangkap sebagai pemilik, pengelola perusahaan dan memasarkan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.
4. Menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri dan jasa.

Mempertegas pendapat tersebut maka jumlah UKM/URT dalam masyarakat bila tidak mendapatkan iklim usaha, perbaikan cara kerja, dan perluasan akses maka belum tentu berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan keinginan besar masyarakat telah ditunjukkan dengan partisipasi yang besar, namun strategi pemberdayaan, perlindungan dan penguatan UKM/URT belumlah memadai. Kebiasaan pelaku UKM/URT bekerja atas dasar pesanan perlu dirubah dengan ekspansi secara progresif melalui diversity produk kerajinan yang bernilai artistik maupun multifungsi untuk membuka akses pemasaran domestik dan internasional, karena terindikasi banyak UKM/URT di Yogyakarta yang tidak mampu melakukan ekspor langsung tetapi harus melalui perantara/broker yang bertindak sebagai agen ekspor. Praktek bisnis hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir secara tersistematisasi. Dalam fase ini memerlukan suatu perjuangan yang besar dalam penyesuaian budaya baru sehingga tercipta suasana kerja yang memadukan kultur budaya lokal dan kultur budaya baru yang perlu dilakukan secara gradual dari pola pengelolaan usaha perseorangan ke arah aliansi usaha gabungan atau corporate sebagai wadah perekonomian yang tangguh. Dalam melakukan identifikasi serta mengkaji kemampuan SDM UKM/URT kerajinan wayang kulit dan peran asosiasi terhadap daya saing pemasarannya di Kabupaten Bantul Yogyakarta hal ini memakai pendekatan personal dan organisasional terhadap pelaku usaha kerajinan wayang kulit. Perbedaan lokasi dan sebaran pelaku usaha jenis ini terkonsentrasi di beberapa titik di wilayah bantul terbagi dalam dua wilayah yaitu di Wilayah Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Bagan hubungan seluruh aspek yang dihadapi UKM/URT kerajinan dalam hal ini sangat terkait dengan peran pemerintah dalam hal regulasi kebijakan yang belum memberi iklim usaha yang baik, peran asosiasi usaha yang masif, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha atau UKM/URT. Tampak nyata bahwa ketiga peran tersebut belum kelihatan menonjol sehingga permasalahan yang mengemuka lebih berkaitan dengan lemahnya peran UKM/URT yang meliputi proses produksi, desain, instrumen produksi, kontrol kualitas, sistem pemasaran dan transaksi semuanya dapat diketahui secara pasti. Penulis berusaha menjelaskan realitas peranan yang sudah dilakukan berbagai pihak terhadap UKM/URT tersebut melalui bagan sebagai berikut :

Bagan 1.

Interelasi UKM/URT, Pemerintah dan Asosiasi Usaha



Sedangkan pemetaan permasalahan yang dihadapi UKM/URT yang berada di tiga lokasi yang berbeda ini, pada prinsipnya tidak menjadi masalah karena keduanya memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda. Antara desa kerajinan Wukirsari, Kecamatan Imogiri memiliki kemiripan dengan desa kerajinan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan masih merupakan satu wilayah di Kabupaten Bantul dan desa kerajinan Manding, Sabdodadi. Ketiga wilayah ini dianggap mewakili sentra produksi kerajinan kulit yang diawetkan untuk digarap secara artistik sebagai ikon kebudayaan. permasalahan yang menjadi kendala dalam menjalankan bisnis ini secara umum sebenarnya lebih didominasi oleh faktor mentalitas yang tidak berani mengambil sikap tegas dalam sistem perencanaan bisnis, pola kebiasaan yang menganut pada naluri bisnis yang cepat puas dan cukup apa adanya. Dengan demikian dalam menjalankan bisnis ini seolah tanpa target sehingga sulit untuk melakukan ekspansi dan menetrasi pasar sehingga menyebabkan stagnasi dalam pencapaian usaha.

Dalam prakteknya UKM/URT kerajinan kulit sejauh ini lebih banyak mengandalkan naluri bisnis daripada sistem perencanaan yang matang. Selain faktor budaya di sisi lain ada faktor sumber daya manusianya juga kurang mendukung pola warisan bisnis keluarga atau family company sebagai celah bisnis yang menjanjikan, karena di desa tersebut justru pendidikan anak-anak mereka di luar jurusan yang telah digeluti oleh keluarganya. Begitu juga dengan sisi keterlibatan perguruan tinggi terhadap inovasi dan pengembangan usaha UKM/URT memiliki hubungan yang rendah juga masih perlu dibutuhkan untuk memandu agar UKM/URT ini mampu menempatkan diri secara optimal. Walaupun aspek mental, pendidikan dan peran perguruan tinggi tersebut memiliki hubungan

yang rendah terhadap keberhasilan usaha mereka namun peran ini sangat dibutuhkan. Dalam memetakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh UKM/URT guna membangun strategi internalship UKM/URT dalam hal ini maka dapat dipaparkan melalui bagan sebagai berikut :

Bagan 2.
Pemetaan Kebutuhan Dasar UKM/URT



Dengan memperhatikan konteks permasalahan yang dihadapi oleh UKM/URT maka diharapkan sistem pengelolaan UKM/URT yang dapat berjalan secara optimal terutama dapat meningkatkan produktifitas dalam segala aspeknya, baik produktifitas dalam inovasi, produksi yang menyerap tenaga kerja, pengelolaan dan perluasan akses pemasaran ini maka akan menjadi lebih efisien. Memperhatikan potensi sumberdaya dan posisi strategis Indonesia dalam hubungan perdagangan nasional dan internasional, semestinya efisiensi mestinya jauh lebih penting. Di sini dituntut perlunya perbaikan iklim usaha atau internalship dalam pengembangan dunia usaha di Indonesia. Dengan demikian maka akan menambah kemampuan daya saing, proses produksi, desain, kontrol kualitas, transparansi, inovasi dan perluasan akses informasi pemasaran yang menunjang dan mampu mengikuti trend global. Dengan demikian maka dibutuhkan pendekatan lebih dari sekedar fasilitasi menjadi mediasi dalam peningkatan performs UKM/URT yang efisien melalui regulasi kebijakan baik dalam kerangka internalship dalam berbagai hal yang terkait dengan strategi pengembangan UKM/URT.

UKM/URT sebagai kelompok usaha dengan jumlah terbesar dalam struktur dunia usaha yang ada di Indonesia, idealnya dapat berperan dominan dalam berbagai aspek perekonomian. Namun kenyataan menunjukkan bahwa UKM/URT dibangun oleh para pengusaha kecil ini memiliki aset

terbatas, kemampuan bisnis terbatas dan jaringan usaha yang tidak begitu memadai. UMKM lebih sering menjadi kelompok yang termarginalkan terlebih lagi bila kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mengejar angka pertumbuhan, yang mengarah pada kegiatan-kegiatan padat modal. Salah satu persiapan yang perlu mendapat perhatian adalah perbaikan produktifitas UMKM dengan penerapan teknologi khususnya teknologi tepat guna yang tetap dapat mempertahankan kriteria UMKM sebagai kelompok usaha yang bersifat padat karya. Faktor lainnya yang juga perlu dikembangkan dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang akan semakin ketat adalah pembentukan jaringan usaha yang harus dibangun melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi usaha. Kemampuan internalship UKM/URT dapat dilakukan bila kelompok ini memiliki kekuatan sumberdaya manusia, akses permodalan dan penguasaan akses informasi. Sedangkan dari aspek eksternal lingkungan ekonomi dan politik sebenarnya tidak akan menjadi alasan karena sektor ini sebenarnya mampu memainkan peran sebagai penggerak utama ekonomi.

Internalship dapat dilakukan dengan pengenalan konsepsi ke arah pengembangan penguasaan informasi dan pengembangan teknologi produksi juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Kegiatan untuk membantu mengembangkan informasi dan jaringan usaha pemerintah harus memperkenalkan konsep sentra dan kluster bisnis sedangkan untuk pengembangan teknologi produksi pemerintah telah mensosialisasikan berbagai teknologi tepat guna. Memang apa-apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut hanya bersifat stimulan dan diharapkan UKM/URT dapat mengembangkannya sendiri, sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing. Sebagai kegiatan stimulan, program-program pemerintah idealnya dilakukan dalam perspektif yang luas dan terpadu. Kebijakan pemberdayaan UKM/URT harus dalam cakupan lebih luas daripada sekedar membuat daftar program-program dukungan finansial dan teknis yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara satu dengan yang lain. Pemberdayaan kearah efektifitas, regulasi kebijakan pemberdayaan UKM/URT memang diperlukan melalui konsepsi jelas yang dibangun berdasarkan suatu kajian yang komprehensif, terutama menyangkut reorientasi peran pemerintah dalam banyak aspek. Kapasitas pemerintah dalam hal ini adalah perlu menekankan pembangunan iklim usaha yang baik. Demikian juga butuh penekanan pemahaman pra kondisi dasar manajemen yang sehat, peraturan perundangan investasi dalam layanan sosial yang mendasar, infrastuktur, permodalan dan sumber daya manusianya. Maka langkah-langkah khusus untuk mempromosikan usaha di Indonesia hanya akan merupakan hal yang semu saja.

Sedangkan aspek regulasi kebijakan perlu diarahkan untuk perluasan akses UKM/URT dalam hal kemudahan akses permodalan, biaya transaksi dan administrasi, serta keamanan bisnisnya. Disamping itu perlu adanya

peningkatan perhatian pada standarisasi dan sertifikasi sebagai pendorong keterbukaan pasar dan keamanan konsumen, sekaligus stimulasi persaingan dan pengurangan biaya transaksi dan resiko usaha. Regulasi kebijakan semestinya komprehensif untuk dapat dikoordinasikan dengan baik termasuk didalamnya adalah mengatur peran lembaga keuangan dimana Bank Indonesia perlu menerapkan standar supervise terhadap lembaga dan jasa keuangan karena selama ini program insentif pemberdayaan UKM/URT tidak hanya dilakukan oleh satu departemen.

Pengalaman umum di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan bahwa dukungan pelayanan langsung kepada usaha mikro oleh pemerintah adalah kurang baik, Indonesia telah memperkenalkan beberapa skema layanan usaha mikro, termasuk kredit subsidi, pendampingan teknis dan kewajiban melakukan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Namun demikian, skema layanan tersebut termasuk kurang berhasil karena internalship untuk merekonstruksi kultur, sistem kerja, peningkatan sumber daya manusia dan akses informasi tidak dilakukan secara optimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya UKM/URT kulit di wilayah Kabupaten Bantul masih berada pada cluster rendah baik dari skala jumah produksi, teknologi, sumber daya manusia, permodalan, penguasaan akses informasi pasar. Eksplorasi permasalahan UKM/URT Industri kulit Dusun Manding, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul ini secara umum warga mengemukakan bahwa pekerjaan di sektor ini banyak mengalami masalah ditingkat internal pengusaha sendiri. Mereka berada dalam posisi tidak mengetahui bagaimana pasang surutnya trend pasar global bahkan untuk trend pasar lokal mereka hanya berpatokan pada hari libur panjang biasanya banyak wisatawan yang datang ke tempat usaha mereka.

Demikian halnya dengan akses pasar mereka selama ini justru datang dari pedagang perantara di Bali yang tidak menutup kemungkinan barang tersebut kemudian dieksport ke luar negeri. Pengusaha di sini cukup berfikir sederhana bagaimana mereka dapat bertahan dan menjaga kelangsungan usaha mereka. Walaupun sektor usaha ini merupakan warisan generasi sebelumnya tetapi mereka sendiri selama ini bertahan dengan mengganti perlengkapan usahanya yang rusak agar produksi usahanya dapat lancar, tetapi mereka tidak berupaya untuk mengganti peralatan produksi mereka dengan teknologi yang baru. Memang secara ekonomis usaha rakyat di wilayah ini cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Sarjimin, sejarah perjalanan kerajinan kulit didesa manding dipelopori tiga pemuda pada tahun 1947 yaitu Prapto Sudarmo, Ratno

Suharjo dan Wardi Utomo. Mereka semula bekerja di perusahaan kulit di Kota Yogyakarta yang memproduksi pakaian, pelana kuda. Kemudian mereka berani mendirikan usaha sendiri untuk produksi tas, jaket dan sebagainya. Saat ini, di Manding ada 75 pengrajin kulit mereka melakukan diversifikasi usaha yang memadukan bahan baku lain seperti serat alam pandan, mendong, enceng gondok, age) dan lidi. Aneka Kerajinan Berbahan dasar kulit yang bisa didapatkan dari Manding antara lain tas kulit, kipas, souvenir pernikahan, dompet, kap lampu, sepatu, gantungan kunci dan lain sebagainya.

Memang diakui bahwa usaha di wilayah ini mengalami pasang surut namun disaat permintaan meningkat maka kegiatan ekonomi produktif ini juga menggeliat, mereka berusaha mengembangkan promosi usahanya dalam bentuk penataan ruang penyajian atau showroom yang dimiliki oleh hampir semua pengrajin. Disisi lain perkembangan usaha ini bahkan tidak terbatas di wilayah mereka saja, tetapi juga ditempat lokasi pasar lain yang disediakan oleh pemerintah terutama di Pasar Seni Gabusan maupun pihak swasta di Gerai Mall di wilayah Jogjakarta, Jakarta, Bali dst.

Pertumbuhan UKM/URT sentra kerajinan kulit yang terus bertumbuh semakin dikenal luas sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditandai oleh geliat ekonomi diluar sektor industri kulit yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Begitu besarnya perhatian pemerintah melalui berbagai program insentif bagi UKM/URT maupun pihak swasta yang telah ikut mengembangkan investasinya di wilayah ini, namun fluktuasi usaha tersebut lambat laun mengalami penurunan permintaan juga. Setelah ditelusuri bahwa memang mereka memiliki banyak kelemahan dalam menjalankan sektor usaha ini. Mulai dari ketidaktahuan dalam mengikuti informasi perubahan trend pasar global, cara menjaga kualitas, sistem produksi atau cara kerja, lemahnya inovasi atau desain, lemahnya sistem pengelolaan usaha, lemahnya asosiasi usaha, lemahnya kemitraan, lemahnya proteksi usaha, lemahnya sistem permodalan, lemahnya pengembangan jaringan investasi dan jaringan pemasaran. Sejauh ini peranan asosiasi masih belum dianggap memadai karena peranan asosiasi lebih sebagai wadah pengrajin tetapi peranan asosiasi untuk melindungi, mengontrol dan mengembangkan belum begitu dapat diandalkan atau lebih tepatnya baru sebatas memenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk menjawab suatu kebutuhan yang dirasakan anggota. Begitu kompleksnya kelemahan tersebut namun secara umum lebih mengarah pada lemahnya internalship kelemahan sumber daya manusia, penguasaan akses, inovasi dan pola budaya masyarakatnya.

Pertumbuhan UKM/URT di Kawasan Dusun Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul juga mengalami pasang surut. Sentra kerajinan kulit di wilayah ini belum semaju di wilayah Manding, hal ini disebabkan karena belum munculnya diversifikasi usaha karena masih memegang teguh tradisi

“pakem” karya seni yang masih dianggap berbeda dengan kerajinan biasa, disisi lain mereka juga tidak mengetahui dinamika trend pasar sehingga mereka tidak dapat memainkan peranan dalam sistem pasar. Pengrajin yang bergerak dibidang kerajinan wayang kulit ukir ini sampai sekarang hanya dapat bertahan saja. Sementara bila dilihat dari sumber daya manusia yang mumpuni di wilayah ini cukup banyak tenaga-tenaga terampil dan terasah dalam pembuatan wayang kulit yang sebenarnya sangat mungkin mengembangkan diversifikasi usaha. Ada sekitar 50 perajin yang aktif dalam bidang tatah sungging kulit yang terkumpul hampir di sepuluh sanggar sebelumnya pada tahun 1990-an, ada 110 perajin yang aktif membuat wayang dan puluhan anak muda yang belajar menatah. Perlu diketahui, tahapan-tahapan pemuatan sebuah Wayang Kulit meliputi penyiapan kulit yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan wayang : membuat corekan, yakni semacam sketsa bentuk gambar tokoh wayang yang akan dibuat; menatah wayang; menyungging wayang; dan yang terakhir memasang cempurit. Peralatan standart pembuatan wayang terdiri dari Pandukan yaitu berupa landasan tatah yang terbuat dari kayu sambi, kayu trenggulun, atau kayu sawo yang berdiameter sekitar 35 sampai 40 cm itu dipotong melintang. Peralatan Tindih yaitu berupa logam seberat sekitar 2,5 kilogram yang terbuat dari kuningan. Tindih gunanya untuk menekan atau memberati kulit yang sedang ditatah. sehingga kulit itu tidak menggeser kesana kemari bila sedang dikerjakan. Peralatan Tatah yaitu paling sedikit harus tersedia 10 macam yang pada dasarnya terbagi atas dua golongan besar, yakni tatah lantah atau tatah lugas yang mata tatahnya berupa garis lurus, dan tatah kuku yang mata tatahnya berupa lengkungan. Peralatan Ganden yaitu berupa palu besar terbuat dari kayu asem atau sawo Selain peralatan pokok di atas, ada beberapa peralatan tambahan berupa jangka, paku corekan, pensil jenis 2 H, mistar atau penggaris, penghapus, batu asahan, dll. Sedangkan bahan kulit wayang kulit terbuat dari kulit hewan biasanya Sapi, Lembu, Kambing dan sebagainya.

Sedangkan jenis tatahan dalam seni kriya wayang kulit purwa, setidaknya ada 16 macam jenis tatahan. Masing-masing jenis tatahan itu diperuntukkan bagi pembuatan ornamen tertentu, pada bagian tubuh wayang tertentu pula misalnya untuk membentuk jenis-jenis tatahan pada seni kriya wayang kulit purwa gagrak Surakarta maupun yogyakarta. Motif yang dipakai terdiri dari motif “tratasan” fungsinya untuk membuat pola semacam garis, baik garis lurus maupun yang melengkung lebar dan menyudut. Tatahan tratasan hampir selalu diselang-seling dengan tatahan bubukan, dengan maksud agar kulit di bagian yang ditatah itu tidak mudah patah atau robek. Motif tatah Bubukan berupa lubang-lubang kecil berderet, yang digunakan untuk membuat kesan gambaran garis. Biasanya tatahan bubukan diseling dengan tatahan tratasan. Tatahan berseling antara tratasan dengan bubukan ini juga disebut tatahan lajuran atau tatahan lajur saja. Motif tatah “untu walang”, berupa garis-garis terputus

dimana motif tataan ini lebih lembut daripada hasil tataan tratan. Alat yang digunakan untuk membuat tataan untu walang adalah tatan trenenan. Di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, tataan untu walang disebut tataan semut ulur. Motif tatan "Bubuk Iring" berupa lubang-lubang yang membentuk deretan seperti huruf U. Biasanya tataan ini digunakan untuk mengerjakan bagian wayang yang disebut ulur-ulur dan uncal kencana. Tataan ini juga sering disebut bubuk ring atau bubukan firing. Motif tataan "Kawatan" atau biasa disebut tataan gubahan biasanya digunakan untuk 'mengisi' sumping, bagian praba, dan gruda mungkur. Motif tataan "Mas-masan" bentuknya berupa deretan selang-seling antara titik dan koma, yang biasanya digunakan untuk mengerjakan bagian uncal kencana, sumping, gruda mungkur, kalung dan jamang. Motif tataan "Sumbulan" yang biasanya dikombinasikan dengan tataan mas-masan, digunakan untuk mengerjakan bagian kalung, jamang, dlsb. Motif tataan "Intan-intan" biasanya digunakan untuk 'mengisi' bagian sumping, berselang-seling dengan tataan kawatan. Bentuk tataan ini, yang juga disebut tataan intan-intanan, seperti bunga mekar, tetapi cuma separuh. Semua tataan peraga Wayang Kulit Purwa dianggap baik dan berhasil bilamana memenuhi syarat tertentu. Persyaratan itu disingkat dengan akronim Mawi Serekuh, yakni Mapan, Wijang, Semu, Resik, dan Kukuh. Selain syarat itu, ada lagi yang memberi syarat hampir serupa, yakni: Padang, Wijang, Ghukel, Resik, Semu, dan Wulet.

Proses pembuatan wayang ini sangat sederhana mereka selalu menjaga sifat keaslian dan cara tradisional dalam pemrosesan, pembuatan pola, penataan dan sunnging atau pewarnaan. Wayang kulit buatan Gendeng dikenal sebagai wayang kulit dengan kualitas yang bagus dan menjadi koleksi banyak kalangan, museum seni, toko seni, dhalang, dan kolektor dalam maupun luar negeri. Walaupun pemasarannya cukup luas namun sebenarnya UKM/URT diwilayah ini masih memiliki kendala dalam hal pemasaran yang sangat tergantung pada permintaan lokal dalam arti mereka untuk melakukan ekspor harus melalui perantara dan display pemasarannya juga masih sangat terbatas dan sederhana karena disatu sisi merupakan benda seni sehingga tidak bisa dijual bebas seperti halnya barang kebutuhan pokok, namun disisi lain mereka sendiri tidak pernah mengetahui bagaimana strategi pengembangan informasi dalam skala global terhadap usaha mereka tersebut.

Sanggar Sagio di Dusun Gendeng rata-rata hanya memproduksi 30 wayang setiap bulan. Sebagian wayang dibuat berdasarkan pesanan dalam negeri, sebagian lain dijual eceran dengan harga Rp 80.000 sampai Rp 750.000. Produktivitas itu jauh menurun daripada tahun 1980-an yang bisa membuat hingga ratusan wayang. Bahkan, tahun 1995, Sagio pernah pameran keliling negara-negara Eropa dan Asia.

Pengalaman Sahono (48) dalam hal pengerjaan sebenarnya sudah cukup memadai dalam menggores-goreskan jeruji besi lancip di atas kulit kerbau yang kering. Dengan cekatan membuat garis-garis skets wayang sudah begitu dihafalnya bahkan untuk berbagai jenis tokoh wayang karakternya sudah dikuasainya. Barno (44) sibuk menatah kulit dengan motif gunung yang rumit semuanya dapat dikerjakan dengan sempurna dengan proses pengerjaan menatah motif gunung itu diselesaikan dengan waktu yang relatif agak lama dibandingkan tokoh wayang yang lain. Sedangkan perajin lain bekerja mewarnai kulit yang telah tertatah, yang lain mengerjakan menggapit wayang dengan tanduk kerbau yang sudah diraut. Sagio (55) adalah sang pelopor di Dusun Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Pada saat ini komunitas pengrajin ini berjumlah 50 perajin wayang kulit yang tersisa di Desa Bangunjiwo.

Situasi serupa juga dialami para perajin wayang kulit di Dusun Pucung, Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul. Kerajinan wayang yang menjadi tradisi turun-temurun di dusun itu semakin surut produksinya. Jumlah pengrajin sebelumnya sekitar 250 pengrajin tetapi kini tinggal sekitar 50 perajin dalam kondisi yang kembang kempis karena sepi pesanan. Kondisi tersebut berubah setelah 2002 wisatawan asing enggan berkunjung lagi ke lokasi UKM/URT mereka padahal wisatawan asing tersebut mampu menyerap 75% dari jumlah produksi mereka, sehingga kini tinggal kisaran 25 persen saja yang banyak dipesan pasar lokal. Kondisi ini diperparah oleh berpalingnya generasi muda di dusun mereka untuk mewarisi usaha yang turun temurun ini. Mereka lebih memilih bekerja disektor manufaktur yang dianggap lebih menjanjikan kesejahteraan. Dengan demikian maka keahlian menatah wayang kulit yang turun-temurun itu akan pupus karena generasi baru yang meninggalkan warisan usaha orang tuanya. Mereka menganggap kerajinan terlalu rumit, butuh ketelatenan, dan proses belajarnya makan waktu bertahun-tahun dan secara ekonomis sudah tidak menjanjikan lagi.

Berangkat dari berbagai keterbatasan UKM/URT terutama lemahnya karakter SDM maka apa yang dapat diharapkan, tentu saja harus dilakukan perubahan melalui kegiatan yang holistik terutama pembenahan mekanisme kerja dan karakter SDM pelaku bisnis ini agar siap menjadi bagian dari sistem perekonomian global tanpa meninggalkan peran stake holdernya yaitu peran pemerintah dan peran asosiasi sebagai pilar ekonomi yang tangguh. Permasalahan pengelolaan pengembangan UKM/URT memang merupakan problem klasik yang seakan tidak ada habisnya, sehingga diharapkan melalui penataan sumber daya manusia dan penempatan UKM/URT sebagai bagian dari sistem perekonomian global maka iklim usaha ini dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Di sini membutuhkan keterpaduan berbagai pihak baik pelaku usaha sendiri, assosiasi, pemerintah, perbankan, dst dapat melakukan ekspansi pemasaran ditingkat global. Di sisi lain pelaku usaha atau UKM/URT juga

perlu mengembangkan sistem perencanaan produksi melalui desain dan inovasi, kontrol kualitas, pengelolaan usata secara terstruktur, penggunaan teknologi, pengelolaan keuangan sampai pembelanjaan dapat diselesaikan sendiri sebagai media pembelajaran masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha untuk belajar dari pengalaman keberhasilan sektor usaha yang lain. Dengan demikian keberhasilan sektor ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih kontributif dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata di Indonesia umumnya dan kota Yogyakarta khususnya. Kebutuhan akan pengembangan karakter semacam ini cukup dominan dan banyak diharapkan oleh pelaku bisnis UKM/URT kerajinan wayang kulit untuk mengatasi berbagai keterbatasan baik budaya, cara kerja, kebutuhan inovasi dan kemitraan dalam pengembangan bisnis yang tidak lagi hanya bertumpu pada peran manusia tetapi sudah seharusnya bertumpu pada sistem kerja yang lebih teratur. Kondisi ini sedikit berbeda dengan paradigma peranan pemerintah yang selama ini lebih menonjol dalam bentuk subsidi maupun dalam bentuk fasilitasi bantuan kredit yang penyerapan sesungguhnya belum tentu menyentuh UKM/URT. Strategi pembinaan industri kecil sejak lama dilakukan pemerintah yang dilaksanakan dalam kerangka industri kerajinan (INKRA) maupun yang mengalami dinamika tersendiri.

Sejarah pengembangan industri kecil dan UKM memang mengalami kerancuan sejak lahirnya UU 9/1995 tentang Usaha Kecil Menengah yang cakupannya menyeluruh (pertanian, industri dan jasa) tetapi instrument dan pembagiannya membingungkan (Noer Soetrisno, ISEI, 1996). Pasca reformasi telah dilakukan berbagai program insentif bagu UKM/URT namun tidak juga membuahkan suatu formulasi keberhasilan karena antar dinas koordinasinya kurang bagus. Kemudian setelah era otonomi daerah dibawah pemerintahan kabinet bersatu saat ini, pembinaan UKM/URT sudah mengarah pada pemberdayaan softskill dan hardskill, namun ternyata suporting sistem yang diberikan belum mampu menjawab kebutuhan bagaimana merubah karakter SDM UKM/URT sebagai pelaku bisnis yang tangguh sehingga diperlukan strategi pendekatan budaya seperti yang tereksplorasi permasalahan UKM/URT kerajinan ini. Budaya yang dimaksudkan disini lebih menunjuk pada internalship budaya kerja yang mampu diimplementasikan dalam sistem kerja UKM/URT. Di sisi lain walaupun produksi dari UKM/URT kerajinan selama ini lebih banyak diminati oleh pasar domestik maupun pasar internasional. Namun disisi lain sebaiknya disertai dengan pendekatan budaya dalam bentuk internalisasi nilai-nilai tradisional ke dalam sistem perekonomian global atau sebaliknya. Dengan demikian maka pencitraan memegang peranan penting juga sebagai salah satu strategi kebudayaan sebagai bentuk inkulturasi budaya juga perlu dilakukan sebagai bentuk intervensi budaya keluar supaya menjadi trend budaya dibelahan lain juga perlu dilakukan. Pertukaran budaya dalam era globalisasi ini tidak mustahil dilakukan

pertukaran budaya karena secara empiris masyarakat kita juga dengan mudah melakukan adopsi budaya baru yang seolah hampir tanpa batas lagi.

Kegiatan pemberdayaan UKM/URT harus diarahkan untuk meningkatkan cluster pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi banyak kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Menurut Simatupang dkk (1994) Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah:

1. Lemah dalam penguasaan akses pasar
2. Lemah dalam struktur akses permodalan
3. Lemah dalam tata organisasi dan manajemen sumber daya manusia
4. Lemah dalam akses jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil
5. Iklim usaha yang kurang baik karena persaingan yang saling mematikan
6. Pembinaan yang dilakukan kurang terpadu

Harus diakui bahwa cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh berbagai stake holder yang concern dalam pengembangan usaha kecil. Namun upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini justru pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak, di mana masing-masing instansi pembina maupun perbankan memiliki kepentingan yang berbeda sehingga pada gilirannya mengakibatkan arah pembinaan tidak efektif dan indikator keberhasilan yang tidak seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target sesuai kriteria yang mereka tetapkan sendiri. Hal ini bagi pengusaha kecil sering mengeluh karena satu program tidak selesai sudah disusul program yang lain yang semuanya tidak bisa menjawab permasalahan mereka secara langsung.

Kontribusi UKM/URT kerajinan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki dampak sosial ekonomi masyarakat yang dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen, 1984), yaitu dampak terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan control, dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Pengembangan UKM kerajinan memang mampu memberikan dampak positif, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha,

peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Pariwisata diharapkan mampu menghasilkan angka pengganda (multiplier effect) yang tinggi, melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun sulit melakukan penghitungan secara pasti terhadap angka pengganda ini, dari beberapa daerah/negara telah dilaporkan besarnya angka pengganda yang bervariasi. Namun juga hal ini tidak akan berarti juga manakala tidak ada upaya untuk mengembangkan daya saing yang lebih baik karena penetrasi pasar import jauh lebih kuat.

Era otonomi daerah semestinya kegiatan pemberdayaan UKM/URT kerajinan seharusnya ada koordinasi antar pemerintah daerah sehingga ada keterpaduan antara wilayah sebagai pemasok dan produksi kerajinan dan wilayah sebagai pusat pemasaran. Namun dalam kenyataan bentuk pendekatan ini tidak begitu terkoordinasikan dengan baik, karena muncul gejala terjadi tarik menarik untuk membuat wilayah pusat pemasaran antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kotamadia Yogyakarta. Bagaimana mungkin sentra-sentra kerajinan bersaing dengan Pasar Seni Gabusan yang juga harus berhadapan dengan XT Square maupun pasar kerajinan di Prambanan. Strategi seperti ini sepertinya dipaksakan sementara kelemahan mendasar UKM/URT justru pada persoalan internalship organisasionalnya sebagai prasyarat kesiapan memasuki bagian dari sistem perekonomian global.

Budaya global memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup disekitar kita, untuk itu disadari akan mengakibatkan pola sistem kerja serta produktifitas masyarakatnya, maka yang harus dipersiapkan adalah kesadaran bahwa sebenarnya penetrasi budaya asing tidak akan menjadi masalah bilamana kita siap menghadapinya. Dinamika perubahan memang terasa dan banyak diassumsikan masyarakat kita mengarah pada sifat destruktif terutama mada budaya indigenous dimana perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri yang carat dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, a consumer-oriented economy, dan jet-age lifestyles. Asumsi tersebut menyiratkan bahwa di dalam melihat dampak social-budaya terhadap masyarakat setempat sebagai suatu ancaman. Padahal asumsi ini tidak sepenuhnya benar dan bahkan mempunyai banyak kelemahan, sebagaimana dikemukakan oleh Wood (1984).

Dalam hal ini tersirat juga asumsi bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang spesifik itu diam, tidur, atau pasif, dan seolah-olah kebudayaan merupakan sesuatu yang homogen. Pendekatan seperti ini mengingkari dinamika masyarakat dimana globalisasi sebenarnya sudah merasuk sehingga tidak mampu melihat berbagai respons aktif masyarakat terhadap perubahan global. Wood selanjutnya menganjurkan, di dalam melihat

pengaruh globalisasi terhadap budaya masyarakat lokal, harus disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdeferensiasi, aktif, dan selalu berubah. Oleh karena itu pendekatan yang kiranya lebih realistik adalah dengan menganggap bahwa globalisasi adalah 'pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat', dimana masyarakat mengalami proses menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kebudayaan baru atau istilah penulis culturification yang menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di dalam masyarakat (Wood, 1984).

Kebudayaan memang selalu beradaptasi, termasuk dalam menghadapi globalisasi, dan di dalam proses tersebut tidak berarti makna atau otentisitas otomatis hilang. Akulturasi merupakan proses yang wajar dalam setiap pertemuan antar budaya. Disisi lain memang banyak juga kekhawatiran terjadinya proses kehilangan otentisitas budaya lokal sebagai akibat lemahnya filtrasi budaya (Urry, 1990).

Kecurigaan masyarakat bahwa globalisasi dapat merusak atau 'menghancurkan' sistem kebudayaan lokal, serta 'memaksa' sistem kebudayaan lokal untuk tunduk pada tuntutan global. Pendapat ini cukup menarik sebagaimana disampaikan oleh Britton (1977): 'Cultural expression are bastardized in order to be more comprehensible and therefore saleable to mass tourism' (Britton, 1977: 272).

Berdasarkan temuan-temuan selama eksplorasi kegiatan pemberdayaan UKM/URT kerajinan di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pembenahan kedalam atau internalship dapat dipakai sebagai strategi pemberdayaan UKM/URT harus dilakukan melalui strategi kebudayaan. Bentuk dari strategi pemberdayaan UKM/URT ini dilakukan melalui internalship yang mampu mengubah segalanya menjadi lebih baik. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih baik terutama mengenai peranan pemerintah dan peranan asosiasi sebagai bentuk metamorfose budaya kerja yang terstruktur. Disisi lain hal ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan itu sedang menuju pencerahan (enlightenment).

IV. KESIMPULAN

Sudah terbukti bahwa pertumbuhan UKM/URT memiliki kontribusi yang begitu besar bagi ketahanan perekonomian nasional, namun secara khusus perhatian dan pengembangan UKM/URT tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional tetapi butuh pendekatan lain yang sesuai dengan konteks kebutuhan pengembangan UKM/URT yang dilakukan secara bertahap dan sifatnya tidak general tetapi spesifik karena tergantung dari budaya setempat dan konteks permasalahan yang muncul ditingkat lokal.

Sudah terbukti bahwa pemerintah memiliki peranan yang central tetapi

juga tidak bisa seluruh urusan UKM/URT menjadi urusan pemerintah saja atau sebaliknya tidak bisa urusan UKM/URT harus diselesaikan sendiri dengan melihat terbatasnya peranan asosiasi. Dengan demikian maka harus dilakukan strategi pemberdayaan yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut menjadi suatu keunggulan komparatif.

Sudah terbukti bahwa pendekatan budaya tidak hanya dilihat dari kacamata yang sempit tetapi sudah saatnya dilakukan suatu terobosan bahwa budaya juga memiliki kelebihan untuk dikembangkan untuk mengubah pola perilaku dan kebiasaan. Dengan demikian maka inkulturasi budaya sebaiknya diarahkan sebagai bentuk pemberdayaan yang diarahkan untuk internalship bukan dalam kapasitasnya sebagai gaga hidup tetapi dikembangkan menjadi suatu kebutuhan nyata supaya memiliki produktifitas, daya saing dan persiapan menuju kearah bagian dari sistem perekonomian global. Karena disadari bahwa UKM/URT memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri yang dapat diandalkan karena mampu melakukan transaksi domestik dan antar negara.

Paling tidak dari penulisan ini akan bermuara kearah internalship (pembenahan kedalam) kearah perbaikan Iklim Usaha, perubahan sistem kerja, memantapkan asosiasi, kerjasama antar pemerintah daerah dalam perluasan akses pasar, pencitraan dan kemitraan, meningkatkan daya saing dan perlindungan usaha yang memadai sebagai bagian dari sistem perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito (1994), "*Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat*", makalah dalam Seminar Nasional "Mencari Keseimbangan Antara Konglomerat dan Pengusaha Kecil-Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Strategi", Dies Natalis STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, 30 April.
- Bachruddin, Zaenal, Mudrajad Kuncoro, Budi Prasetyo Widyobroto, Tridjoko Wisnu Murti, Zuprizal, Ismoyo (1996), *Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil*, LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
- BPS. (1999). *Statistical Yearbook of Indonesia 1998*. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Hidayat, Anas (1994), "Analisis Perkembangan Industri kecil Berdasarkan Penyusunan Indeks Produktivitas dan Tingkat Efisiensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi*, vol.3, Juni, h. 36-51.
- Kuncoro, Mudrajad (2000a), *The Economics of Industrial Agglomeration and Clustering, 1976-1996: the Case of Indonesia (Java)*, disertasi Ph.D, Department of Management, University of Melbourne, Melbourne, tidak dipublikasikan.
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggito Abimanyu (1995), "*Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi*", *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, no.10/IV/1995.
- Simatupang, Pantjar, M.H. Togatorop, Rudy P. Sitompul, Tulus Tambunan (eds.) (1994), *Prosiding Seminar Nasional Peranan Strategic Industri Kecil dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, UKI-Press, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman (1995), "*Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan: Suatu Tinjauan Sosiologis*", makalah dalam Diskusi Ekonomi Kerakyatan, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 Agustus.
- Sudisman, U., & Sari, A. (1996). *Undang-Undang Usaha kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo.
- Sumodiningrat, Gunawan (1994), "*Tantangan dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil*", *Jurnal Tahunan CIDES*, no. 1, h.157-164.
- Sutrisno, J dan Hs, SL, 2004, "Kajian Usaha Mikro Indonesia", *Jurnal pengkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1*, Hasil kajian deputi bidang pengkajian sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Gunatama Megah Business and Management Consultant.
- Triyono dan Aedah, S, 2004, "Pengkajian Pemusatan Pengembangan Koperasi Bidang Pembiayaan Pada Tingkat Kabupaten/Kota", *Jurnal pengkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1*, Hasil kajian deputi bidang

penkajian sumberdaya UKMK bekerjasama dengan pengembangan pengelolaan Wirausaha-Universitas Indonesia (BPPWI-UI).

- Ali,S,2006," Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Industri Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ", *Jurnal penkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1*, Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKMIVIII/2006, Jakarta.
- Anonim, (2006). *The Indonesia Business Forecast Report*. Business Monitor International , Ltd Q3 2006.
- Besanko, David, David Dranove, and Mark Shanley, (1995). *Economics of Strategy* .
- Wiley. Pearce II, John A and Richard B. Robinson Jr ., (2000). *Strategic Management* . Formulation, Implementastion, and Control. 7th Edition, Irwin McGraw-Hill.
- Situmorang, Johnny W., (2005). *Pembangunan Nasional, Investasi, dan UKM*. *Majalah Infokop ISSN: 0126-813X*, no 27 tahun XX 2005. Kementerian KUKM Jakarta.
- Yip, George S., (1992). *Total Global Strategy . Managing for Worldwide Competitive advantages*. Prentice Hall.
- Djelantik, A.A.M., 1999 *Estetika Sebuah Pengantar*, Bandung .. Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia
- Maksan, Hadiyanto 1984 *Teknologi Penyamakan 1*, Yogyakarta : Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
- Mulia,TGS., and K.A.H. Hidding, 1983, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta : PN Ictihar Baru Van Hoeven
- Purnomo, Edy., 1992 *Penyamakan Kulit Reptil*, Yogyakarta : Kanisius
- Sagio dan Samsugi, 1991, *Wayang Kulit Gagrak Yogyakarta : Morfologi, Tatahan, Sunggingan dan teknik pembuatannya*, Jakarta : CV. Haji Masagung
- Soehadji, M., 1979, *Desain Kerajinan dan Masalahnya*, Yogyakarta : Diktat, STSRI/ASRI
- Thortenson, *Practical leather Technologi*, New york : RE. Krieger Publishing Company
- Toekiyo, Soengeng, et al., 1987 *Pengantar Seni Rupa*, Surakarta : Akademi Seni Karawitan Indonesia
- "Design Meet Artisan" *Craft Revival Trust*, Artesanfas de Columbia S.A., Unesco, 2005.
- Adler Haymans Manurung, *Wirausaha Bisnis Usaha Kecil Menengah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

- Enrico Vacetti, importir dari Karu, Milano, Italia. Wawancara pada tanggal 20 November 2008 di Kasongan Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- SP. Gustami 1991, Seni Kriya Indonesia Dilema Pembinaan dan Pengembangannya, *Jurnal Seni, Edisi 1/03 Oktober*, BP. ISI. Yogyakarta.
- Tika Nurjaya (ed.), *Usaha Kecil Indonesia Tinjauan Tahun 2002 dan Prospek Tahun 2003*, Indonesia Small Business Research. P. XX.
- Nugroho Heru, 2001, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Khairuddin H, 1995, *Filsafat Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nugroho, (ed), 2002, *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, Jakarta, Center for Critical Social Studies dan Forum Bulaksumur School of Thought.
- Crask, Fox & Stout (1995), *Marketing Research: Principle & Application*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Husnan,S. & Suwarsono,(1997), *Studi Kelayakan Proyek*, Edisi ketiga, Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Kotler,P (2005), *Marketing Management*, 12th Edition, New Jersey .. Prentice Hall Inc.
- Rangkuti, F. (1999), *Riset Pemasaran*, Cetakan ketiga, Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar,H.(1997), *Studi Kelayakan Bisnis: Manajemen, Metode dan Kasus*, Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

TENTANG PENULIS

Latifah, SE, MSc.

Penulis bernama lengkap Latifah, SE, MSc. Lahir di Klaten pada 3 September 1968. Menyelesaikan sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama di desa kelahirannya Cawas Klaten dan melanjutkan sekolah menengah atasnya di SMA Muhammadiyah I Jogjakarta. Pada tahun 1993 berhasil menyelesaikan studi strata satu pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia Jogjakarta. Kemudian studi lanjut strata dua dicapai pada tahun 1996 di STIE IPWI Jakarta dengan mendapatkan gelar Magister Manajemen. Dalam upaya untuk mencapai linieritas pendidikan, pada thn 2013 berhasil menyelesaikan strata dua kembali bidang akuntansi pada FEB UGM.

Pengalaman kerja di bidang pendidikan dimulai pada thn 1995-1996 sebagai Ketua Program Studi Akuntansi, FE-UNISMA Bekasi Jawa Barat. Thn 2009-2013 sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan, SDM dan Umum UP45 Jogjakarta. Thn 2013-sekarang sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik di Universitas yang sama.

Pengalaman praktisi dimulai pada thn 1988-1992 sebagai Staf keuangan PT Asoka Textile Sebuah perusahaan asing (India) yang bergerak dalam bidang perdagangan textile . Kemudian pada tahun 1996-2000 menjabat sebagai Manager akunting PT Yupi Indo Jelly Gum sebuah perusahaan asing (Jerman) yang bergerak dalam bidang manufaktur gula-gula. Penulis juga pernah menjabat sebagai Asisten manager keuangan PT Samatect Indonesia Sebuah perusahaan asing (Jepang) yang bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan produk baja pada tahun 2000-2001. Selanjutnya tahun 2002, menjabat sebagai Manager keuangan PT Marubeni Steel Processing Indonesia yaitu sebuah perusahaan asing (Jepang) yang bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan produk baja. Di tahun 2003, menjabat sebagai Manager Operasional PT Solar Global International, sebuah perusahaan asing (Lybia) yang bergerak dalam bidang investasi, Sejak 2003 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur CV Cagak Mas, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang mekanikal dan elektrik, sebagai Direktur pada CV Citra Catering, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa boga dan sebagai Direktur PT Wijaya Kencana, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tinsplate

Pengalaman berorganisasi dimulai sejak tahun 2002 sebagai bendahara pada The International Institute Islamic Thought Indonesia, sebagai Ketua pada organisasi Koperasi Al-Hidayah dimana keduanya masih dijabat hingga sekarang. Pernah menjabat sebagai Sekretaris pada organisasi Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2004 sampai 2008. Menjadi leader sejak tahun 2009 hingga sekarang pada organisasi International Award for Young People.

Penulis memiliki pengalaman melakukan kajian ilmiah Downstream Multiplier Effect Pengembangan Gas Terpadu Unitisasi Lapangan Jambaran/Tiung Biru dan Cendana di tahun 2013 yang dikelola oleh PT. Pertamina EP Cepu selaku K3S sebagai Tenaga Ahli Bidang Ekonomi. Pada tahun 2012 melakukan Kegiatan Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat dan POFD Lapangan Migas Tampi di Kabupaten Musi Rawas - Propinsi Sumatera Selatan, yang dikelola oleh PT. Seleraya Marangin Dua (SMD) selaku K3S sebagai Ketua Tim. Pada tahun yang sama melakukan Kegiatan Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat dan POFD Tapiian Timur di Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikelola oleh PT. Pertamina EP selaku K3S sebagai Ketua Tim dan Kegiatan Kajian Sosial Ekonomi & Plan Of Development (PFD) Lapangan Migas Pandan – Kabupaten Musi Rawas – Sumatera Selatan sebagai Tenaga Ahli Bidang Komersial dan Keekonomian.

Karya yang dipublikasikan dalam satu tahun terakhir antara lain Pengaruh Variabel Perceived of Enjoyment dan Attitude terhadap Pemanfaatan Visal Hotel Program di Jurnal Research Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi FE UNISMA. Pengaruh Sistem Perpajakan, Audit Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas terhadap Tax Compliance di Jurnal Maksipreneur FE Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Dra. Ambar Lukitaningsih,MM

Ambar lukitaningsih, lahir di Yogyakarta 17 Mei 1965. Memperoleh gelar Program Magister Manajemen tahun 1997 dari Universitas Islam Indonesia dalam bidang ekonomi dan sekarang masih menyelesaikan studi lanjut program doctoral di Universtas Islam Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Direktorat Ekonomika dan Bisnis, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Staf Pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran, Komunikasi Bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Selain mengajar juga aktif melakukan berbagai penelitian tentang pariwisata, menulis artikel di jurnal nasional,memberikan pendampingan pada pos daya, serta memberikan pelatihan perbankan di Pusat Training Perbankan DIY.

Dra. Eny Sulistyowati,MM

Lahir di Magetan, 1 Januari 1965. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UP 45 Yogyakarta, dan S2 pada Program Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi UP 45. Selain mengajar juga aktif dibeberapa penelitian dan menjadi traineer pelatihan.

Yuli Kurniyati, SE, MM

Dosen Tetap Universitas Proklamasi 45 sejak tahun 1996 sampai sekarang, Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Proklamasi 45 tahun 1994, Magister Management STIE Mitra Indonesia tahun 2004, tertarik pada bidang manajemen koperasi; jabatan akademik Lektor. Sejak tahun 2010 telah lulus sertifikasi dosen dan dinyatakan sebagai dosen profesional bidang studi manajemen. Karya terpilih : MODEL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DAN PEMROGRAMAN AJAX UNTUK PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBENTUK KOPERASI PEDESAAN (Hibah StraNas DP2M Dikti selama 2 tahun); Peranan KUD dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Tani; PERANAN KEWIRAUSAHAAN KOPERASI DALAM MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING (COMPETITIVE ADVANTAGES) KOPERASI; PEARLS: seperangkat alat monitoring dan evaluasi Kinerja keuangan koperasi kredit

Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM

Lahir di Purworejo, 2 April 1961. Adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45. Sebagai peneliti telah mempublikasikan tulisan di berbagai jurnal. Pernah menduduki berbagai jabatan struktural di fakultas dan universitas, kini adalah kepala KPM (Kantor Penjaminan Mutu) Universitas Proklamasi 45. Bidang kajian yang ditekuninya adalah manajemen keuangan dan manajemen operasional.

Drs. Jemadi, MM

Lahir di Kulonprogo, 20 September 1963. Adalah dosen tetap dengan pangkat lektor di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Lulus S1 Fakultas Ekonomi UP45 tahun 1989, dan menyelesaikan S2 dari STIE Mitra Indonesia tahun 1999. Pernah menjabat berbagai jabatan struktural, seperti Ketua Jurusan Manajemen, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kini menjabat sebagai Kepala LPPM Universitas Proklamasi 45. Telah melakukan banyak penelitian, baik penelitian mandiri maupun penelitian yang didanai oleh Kopertis, Dikti, instansi pemerintah, serta swasta. Minat kajiannya adalah di bidang manajemen operasi dan telah mempublikasikan karya-karyanya di berbagai jurnal.

Vertasius Sanjaya Nugraha, A.Md, S.Pd, M.Pd

Lahir di Sleman memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dari Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta pada Jurusan Teknologi Barang Jadi, gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di peroleh dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta pada Jurusan Pendidikan Seni Rupa sedangkan gelar (M.Pd) di peroleh dari Universitas Negeri Yogyakarta pada program Pasca Sarjana dengan mengambil Program Studi Pendidikan Teknologi Dan kejuruan (PTK). Pengalaman bekerja pertama kali di Perusahaan Sepatu anak-anak Di PT. Difta Sunrise Surabaya bagian Development, mengajar di SMIK Yogyakarta, menjadi Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Di Dinas Perindustrian Kota Madya Yogyakarta dan mulai dari tahun 1995 sampai dengan sekarang menjadi staf pengajar di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta.

Tutuk Ari Arsanti, SE.,M.Si.

Lahir di Salatiga 16 Februari 1978, lulus S1 prodi Manajemen UKSW tahun 2001 dan lulus S2 di program Magister Sains FEB UGM tahun 2007 untuk kepakaran MSDM. Mengajar di program profesional untuk prodi Manajemen Perusahaan UKSW dari 2001-2010. Selanjutnya menjadi dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas yang sama dari tahun 2010 sampai sekarang.

Drs. Totok Danangdjojo, MM.

Lahir di Yogyakarta 24 Juni 1953, Lulus S1 di UGM dan lulus S2 di STIE Mitra Indonesia. Masa kerja di Universitas Proklamasi dari tahun 1985 sampai sekarang. Selain itu pernah mengajar S2 di AUBANK Solo selama 2 semester dan UAD Ekonomi selama 6 Tahun. Jabatan struktural mulai dari Kabag Kemahasiswaan dan Alumni, Pembantu Dekan III selama 2 periode, Kaprodi selama 1 periode, dan Wakil Dekan 1 selama 1 periode. Menekuni kewirausahaan dalam bidang percetakan dari tahun 1987 sampai sekarang.

MITRA BEBESTARI

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada mitra bebestari yang telah menjadi penelaah bagi jurnal Maksipreneur Volume III Nomor 1, Desember 2013. Berikut adalah daftar mitra bebestari yang telah berpartisipasi:

Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo (*Universitas Proklamasi 45*), untuk telaah ekonomi dan koperasi

Prof. Dr. Ir. Herman Agustiawan, M.Sc. (*Dewan Energi Nasional*), untuk telaah ekonomi dan energi

Prof. Dr. R. Andi Soelarso, M.Si. (*Universitas Jember*), untuk telaah ekonomi dan manajemen

Prof. Dr. Kustim Wibowo, MIS (*Indiana University of Pennsylvania*), untuk telaah sistem dan teknologi Informasi

Dr. Rezki Anindhito, M.Sc. (*Universitas Bina Nusantara*), untuk telaah ekonomi, energi dan keuangan

Dr. H. Slamet Sutrisno, MM, M.Si. (*Universitas Krisna Dwi Payana*), untuk telaah ekonomi manajemen

Ir. Bambang Irjanto, MBA (*Universitas Proklamasi 45*), untuk telaah kewirausahaan dan ekonomi kreatif

KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

KEBIJAKAN EDITORIAL

1. Jurnal diterbitkan 2 (dua) kali dalam satu tahun oleh Fakultas Ekonomi UP45 (Universitas Proklamasi 45) Yogyakarta pada bulan Juni dan Desember
2. Jurnal menerima artikel hasil penelitian maupun non-penelitian yang mengkaji permasalahan manajemen, koperasi, kewirausahaan, dan ekonomi secara umum.
3. Naskah artikel bisa ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar.
4. Naskah adalah hasil karya penulis yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
5. Penentuan kelayakan artikel yang dimuat melalui proses *blind review* oleh Penyunting Pelaksana. Artikel yang tidak layak untuk dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
6. Pengiriman naskah paling lambat diterima 1 bulan sebelum diterbitkan untuk setiap edisi. Keterlambatan penerimaan naskah akan diterbitkan pada periode berikutnya.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Sistematika Penulisan
 - a. Judul, ditulis secara ringkas dan jelas dengan panjang judul tidak lebih dari 12 kata atau 90 karakter.
 - b. Nama penulis, dicantumkan di bawah judul. Di bawah nama penulis dicantumkan unit kerja atau instansi beserta alamat email.
 - c. Abstrak, ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata yang berisi intisari tulisan atau ide-ide pokok tulisan.
 - d. *Keywords*, terdiri atas sekita lima kata kunci yang dipisahkan dengan koma.
 - e. Isi Tulisan/ Naskah, mencakup: pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan, implikasi dan saran. Tulisan bisa dilengkapi dengan tabel, gambar, dan ilustrasi lainnya jika diperlukan.
 - f. Ucapan terima kasih atau penghargaan (*acknowledgement*), jika diperlukan.
 - g. Daftar Pustaka

2. Naskah diketik menggunakan *microsoft word* dengan ketentuan sebagai berikut: ukuran kertas A4, spasi 1,5, huruf (*font*) *Times New Roman* (12 poin), naskah diserahkan dalam bentuk *softcopy* berikut 2 (dua) eksemplar *hardcopy*.
3. Jurnal halaman naskah, termasuk tabel, gambar, dan ilustrasi lain adalah 15 sampai 20 halaman kwarto.
4. Ketentuan lain:
 - a. Judul tabel, gambar, dan ilustrasi lain diberi nomor dan diletakan rata tengah. Judul tabel diletakkan di atas, judul gambar dan ilustrasi lain diletakkan di bawah.
 - b. Jika tabel, gambar, atau ilustrasi lain merupakan kutipan, sumber kutipan disebutkan di bawahnya.
 - c. Kutipan dalam bentuk teks sebaiknya ditulis dengan menyebutkan nama akhir penulis, tahun, dan nomor halaman (jika dipandang perlu).

Contoh:

- (Kotler, 2009:143)
- (Kotler (2009:143) mengatakan bahwa...

- d. Daftar pustaka disusun secara alfabetis yang berisi nama penulis (nama belakang ditulis lebih dahulu, dan dipisah dengan tanda koma), diikuti tahun publikasi, judul artikel atau buku teks, nama jurnal atau penerbit, edisi, kota.

Contoh penulisan daftar pustaka:

- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Versus Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahono, Francis, 2008, "Kedaulatan Pangan: Agri-culture bukan Agri-business", dalam Suharman (Ed.) *Bunga Rampai Pemikiran Pedesaan, 2002-2008* (Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan [PSPK] UGM, 2008.
- Donohue, John J. dan Steven D. Levitt, 2004, "The Impact of Legalized Abortion on Crime" dimuat dalam *The Quarterly Journal of Economics*, Vol CXVI, May 2001, hal. 379-420.

